



YK
KOTA
YOGYAKARTA

LAPORAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL KOTA YOGYAKARTA



TAHUN ANGGARAN 2022

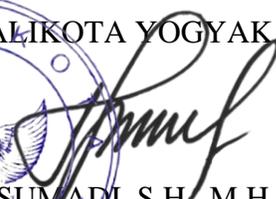


KATA PENGANTAR

Laporan penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) tahun 2021 merupakan wujud pelaksanaan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM, yang menyebutkan bahwa Pemerintah Daerah wajib menyampaikan "Laporan Penerapan SPM dimuat dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dilakukan selama 1 (satu) tahun anggaran dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir". Laporan SPM sebagaimana dimaksud di atas antara lain memuat latar belakang, penerapan SPM, dan pencapaian SPM, serta program, kegiatan, dan sub kegiatan SPM. Tahun 2022 merupakan tahun pemulihan setelah meredanya Pandemi Covid-19 sehingga banyak pelaksanaan program dan kegiatan di Kota Yogyakarta mulai berjalan dengan optimal dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.

Oleh karena itu, penghargaan dan ucapan terima kasih setinggi-tingginya disampaikan kepada segenap jajaran perangkat daerah terutama OPD pemangku urusan pelayanan dasar dan *stakeholder* terkait yang telah memberikan dukungan motivasi dan sumbangsuhnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran masukan yang bersifat membangun sangat kami harapkan sebagai bahan perbaikan kinerja dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Kota Yogyakarta. Demikian laporan ini kami sampaikan, besar harapan kami semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Akhirnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila masih terdapat kekurangan dalam laporan ini, dan kami mengucapkan terima kasih atas bantuan dan kerjasama dari berbagai pihak.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

SUMADI, S.H., M.H.
NIP. 196308261989031007



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	1
1.3 KEBIJAKAN UMUM.....	2
1.4 ARAH KEBIJAKAN	3
BAB II TAHAPAN PENERAPAN SPM	4
2.1 PENGUMPULAN DATA	4
2.1.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	4
2.1.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN	6
2.1.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM	7
2.1.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	9
2.1.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS.....	12
2.1.6 BIDANG URUSAN SOSIAL	18
2.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR.....	26
2.2.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN.....	26
2.2.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	27
2.2.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	30
2.2.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	32
2.2.5 BIDANG TRANTIBUMLINMAS	32
2.2.6 BIDANG URUSAN SOSIAL.....	36
2.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR.....	46
2.3.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	46
2.3.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	51
2.3.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	52
2.3.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	54
2.3.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS	54
2.3.6 BIDANG URUSAN SOSIAL.....	57
2.4 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR	57
2.4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN	57
2.4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN.....	58
2.4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM.....	59
2.4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT.....	62
2.4.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS	62
2.4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL.....	67



BAB III PENCAPAIAN SPM.....	69
3.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN.....	69
3.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN	77
3.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM	87
3.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	95
3.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS	101
3.6 BIDANG URUSAN SOSIAL	127
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN	145
4.1 URUSAN PENDIDIKAN	145
4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN	149
4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM	150
4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT	150
4.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS	150
4.6 URUSAN SOSIAL.....	152
BAB IV PENUTUP.....	154



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1	Angka Partisipasi Jenang PAUD dan Pendidikan Dasar	4
Tabel 2. 2	Jumlah dan Kualitas Pendidik Serta Tenaga Kependidikan Formasi Guru ASN Bagi Sekolah Di Kota Yogyakarta	5
Tabel 2. 3	Data Kualitas Hasil Belajar Bagi Peserta Didik Berdasarkan Hasil Assessment Nasional	5
Tabel 2. 4	Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar Literasi dan Numerasi Bagi Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Berdasarkan Status Sosial dan Ekonomi Keluarga	5
Tabel 2. 5	Data Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jumlah satuan PAUD yang sudah terakreditasi dan prosentase kebutuhan pendidik yang berkualifikasi S1/DIV, dan jumlah rasio pengawas untuk satuan PAUD.	6
Tabel 2. 6	Data Kualitas Lingkungan Belajar yang menjadi dasar untuk menghitung indek iklim keamanan dan iklim kebhinekaan di satuan pendidikan.	6
Tabel 2. 7	Target sasaran SPM Kesehatan	6
Tabel 2. 8	Data Air Baku dan Produksi Air Minum di Kota Yogyakarta	7
Tabel 2. 9	Rekap Layanan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta	8
Tabel 2. 10	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Banjir	10
Tabel 2. 11	Rumah Yang Terkena Bencana	11
Tabel 2. 12	Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh	11
Tabel 2. 13	Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter di Lokasi Penegakan Perda dan Perkada	12
Tabel 2. 14	Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada	13
Tabel 2. 15	Rekapitulasi Sop Kegiatan Penegakan Perda/Perkada	14
Tabel 2. 16	Rekapitulasi Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP	14
Tabel 2. 17	Rekapitulasi Sumberdaya Manusia yang dimiliki Oleh OPD Satpol PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS).....	15
Tabel 2. 18	Rekapitulasi Perda Perkada Yang Akan Ditegakkan	15
Tabel 2. 19	Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter	15
Tabel 2. 20	Target Sasaran SPM Sub Urusan Bencana Pada Tahun 2022.....	16
Tabel 2. 21	Data Dukung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	17
Tabel 2. 22	Daftar Relawan Pemadam Kebakaran.....	17
Tabel 2. 23	Daftar Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran.....	18
Tabel 2. 24	Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis	18
Tabel 2. 25	Mutu Minimal Layanan Pendidikan	26
Tabel 2. 26	kebutuhan logistik pemenuhan SPM Kesehatan	27
Tabel 2. 27	Kebutuhan Tenaga Kesehatan	29
Tabel 2. 28	Penghitungan Data Warga Kota Yogyakarta yang terlayani SPAM.....	30
Tabel 2. 29	Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Yogyakarta tahun 2021-2025.....	31
Tabel 2. 30	Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan.....	32
Tabel 2. 31	Perhitungan Pelaksanaan Kegiatan SPM Kebencanaan Tahun 2022.....	33
Tabel 2. 32	Layanan Perhitungan Response Time Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit	33
Tabel 2. 33	Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran	34
Tabel 2. 34	Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi.....	35
Tabel 2. 35	Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran	36
Tabel 2. 36	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran	36



Tabel 2. 37	Penghitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti	37
Tabel 2. 38	Penghitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	44
Tabel 2. 39	Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan	46
Tabel 2. 40	Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.....	51
Tabel 2. 41	Rencana Penyediaan Kebutuhan Air Minum	52
Tabel 2. 42	Rencana Anggaran di Tahun 2023:	53
Tabel 2. 43	Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum	55
Tabel 2. 44	Perhitungan SPM Kebencanaan di Tahun 2022	56
Tabel 2. 45	Rencana pemenuhan pelayanan dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.....	57
Tabel 2. 46	Realisasi Pencapaian Pemenuhan Spm Pendidikan.....	57
Tabel 2. 47	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Kesehatan	59
Tabel 2. 48	Pelaksanaan pemenuhan pelayanan Air Minum Kota Yogyakarta	59
Tabel 2. 49	Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	60
Tabel 2. 50	Pekerjaan yang dilaksanakan sebagai pemenuhan pelayanan dasar.....	61
Tabel 2. 51	Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat.....	63
Tabel 2. 52	Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64
Tabel 2. 53	Pelaksanaan SPM Kebencanaan	66
Tabel 2. 54	Rekapitulasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (pemadaman dan evakuasi)	67
Tabel 2. 55	Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran).....	67
Tabel 2. 56	Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti Kabupaten Kota	68
Tabel 3. 1	Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	69
Tabel 3. 2	Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	70
Tabel 3. 3	Rincian Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Pendidikan Tahun 2022	70
Tabel 3. 4	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022.....	74
Tabel 3. 5	Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	75
Tabel 3. 6	Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022	76
Tabel 3. 7	Target Dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022	77
Tabel 3. 8	Alokasi anggaran dan realisasi SPM bidang Kesehatan di tahun 2022.....	79
Tabel 3. 9	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022	79
Tabel 3. 10	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022	81
Tabel 3. 11	Personil yang terlibat dalam pemenuhan SPM Urusan Kesehatan tahun 2022	82
Tabel 3. 12	Realisasi SPM Urusan Kesehatan tahun 2022.....	82
Tabel 3. 13	Kendala, Permasalahan, dan Solusi dalam SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022	84
Tabel 3. 14	Target Dalam Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	87
Tabel 3. 15	Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2022	89
Tabel 3. 16	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022	89
Tabel 3. 17	Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2022	93



Tabel 3. 18	Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2022	93
Tabel 3. 19	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum tahun 2022	95
Tabel 3. 20	Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022.....	95
Tabel 3. 21	Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2022.....	96
Tabel 3. 22	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2022	97
Tabel 3. 23	Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2022.....	98
Tabel 3. 24	Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022	99
Tabel 3. 25	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022	101
Tabel 3. 26	Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022	103
Tabel 3. 27	Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022	104
Tabel 3. 28	Anggaran SPM Urusan Trantibum tahun 2022	105
Tabel 3. 29	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Trantibum Tahun 2022	106
Tabel 3. 30	Dukungan Personil SPM Urusan Trantibum Tahun 2022.....	107
Tabel 3. 31	Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022.....	108
Tabel 3. 32	Kendala, Permasalahan, dan Solusi SPM Urusan Trantibum tahun 2022	110
Tabel 3. 33	Target SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022	112
Tabel 3. 34	Anggaran SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022.....	114
Tabel 3. 35	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022.....	114
Tabel 3. 36	Personil yang Menangani SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022	117
Tabel 3. 37	Capaian SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022	118
Tabel 3. 38	Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022	120
Tabel 3. 39	Target pencapaian SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022	121
Tabel 3. 40	Alokasi anggaran untuk kegiatan SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022	122
Tabel 3. 41	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022	122
Tabel 3. 42	Personil Yang Terlibat SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022	125
Tabel 3. 43	Realisasi capaian SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022	126
Tabel 3. 44	Kendala, permasalahan dan solusi SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022	126
Tabel 3. 45	Target Capaian SPM Urusan Sosial tahun 2022	127
Tabel 3. 46	Anggaran SPM Urusan Sosial tahun 2022	134
Tabel 3. 47	Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial tahun 2022	135
Tabel 3. 48	Kegiatan lainnya SPM Urusan Sosial tahun 2022.....	137
Tabel 3. 49	Dukungan Personil SPM Urusan Sosial tahun 2022	137
Tabel 3. 50	Capaian SPM SPM Urusan Sosial tahun 2022	138
Tabel 3. 51	Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Sosial tahun 2022	144
Tabel 4. 1	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Pendidikan Tahun 2022	145
Tabel 4. 2	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Kesehatan Tahun 2022.....	149
Tabel 4. 3	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022	150



Tabel 4. 4	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Trantibum Tahun 2022.....	150
Tabel 4. 5	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Kebencanaan Tahun 2022.....	151
Tabel 4. 6	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Pendidikan Tahun 2022	152
Tabel 4. 7	Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Sosial Tahun 2022.....	152



BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Penyelenggaraan pelayanan yang menyangkut masyarakat sebagai pelayanan publik tidak luput dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel dan berkinerja tinggi. Pencapaian kinerja pelayanan publik sering kali terkendala akibat adanya variasi dalam penyelenggaraan atau proses pelayanan. Salah satu upaya untuk mengurangi variasi proses tersebut adalah dengan melakukan standarisasi. Salah satu standar pelayanan yang telah disusun dan ditetapkan oleh pemerintah adalah Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Penerapan SPM dan pemenuhan pelayanan dasar tersebut dilakukan oleh Pemerintah Daerah baik Pemerintah Daerah Provinsi maupun Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Pelayanan dasar dalam Standar Pelayanan Minimal merupakan pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang selanjutnya menjadi jenis SPM terdiri atas:

1. Pendidikan;
2. Kesehatan;
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat; dan
6. Sosial.

Standar Pelayanan Minimal diposisikan untuk menjawab isu-isu krusial dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, khususnya dalam pelayanan dasar pada terciptanya kesejahteraan masyarakat. Upaya ini sangat sesuai dengan apa yang dijamin dalam konstitusi sekaligus untuk menjaga kelangsungan kehidupan berbangsa yang serasi, harmonis dan utuh. Untuk memberikan pelayanan publik secara maksimal kepada masyarakat yang berorientasi terhadap terwujudnya pelayanan publik yang prima, maka Pemerintah Kota Yogyakarta menerapkan SPM dengan tujuan peningkatan pelayanan prima menuju *Good Governance*.

1.2 DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang



- Nomor 1 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
 5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29/Prt/M/2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Trantibum;
 9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Kabupaten/Kota dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 22 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026;
 12. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 35 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2023-2026.

1.3 KEBIJAKAN UMUM

Kebijakan umum menggambarkan kebijakan umum daerah yang dimuat dalam rencana penerapan dan pencapaian SPM serta dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Daerah Kota Yogyakarta. Kebijakan umum Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Kebijakan Umum APBD Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 merupakan kesepakatan bersama antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Nota Kesepakatan.

Selanjutnya perangkat daerah yang melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan memastikan dan memprioritaskan program, kegiatan dan sub kegiatan pemenuhan pelayanan dasar dimuat dalam dokumen RPJMD hal tersebut berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal. Selain itu ketersediaan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2022 juga diprioritaskan dalam mencapai target-target pembangunan Kota Yogyakarta Tahun 2022, serta akan digunakan dalam mendukung jalannya pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat.



1.4 ARAH KEBIJAKAN

Program prioritas pembangunan daerah dirumuskan dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Penentuan program prioritas dimaksud dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi dana dan urgensi yang diformulasikan ke dalam arah dan kebijakan, dimana di dalamnya terdiri dari tujuan pelaksanaan program, sasaran yang hendak dicapai, dan indikator pencapaian yang digunakan dalam mengukur keberhasilan dalam pelaksanaan program. Untuk mendukung kebijakan pada arah pelayanan yang baik, Pemerintah Kota Yogyakarta berkomitmen dengan dukungan dana dan kinerja semua OPD. Arah kebijakan menggambarkan orientasi dan komitmen yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta selama Tahun Anggaran 2022 dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM di Kota Yogyakarta yang dituangkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA).



BAB II TAHAPAN PENERAPAN SPM

2.1 PENGUMPULAN DATA

2.1.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Tahapan pertama yang dilaksanakan dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM pada Urusan pendidikan tahun 2022 di Kota Yogyakarta adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan baseline data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan dasar SPM bidang pendidikan kota yang terdiri atas:

1. Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Pendidikan Dasar;
3. Pendidikan Kesetaraan.

Data yang berhasil dihimpun pada tahun 2022 terkait pelayanan dasar SPM pada Urusan Pendidikan diantaranya adalah data Angka Partisipasi, data Jumlah Dan Kualitas Pendidik Dan Tenaga Kependidikan, Data Kualitas Hasil Belajar, Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar: Literasi Dan Numerasi, data Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Data Kualitas Lingkungan Belajar.

Tabel 2. 1 Angka Partisipasi Jenang PAUD dan Pendidikan Dasar

No	JENIS PELAYANAN DASAR	ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) PENDIDIKAN ANAK USIA DINI/RA/SEDERAJAT		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SD/MI/PAKET A		ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) SMP/MTS/PAKET B.		ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH ANAK USIA 7 SAMPAI DENGAN 15 TAHUN	
		PESERTA DIDIK USIA 5-6 TAHUN YANG MENGIKUTI PAUD FORMAL DAN NON FORMAL	JUMLAH POPULASI ANAK USIA 5-6 TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SD/MI/PAKET A	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 12 (DUA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK YANG BERSEKOLAH DI JENJANG SMP/MTS/PAKET B	JUMLAH ANAK USIA 13 (TIGA BELAS) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN	JUMLAH ANAK USIA 7 (TUJUH) SAMPAI DENGAN 15 (LIMA BELAS) TAHUN PADA KAB/KOTA YANG BERSANGKUTAN
1	Pendidikan Anak Usia Dini (TK/RA/BA/K B/SPS/TPA)	10.059	10.945						
2	Pendidikan Dasar (SD/MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)			40.226	36.250	24.024	19.413	59.875	55.663



Tabel 2. 2 Jumlah dan Kualitas Pendidik Serta Tenaga Kependidikan Formasi Guru ASN Bagi Sekolah Di Kota Yogyakarta

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KECUKUPAN FORMASI GURU ASN UNTUK SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN OLEH PEMDA SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PENINGKATAN INDEKS DISTRIBUSI GURU (PAUD/SD/SMP/KESETARAAN)	
		JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIAJUKAN	JUMLAH FORMASI GURU ASN YANG DIBUTUHKAN BERDASARKAN DATA DARI KEMENDIKBUDRISTEK
1	Pendidikan Dasar (SD/SMP/Kesetaraan)	347	268

Tabel 2. 3 Data Kualitas Hasil Belajar Bagi Peserta Didik Berdasarkan Hasil *Assessment* Nasional

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	KEMAMPUAN LITERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)		KEMAMPUAN NUMERASI PESERTA DIDIK (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)	
		RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI LITERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL DIKURANGI RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA NILAI NUMERASI TAHUN N-1 SEMUA PESERTA ASESMEN NASIONAL
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)	0,1	2,08	0,1	1,78

Tabel 2. 4 Data Pemerataan Kualitas Hasil Belajar Literasi dan Numerasi Bagi Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Berdasarkan Status Sosial dan Ekonomi Keluarga

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/ KESETARAAN)		PERBEDAAN SKOR LITERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/KESETARAAN)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA PESERTA DIDIK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/KESETARAAN)		PERBEDAAN SKOR NUMERASI ANTARA KELOMPOK PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH DAN TINGGI (SD/ MI/ SMP/ MTS/KESETARAAN)	
		RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK LAKI LAKI BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR LITERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK LAKI-LAKI BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK PEREMPUAN BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI RENDAH BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL	RATA-RATA SKOR NUMERASI PESERTA DIDIK DARI KELUARGA DENGAN STATUS SOSIAL EKONOMI TINGGI BERDASAR KAN ASESMEN NASIONAL
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)	-4.94	-4.94	1.12	1.12	-0.48	-0.48	0.46	0.46



Tabel 2. 5 Data Layanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jumlah satuan PAUD yang sudah terakreditasi dan prosentase kebutuhan pendidik yang berkualifikasi S1/DIV, dan jumlah rasio pengawas untuk satuan PAUD.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PENINGKATAN PROPORSI JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN MINIMAL AKREDITASI B		PERTUMBUHAN PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV		RASIO PENGAWAS SEKOLAH UNTUK PAUD	
		JUMLAH SATUAN PAUD YANG MENDAPATKAN AKREDITASI MINIMAL B	JUMLAH KESELURUHAN SATUAN PAUD YANG TELAH DIAKREDITASI DI KAB/KOTA TERSEBUT	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N	PERSENTASE PENDIDIK PAUD DENGAN S1/DIV PADA TAHUN N-1	JUMLAH PENGAWAS SEKOLAH UNTUK TK DITAMBAH JUMLAH PENILIK PAUD NONFORMAL	JUMLAH SATUAN PAUD
1	Pendidikan Anak Usia Dini	203	210	668	678	14	694

Tabel 2. 6 Data Kualitas Lingkungan Belajar yang menjadi dasar untuk menghitung indeks iklim keamanan dan iklim kebhinekaan di satuan pendidikan.

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	INDEKS IKLIM KEAMANAN DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/MTS/Kesetaraan)	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS DI SATUAN PENDIDIKAN (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)
		INDEKS IKLIM KEAMANAN RATA- RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL	INDEKS IKLIM KEBINEKAAN DAN INKLUSIVITAS RATA- RATA SATUAN PENDIDIKAN PADA TAHUN N-1 BERDASARKAN ASESMEN NASIONAL
1	Pendidikan Dasar (SD/ MI/ SMP/ MTS/Kesetaraan)	2,5	2.24

2.1.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Pengumpulan data sasaran dilakukan tiap tahunnya. Sumber data yang digunakan untuk tiap indikator SPM berbeda-beda, sesuai dengan kondisi di lapangan. Data yang digunakan adalah data riil akhir tahun yang ditetapkan oleh kepala Dinas Kesehatan.

Tabel 2. 7 Target sasaran SPM Kesehatan

NO	Kemantren	Ibu hamil	Ibu bersalin	Bayi baru lahir	Balita	Usia pendidikan dasar	Usia produktif	Usia lanjut	Hipertensi	Diabetes melitus	OD GJ	Terduga TB	HIV
1	Danurejan	105	105	105	600	3213	7885	1851	2040	930	63	336	1238
2	Gondokusuman	207	207	205	1195	10236	7774	3283	3635	2054	67	680	1241
3	Gondomanan	91	91	88	469	3008	3207	1662	1145	497	52	236	619
4	Gedongtengen	80	80	79	427	2281	4914	1508	907	631	59	308	619
5	Jetis	159	159	158	887	5152	5801	2296	2423	1028	82	437	619
6	Kotagede	284	284	283	1543	5619	7301	3416	2323	1168	100	552	1238
7	Kraton	97	97	95	563	2938	4721	1958	1153	438	60	343	619
8	Mergangsan	160	160	155	1105	3586	7117	2777	2158	787	183	504	619
9	Mantrijeron	220	220	225	1158	2600	7924	3283	2171	914	118	561	619



NO	Kemantren	Ibu hamil	Ibu bersalin	Bayi baru lahir	Balita	Usia pendidikan dasar	Usia produktif	Usia lanjut	Hipertensi	Diabetes melitus	OD GJ	Terduga TB	HIV
10	Ngampilan	88	88	89	618	3166	5524	1488	1067	429	22	289	619
11	Pakualaman	63	63	62	374	1172	3964	934	883	521	72	168	619
12	Tegalrejo	282	282	280	1643	4859	4034	2810	2729	964	76	590	619
13	Umbulharjo	481	481	477	3057	11422	1745 5	6031	4073	2455	19 8	1124	1238
14	Wirobrajan	178	178	180	958	4645	6247	2717	1713	860	49	443	619
	Luar wilayah Kota Yk											2400	
		2495	2495	2481	1459 7	63897	9386 8	3601 4	2842 0	1367 6	12 01	8971	1114 5

2.1.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan Air Minum, Kota Yogyakarta berusaha untuk selalu meningkatkan perluasan sistem penyediaan air minum dengan mengendalikan kualitas dan kuantitas air serta tekanan air, sehingga masyarakat pelanggan dapat terlayani 24 jam. Data air baku dan produksi air minum di kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Data Air Baku dan Produksi Air Minum di Kota Yogyakarta

NO.	KEC.	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10
1	Mlati, Gamping	Tegalsari, Bedog, Biru, Nusupan, Panggungan, Nglarang, Ketingan, Baturan, Blambangan, Kragilan	Sumur Dalam	Bedog	Bedog dan sekitarnya	116,88	106,07	10,81	PDAM
2	Ngalik, Mlati	Jongkang, Nandan, Gemawang, Kentungan	Sumur Dangkal & Sumur Dalam	Gemawang	Gemawang dan sekitarnya	59,7	46,38	13,32	PDAM
3	Tegalrejo	Sidomulyo	Sumur Dangkal & Sumur Dalam	Bener	Bener dan sekitarnya	17,87	11,26	6,61	PDAM
4	Ngalik, Sardono, Sariharjo, Donoharjo	Gondangan, Ngalangan, Ledokwareng, Lojajar, Wonokerso, Gondanglegi, Ngempalk	Sumur Dalam	Ngalik	Ngalik dan sekitarnya	58,46	41,82	16,64	PDAM
5	Depok	Karangwuni, Karanggayam	Mata Air, Sumur Dangkal & Sumur Dalam	Karanggayam	Karanggayam dan sekitarnya	73,97	63,79	10,18	PDAM



NO.	KEC.	KELURAHAN/ DESA	UNIT AIR BAKU				UNIT PRODUKSI		
			JENIS SUMBER AIR	NAMA SUMBER	LOKASI UNIT AIR BAKU	KAPASITAS INTAKE (liter/detik)	KAPASITAS UNIT PRODUKSI (liter/detik)	IDLE CAPACITY (liter/detik)	PDAM/UPTD/BA DAN USAHA/KP SPAM
1	2	3	4	5	6	7	8	9 (7-8)	10
6	Kotagede	Jl. Nyi Wiji Adisoro	Sumur Dalam	Kotagede	Kotagede dan sekitarnya	19,53	15,52	4,01	PDAM
7	Gondokusuman	Pengok	Sumur Dalam	Pengok	Pengok dan sekitarnya	26,83	18,85	7,98	PDAM
8	Pakembinangun	Padukan	Sungai, Mata Air, Sumur Dangkal	Padasan	Padasan dan sekitarnya	112,76	75,73	37,03	PDAM
9	Pakem, Sardonoarjo, Sinduharjo	Candi, Bulusan, Gadingan	Mata Air, Sumur Dangkal	Candi	Candi dan sekitarnya	94,34	89,05	5,29	PDAM
						580,34	476,47		

Untuk pengelolaan air limbah di Kota Yogyakarta dengan menggunakan sistem sebagai berikut :

1. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD S) meliputi: Tangki Septik Individual, Jamban Keluarga, Jamban Bersama, MCK Komnal dan Tangki Septik Komunal.
2. Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD T) meliputi: Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) Komunal skala permukiman dan IPAL Regional yang berada di Sewon.

Tabel 2. 9 Rekap Layanan Air Limbah Domestik Kota Yogyakarta

No	Kemantren/Kalurahan	Jumlah SPALD S	Jumlah SPALD T	Jumlah SPALDS dan SPALDT
1	Mantrijeron	8.677	2.424	11.101
	1 Gedongkiwo	3.465	915	4.380
	2 Suryodiningratan	2.962	514	3.476
	3 Mantrijeron	2.250	995	3.245
		-	-	-
2	Kraton	3.593	2.360	5.953
	1 Patehan	961	638	1.599
	2 Panembahan	1.836	673	2.509
	3 Kadipaten	796	1.049	1.845
		-	-	-
3	Mergangsan	7.656	1.854	9.510
	1 Brontokusuman	2.300	536	2.836
	2 Keparakan	1.862	830	2.692
	3 Wirogunan	3.493	488	3.981
		-	-	-
4	Umbulharjo	19.227	3.331	22.558
	1 Giwangan	1.688	648	2.336
	2 Sorosutan	4.078	672	4.750
	3 Pandeyan	3.471	502	3.973



No	Kemantren/Kalurahan	Jumlah SPALD S	Jumlah SPALD T	Jumlah SPALDS dan SPALDT
	4 Warungboto	2.323	786	3.109
	5 Tahunan	2.815	162	2.977
	6 Muja-muju	3.490	53	3.543
	7 Semaki	1.362	508	1.870
		-	-	-
5	Kotagede	10.844	240	11.084
	1 Prenggan	3.544	162	3.706
	2 Purbayan	3.301	-	3.301
	3 Rejowinangun	3.998	78	4.076
		-	-	-
6	Gondokusuman	10.835	1.383	12.218
	1 Baciro	3.260	247	3.507
	2 Demangan	2.063	427	2.490
	3 Klitren	2.384	415	2.799
	4 Kotabaru	799	6	805
	5 Terban	2.329	288	2.617
		-	-	-
7	Danurejan	5.034	1.155	6.189
	1 Suryatmajan	1.255	145	1.400
	2 Tegalpanggung	2.265	403	2.668
	3 Bausasran	1.514	607	2.121
		-	-	-
8	Pakualaman	2.014	1.013	3.027
	1 Purwokinanti	1.346	400	1.746
	2 Gunungketur	668	613	1.281
		-	-	-
9	Gondomanan	2.821	1.412	4.233
	1 Prawirodirjan	1.581	1.008	2.589
	2 Ngupasan	1.240	404	1.644
		-	-	-
10	Ngampilan	2.898	2.184	5.082
	1 Notoprajan	1.484	726	2.210
	2 Ngampilan	1.414	1.458	2.872
		-	-	-
11	Wirobrajan	6.814	1.373	8.187
	1 Patangpuluhan	1.864	1.864	355
	2 Wirobrajan	2.137	2.137	690
	3 Pakuncen	2.812	2.812	328
		-	-	-
12	Gedongtengen	3.872	1.583	5.455
	1 Pringokusuman	2.841	2.841	550
	2 Sosromenduran	1.030	1.030	1.033
		-	-	-
13	Jetis	6.126	1.612	7.738
	1 Bumijo	2.436	2.436	421
	2 Gowongan	2.028	2.028	311
	3 Cokrodiningratan	1.662	1.662	880
		-	-	-
14	Tegalrejo	10.233	1.223	11.456
	1 Tegalrejo	2.312	2.312	517
	2 Bener	1.082	1.082	410
	3 Kricak	3.938	3.938	97
	4 Karangwaru	2.901	2.901	199
	Jumlah	100.644	23.147	123.791

2.1.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tahapan pertama yang dilaksanakan dalam pemenuhan pelayanan dasar SPM pada Urusan Perumahan Rakyat adalah pengumpulan data. Pengumpulan data ini bertujuan untuk mendapatkan baseline data yang nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam pelaksanaan pelayanan dasar SPM Perumahan Rakyat yang terdiri atas:



1. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
2. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Data yang berhasil dihimpun pada tahun 2022 terkait pelayanan dasar yaitu data Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota, data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota, serta data Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha).

Data pertama yaitu Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota yang menjadi dasar bagi layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Yang Layak Huni Bagi Korban Bencana di Kota Yogyakarta secara khusus difokuskan untuk jenis Bencana Banjir. Jenis bencana ini dinilai paling relevan untuk dapat diantisipasi di Kota Yogyakarta. Data Identifikasi Perumahan Di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota ini dikutip dari dokumen KRB Kota Yogyakarta tahun 2022 dengan asumsi bahwa di daerah perkotaan, luas bahaya adalah sama dengan luas perumahan.

Tabel 2. 10 Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Banjir

No	KEMANTREN	LUAS BAHAYA (ha)	JUMLAH JIWA	TINGKAT KERAWANAN BENCANA (rendah/sedang/tinggi)
1	Mantrijeron	37	5201	Tinggi
2	Kraton	2	730	Sedang
3	Mergangsan	122	16451	Sedang
4	Umbulharjo	370	30784	Sedang
5	Kotagede	62	7898	Sedang
6	Gondokusuman	48	4592	Sedang
7	Danurejan	35	8143	Sedang
8	Pakualaman	25	4005	Sedang
9	Gondomanan	48	7957	Sedang
10	Ngampilan	48	10745	Sedang
11	Wirobrajan	71	10688	Sedang
12	Gedongtengen	31	6968	Sedang
13	Jetis	67	9064	Sedang
14	Tegalrejo	125	15787	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kota Yogyakarta tahun 2022

Data kedua yaitu data Rumah Yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota bersumber dari Data Kejadian Bencana tahun 2022 yang dihimpun oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Yogyakarta.



Tabel 2. 11 Rumah Yang Terkena Bencana

NO.	JENIS BENCANA	KECAMATAN	KELURAHAN/ DESA	JUMLAH RUMAH RUSAK	TINGKAT KERUSAKAN RUMAH
1	Angin Kencang	Jetis	Bumijo	1	Rusak Ringan
2	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Ngampilan	Ngampilan	4	Rusak Ringan
3	Banjir	Umbulharjo	Pandeyan	1	Rusak Ringan
4	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Umbulharjo	Mujamuju	6	Rusak Ringan
5	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Umbulharjo	Semaki	3	Rusak Ringan
6	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Umbulharjo	Warungboto	4	Rusak Ringan
7	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Ngampilan	Ngampilan	5	Rusak Ringan
8	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Gondokusuman	Terban	1	Rusak Ringan
9	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Mergangsan	Brontokusuman	2	Rusak Ringan
10	Kebakaran	Danurejan	Suryatmajan	1	Rusak Ringan
11	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Umbulharjo	Semaki	1	Rusak Ringan
12	Kebakaran	Jetis	Cokrodingratan	1	Rusak Ringan
13	Kebakaran	Tegalrejo	Kricak	1	Rusak Ringan
14	Kebakaran	Gedongtengen	Pringgokusuman	1	Rusak Ringan
15	Hujan Lebat disertai Angin Kencang	Jetis	Cokrodingratan	1	Rusak Ringan

Sumber: Data BPBD Kota Yogyakarta tahun 2022

Data terakhir yaitu Identifikasi Perumahan di Kawasan Kumuh Kabupaten/Kota (<10 Ha) dikutip dari SK Walikota Yogyakarta Nomor 158 Tahun 2021 Tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh.

Tabel 2. 12 Identifikasi Perumahan Di Kawasan Kumuh

NO	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/ sedang/berat)
	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA			
1	MERGANGSAN	BRONTOKUSUMAN	8,36	4386	Ringan
		KEPARAKAN			
		WIROGUNAN			
2	NGAMPILAN	NGAMPILAN	1,46	1088	Ringan
3	GONDONANAN	PRAWIRODIRJAN	0,75	556	Ringan
4	JETIS	BUMIJO	4,36	2531	Ringan
		COKRODININGRATAN			
5	DANUREJAN	SURYATMAJAN	2,3	2473	Ringan
		TEGAL PANGGUNG			



NO	LOKASI		LUAS LAHAN (ha)	JUMLAH RUMAH (unit)	TINGKAT KEKUMUHAN (ringan/ sedang/berat)
	KECAMATAN	KELURAHAN /DESA			
6	GEDONGTENGEN	PRINGGOKUSUMAN	4,81	3644	Ringan
		SOSROMENDURAN			

2.1.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

a. Satpol PP

Pengumpulan data trantibum dilaksanakan terhadap beberapa aspek sasaran, diantaranya Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 meter di lokasi Penegakan Perda Dan Perkada, Rekapitulasi SOP Kegiatan Penegakan Perda/Perkada, Rekapitulasi Sarana Dan Prasarana Yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP, Rekapitulasi Sumberdaya Manusia yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP (Satpol PP, PPNS, Satlinmas), Rekapitulasi Perda Perkada yang akan ditegakkan, Rekapitulasi Warga Negara yang terdampak akibat Penegakan Perda Dan Perkada dalam Radius 0-50 Meter, Rekapitulasi aset yang dimiliki oleh Warga Negara Yang Rusak Akibat Penegakan Perda dan Perkada Dalam Radius 0-50 meter.

Pengumpulan data terkait informasi Warga Negara menggunakan metode sampling yang ditentukan dari rencana target pelaksanaan penegakan perda dan perkada Kota Yogyakarta yang diperoleh dari hasil patroli pelanggaran perda dan perkada.

Tabel 2. 13 Perkiraan Rekapitulasi Jumlah Warga Negara Yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter di Lokasi Penegakan Perda dan Perkada

NO	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
1	Gustaf Pardede	30202201000XXXXX		SIDIKALANG	26-Nov-67	Bausasran DH 3/618 RT 31 RW 9, Yogyakarta
2	Gun Uli Diatmoko	30202201000XXXXX		YOGYAKARTA	19-Sep-75	Mendungan, UH 7/568 rt 003 rw 011 Giwangan UH, yogyakarta
3	Sugianto Raharjo	30202201000XXXXX		YOGYAKARTA	27-Dec-78	Jl. Magelang no 98 RT 53 RW 14 Karangbaru Tegal rejo Kota Yogyakarta
4	Agung Hertanto, S.Kom	30202201000XXXXX		WONOGIRI	15-May-76	gang satria UH II/1112 RT30 RW 10 Muja Muju, Umbulharjo
5	Alan Wahyu Handoko	3306082702XXXXXX		PURWOREJO	27-Feb-83	Gendeng GK IV rt 78/rw 18 Yogyakarta
6	Tukiran	3020220100XXXXXX		GUNUNG KIDUL	01-May-79	jl. Nayam kidul no 31 RT 05 RW 06 Dalem Keraton, Yogyakarta
7	Prasetyo Isharjanto	34710318028XXXXX		YOGYAKARTA	18-Feb-88	Terban, GK V / 687 RT 26 RW 06



NO	NAMA	NIK	NO.KK	TEMPAT LAHIR	TGL.LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4	5	6	7
						Gondokusuman Yk
8	Suprpto	30202201000XXXXX		MAGETAN	16-Apr-78	Gondolayu Lor JT II/997 RT 45 RW 10 Cokrodiningratan, Jetis, Yogyakarta
9	Maria Novita	30202201000XXXXX		YOGYAKARTA	18-Nov-71	Jlagran 32 RT 04 RW 10 Pringkokusuman Gedong Tengen
10	Dion Prasetyo	30202201000XXXXX		YOGYAKARTA	17-Feb-00	Sutpdirjan GT Yogyakarta
11	Hendro W	30202201000XXXXX		SEMARANG	03-Aug-53	Jogonegaran GT 1/1023 RT 52 RW 14 Sosromenduran Gedongtengen
12	Alland Priawan	33730106058XXXXX		SEMARANG	06-May-79	Glagahsari no. 56 Yogyakarta
13	Sulistyo Handoko	34710409066XXXXX		YOGYAKARTA	09-Jun-64	SURYATMAJAN DN. 1/14 rt 029/rw 010 Yogyakarta
14	Rijanto, SH,MPA	34710215076XXXXX		MADIUN	15-Jul-64	JL. PROF. DR. SARJITO NO.15 B
15	Ambar Garjito, S.TP	34710721057XXXXX		YOGYAKARTA	21-May-76	JL. ARJUNA NO.41 A Wirobrajan rt 45 rw 10 Yogyakarta
16	Taufiq Umar	34711418618XXXXX		YOGYAKARTA	18-Jan-86	Tegalgondo KG 11/052/011 Prenggan,Kotagede Yogyakarta
17	Jimmy Wijaya	33741306066XXXXX		SEMARANG	06-Jun-67	GEDONGKIWO MJ I / 1082, 059 / 012 Mantrijeron Yogyakarta
18	Ir. Hermasudin Latif	3471020309XXXXXX		MALANG	03-Sep-69	JL.BUMIJO LOR NO.14 Yogyakarta
19	Mega Dwi Paramia	34710359118XXXXX		JAKARTA	19-Nov-84	KEPUH GK III/936 rt 49/rw 13 YOGYAKARTA

Tabel 2. 14 Perkiraan Rekapitulasi Daftar Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial Serta Aset Warga Negara yang Berada Dalam Radius 0-50 Meter Dari Lokasi Penegakan Perda dan Perkada

NO.	JENIS FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	JUMLAH FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA	KONDISI FASUM DAN FASOS SERTA ASET YANG DIMILIKI OLEH WARGA NEGARA
1	2	3	4
1	Rumah Ibadah	533	Baik
2	Sekolah	837	Baik *) sumber : DAPODIK Kemendikbud dan Ristek
3	Jembatan	36	Kondisi Baik dan mampu menahan beban dengan jumlah besar *) sumber : DATAKU Bappeda Provinsi
4	Rumah warga negara	122.274	Layak Huni *) sumber : DATAKU Bappeda Provinsi



Satpol PP Kota Yogyakarta memiliki 33 (tiga puluh tiga) Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terbagi menjadi SOP Administrasi sebagai penunjang kegiatan Kesekretariatan dan SOP Teknis sebagai pedoman pelaksanaan operasional kegiatan dalam mendukung ketercapaian ketenteraman, ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat.

Tabel 2. 15 Rekapitulasi Sop Kegiatan Penegakan Perda/Perkada

NO.	STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR	JENIS STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR TEKNIS	KENDALA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Penegakan Peraturan Daerah/Perkada	SOP Operasi Yustisi		
2	Ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat (Pembinaan dan Penyuluhan)	SOP Pra Sosialisasi (Tahapan Gerakan Kampung Panca Tertib), SOP Pembentukan Forum Kampung Panca Tertib (FKPT GKPT), SOP Sosialisasi Gerakan Kampung Panca Tertib	-	
3	Penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa	SOP Pengamanan Umum	-	
4	Pengawasan pejabat/orang-orang penting	Proses penyusunan		
5	Pengamanan tempat-tempat penting	SOP Pengamanan Tempat Penting Milik Pemkot Yogyakarta	-	
6	Operasional patroli	SOP Operasi Non Yustisi, SOP Penindakan Hukum Terpadu	-	
7	Deteksi Dini dan Cegah Dini	SOP Pengamanan Umum Tertutup Intelijen, SOP Pengamanan Khusus Tertutup Intelijen	-	
8	SOP Lainnya	SOP Pengkajian Peraturan Perundang-undangan, SOP Pemecahan Permasalahan Hukum, SOP Pelayanan Pengamanan Satuan Perlindungan Masyarakat, SOP Pelayanan Unit Rescue Satuan Perlindungan Masyarakat	-	

Tabel 2. 16 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana yang Dimiliki Oleh OPD Satpol PP

NO.	JENIS SARANA DAN PRASARANA	JUMLAH SARANA DAN PRASARANA	KONDISI SARANA DAN PRASARANA	
			Layak	Tidak Layak
1	2	3	4	5
1	MINIBUS	16	16	
2	TRUK	3	3	
3	PICK UP	0	0	
4	SEPEDA MOTOR	45	45	

Di dalam pelaksanaan ketugasan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan mutu SPM pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP Kota Yogyakarta tidak mengalami kendala dalam penegakan perda dan perkada bahkan yang mengakibatkan kerugian masyarakat karena dalam pelaksanaan ketugasan selalu



berpedoman pada SOP kegiatan dan lebih mengutamakan upaya persuasif. Penegakan perda dan perkada lebih memprioritaskan strategi secara preemtif dan preventif dalam pelaksanaannya.

Tabel 2. 17 Rekapitulasi Sumberdaya Manusia yang dimiliki Oleh OPD Satpol PP (SATPOL PP, PPNS, SATLINMAS)

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERSONIL SATPOL PP			JUMLAH PERSONIL PPNS DAN SATLINMAS	
		PNS		NON PNS	PPNS	SATLINMAS
		BELUM DIKLAT	SUDAH DIKLAT			
1	2	3	4	5	6	7
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	36	32	95	10	3350

Tabel 2. 18 Rekapitulasi Perda Perkada Yang Akan Ditegakkan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	JUMLAH PERDA DAN PERKADA	JUMLAH PERDA DAN PERKADA YANG AKAN DITEGAKKAN		KETERANGAN
			PERDA	PERKADA	
1	2	3	4	5	6
	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	38	29	9	

Berdasarkan informasi terkait identifikasi warga negara yang terdampak akibat penegakan perda dan perkada dalam radius 0-50 meter ditargetkan pencapaian 100% atau tidak ada WN yang terkena dampak kerugian akibat penegakan perda dan perkada. Pada tahapan penyusunan rencana kerja dan anggaran, Satpol PP menganggarkan sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dalam rangka mengakomodir ganti kerugian kepada WN yang terkena dampak penegakan perda dan perkada.

Tabel 2. 19 Rekapitulasi Warga Negara Yang Terdampak Akibat Penegakan Perda Dan Perkada Dalam Radius 0-50 Meter

NO.	JENIS PENERIMA LAYANAN	JUMLAH WARGA NEGARA (sampling)	JUMLAH WARGA NEGARA YANG TERDAMPAK PENEGAKAN PERDA DAN PERKADA		JUMLAH ANGGARAN YANG UNTUK PELAYANAN PENGOBATAN DAN GANTI RUGI MATERIAL
			CIDERA RINGAN	CIDERA SEDANG DAN/ ATAU BERAT	
1	2	3	4	5	6
1.	Pelayanan Pengobatan	19	0	0	75.000.000
2.	Kerusakan Aset	N/A	N/A	N/A	75.000.000



b. Kebencanaan

Pengumpulan data sasaran dilakukan tiap tahunnya. Sumber data yang digunakan untuk tiap indikator SPM berbeda-beda, sesuai dengan kondisi di lapangan, data yang digunakan adalah data riil akhir tahun yang telah ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 2. 20 Target Sasaran SPM Sub Urusan Bencana Pada Tahun 2022

No	Uraian	Jumlah Penduduk/Warga Negara	Kelas Risiko Berdasarkan Jenis Bahaya							
			Banjir	Pandemi	Cuaca Ekstrem	Gempa bumi	Kegagalan Teknologi	Kekerangan	Letusan Gunung Api	Multibahaya
1	KTB Kumendaman	2056	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
2	KTB Panembahan	1740	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
3	KTB Bangirejo	1718	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
4	KTB Cokrodiningratan	2407	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
5	KTB Suronatan	2598	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
6	KTB Suryodiningratan	2755	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
7	KTB Singosaren	546	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
8	KTB Kauman	555	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
9	KTB Margoyasan	664	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
10	KTB Langenastran	952	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
11	KTB Karangajen	3454	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
12	KTB Dipowinatan	2068	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
13	KTB Bumijo	2651	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
14	KTB Suryoputran	2210	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
15	KTB Mangunnegaran	2452	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
16	SPAB SDN Sayidan	36	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
17	SPAB SDN Gambiran	39	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi
18	SPAB SDN Suryodiningratan 1	147	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
19	SPAB SDN Muh. Sapen	876	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Tinggi
20	SPAB SMP N 2	679	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang
21	SPAB SMP N 4	476	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
22	SPAB SMP N 16	677	Tinggi	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Sedang
23	SPAB SMP Muh. 2	766	Sedang	Sedang	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Rendah	Tinggi



c. Kebakaran

Pengumpulan data Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta terdiri dari:

Tabel 2. 21 Data Dukung Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO.	PROVINSI KABUPATEN/ KOTA	APBD	ALOKASI APBD UNTUK SUB URUSAN KEBAKARAN	JUMLAH SARANA PRASARANA PEMADAM KEBAKARAN		JUMLAH PETUGAS			JUMLAH KEJADIAN KEBAKARAN			
				Mobil Pemadam Kebakaran	TAN DON AIR/ GRO UND TAN K	PNS	NON PNS	RELAWAN KEBAKARAN	2017	2018	2019	2020
1	KOTA YOGYAKARTA	16.263.827.767	8.910.295.310	13	16	49	54	756	71	64	69	53

Tabel 2. 22 Daftar Relawan Pemadam Kebakaran

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	KETERAMPILAN	ALAMAT
1	Mujiraharja	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Jl. Jogokaryan Mantrijeron
2	Asrul Fahmi	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Jln.sultan agung 23
3	Dewi Sartika	Perempuan	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Gunung ketur PA II
4	R. Suparmono	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Jl.Gajah Mada 26 A
5	Warih Bayu S	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Kel. Purwokinanti
6	Petra Andi S	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Jl.purwanggan 25
7	Widodo Yuwono	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Jl Purwanggan 18
8	Budi Santoso	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Jagalan Beji PA I/428
9	Joko Amprono	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Jl. JAGALAN NO. 19
10	Agoya Berta M	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Kel. Purwokinanti
Dan seterusnya sampai dengan Nomor				
322	Ahmad Jauhari S	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Sapen GK 1/394
323	Udayana	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Sapen GK I/567
324	Sulistyo Adi P	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Sapen GK I / 360
325	Ade Yudianto	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Demangan gk 1/104
752	Ndarto	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Kel. Bener
753	Dwi Sambudi	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Kel. Bener
754	Hartono	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Kel. Bener
755	Rudy W	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Kel. Bener
756	Agus Santoso	Laki-laki	Gelar gulung selang dan cara penggunaan APAR	Kel. Bener



Tabel 2. 23 Daftar Warga Negara Yang Menjadi Korban Kebakaran

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN		USIA					KONDISI FISIK
		L	P	0 - 5 tahun	6 - 18 tahun	19 - 30 tahun	31 - 60 tahun	>60 tahun	Sehat
1	Tugiyanto	V					v		V
2	Painem		V				v		V
3	Yudi Kurniawan	V				V			V
4	SD Lempuyang Wangi		V					V	V
5	Heri Sunarto	V					v		V
6	Yoyok	V					v		V
7	Gunawan	V					v		V
8	Hotel Ibis								V
9	Indomaret								V
10	Superindo								V
Dan seterusnya sampai dengan Nomor									
26	Rais Rahadita	V					v		V
27	Yulkifli	V				V			V
28	Lilik Purnomo	V					v		V
29	Umia Dewi		V				v		V
30	Sukanto	V					v		V
49	Harso Paminto	V					v		V
50	Sekretariat DPRD Kota Yogyakarta								V
51	Eko Wahyuni		V				v		V
52	Ema Nurjayati		V				v		V
53	Ayu Diah Arini		V			V			V

2.1.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Tahap pengumpulan data pada SPM bidang sosial dilakukan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi dengan mengumpulkan data:

- Jumlah dan identitas warga negara yang berhak memperoleh barang dan/ atau jasa kebutuhan secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.
- Jumlah dan kualitas barang dan / atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana.

Tabel 2. 24 Data Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar dan Gelandangan Pengemis

NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL		ALAMAT
1	2	3	4	5		6
2.1.7 PENYANDANG DISABILITAS						
1	Moh. Rekly	3471011707990001	L	Yogyakarta	17-07-1999	BENER TR.IV/3,RT:010,RW:003
2	Saryono	3471072012750001	L	Yogyakarta	20-12-1975	Kuncen WB I/446 RT 033 RW 07 Pakuncen Wirobrajan
3	Tri Sunaryanto	3471071405710001	L	Yogyakarta	14-05-1971	Jl. Tegalmulyo No.24 RT 011 RW 002 Pakuncen Wirobrajan



NO	NAMA	NIK	JENIS KELA MIN	TTL		ALAMAT
1	2	3	4	5		6
4	Harni Darmawati	3471075710570001	P	Yogyakarta	17-10-1957	Jl. Letjen S Parman 95 RT.038 RW.007 Patangpuluhan, Wirobrajan
5	Agus Triyanto	3471120608830001	L	YOGYAKA RTA	6-8-1983	Brontokusuman MG III/394 RT.10 RW.04 Mergangsan
6	Slamet Rutrisno	3471060107690001	L	Yogyakarta	01/07/1969	Purwodiningratan NG I/759 RT.042 RW.08 Ngampilan
7	Irahman Cahyono	3471131807760001	L	Yogyakarta	16 Juli 1976	Balirejo UH 2/542 RT.016 RW.005 Mujamuju, Umbulharjo
8	Erwan Suharsono	3471071509740002	L	Yogyakarta	15/09/1974	Jl. Letjen S Parman 95 RT.038 RW.007 Patangpuluhan, Wirobrajan
9	Agus Sofyanto	3471140308830001	L	Yogyakarta	3 Agustus 1983	Gedongkuning KG I/74 RT 016 RW 005, Rejowinangun,Kotagede
10	Aris Cahyo Nugroho	3471022811790002	L	Gunungkidul	28 November 1979	Gondolayu Lor JT II/1143 RT 054 RW 010 Cokrodiningratan,Jetis
11	Hindartana, SE,Mi,Kom	3171081412640005	L	Yogyakarta	14 Desember 1964	Jl.Jogoyudan JT III/1019 RT 051 RW 013 Gowongan,Jetis
12	Agus Triyanto	3471120608830001	L	Yogyakarta	06/08/1983	Brontokusuman MG III/394 RT.10 RW.04 Mergangsan
13	Irahman Cahyono	3471131807760001	L	Yogyakarta	18-07076	Balirejo UH 2/542 RT.016 RW.005 Mujamuju, Umbulharjo
Dan seterusnya sampai dengan nomor						
175	Sri Lestari	3471136311780001	P	Yogyakarta	23 November 1978	Sidikan UH 5/ 530 RT 025 RW 006, Pandeyan
176	Cahyani	3471136807730002	P	Yogyakarta	28 Juli 1973	Tungkak Sorosutan UH 5/ 850 A
177	Latifah Eka Septianti	3471134409920002	P	Yogyakarta	4 September 1992	Jl. Gambir Anom No 11 C RT 036, RW 013
178	Eunike Supartini	3471075307660001	P	Yogyakarta	13 Juli 1966	Wirobrajan WB II/ 222 RT 06 RW 02, Kelurahan Wirobrajan, Wirobrajan
179	Nita Ika Puspitasari	3471075712960001	P	Yogyakarta	17-12-1996	Patangpuluhan WB 3/ 381 RT 018 RW 003 , Patangpuluhan
180	Mujiraharjo	3404010302900001	L	Bantul	03-02-1990	Singosaren Lor WB I/ 860, RT 055 RW 012, Pakuncen
181	Luki Widayanti	3322104502830001	P	Semarang	05-02-1983	Jl. Tegalmulyo II No.9 A, RT 009 RW 002, Pakuncen
182	Moh. Rekly	3471011707990001	L	Yogyakarta	17-07-1999	BENER TR.IV/3,RT:010,RW:003
183	Saryono	3471072012750001	L	Yogyakarta	20-12-1975	Kuncen WB I/446 RT 033 RW 07 Pakuncen Wirobrajan
184	Tri Sunaryanto	3471071405710001	L	Yogyakarta	14-05-1971	Jl. Tegalmulyo No.24 RT 011 RW 002 Pakuncen Wirobrajan
185	Harni Darmawati	3471075710570001	P	Yogyakarta	17-10-1957	Jl. Letjen S Parman 95 RT.038 RW.007 Patangpuluhan, Wirobrajan
186	Agus Triyanto	3471120608830001	L	Yogyakarta	6-8-1983	Brontokusuman MG III/394 RT.10 RW.04 Mergangsan
187	Slamet Rutrisno	3471060107690001	L	Yogyakarta	01-07-1969	Purwodiningratan NG I/759 RT.042 RW.08 Ngampilan
188	Mursidah	1350044612480001	P	Sleman	6 Desember 1948	Notoprajan NG II/724 RT 041 RW 007, Notoprajan, Ngampilan
189	Sawabiono	3471072910540001	L	Yogyakarta	29 Oktober 1954	Ketanggungan WB 2/ 703 RT 041 RW 009, Wirobrajan
190	Sudaryono	3471031407710001	L	Yogyakarta	14 Juli 1971	Jl Mutiara No 139 RT 38 RW 11, Demangan



NO	NAMA	NIK	JENIS KELA MIN	TTL		ALAMAT
1	2	3	4	5		6
191	Samiyem	3471057112630002	P	Sukoharjo	31 Desember 1963	Jlagran GT II/ 198 RT 004 RW 001, Pringgokusuman, Gedongtengen
192	C Wahyudi Raharjo	3402162706750001	L	Yogyakarta	27 Juni 1975	Perum Winong KG II/ 406 RT 13 RW 03 Prenggan Kotagede
193	Trisno Maynarto	3471031005760001	L	Yogyakarta	10 Mei 1976	Sapen GK I/ 462 RT 026 RW 008, Demangan
194	Heribertus Isnawan	3471136902530001	L	Yogyakarta	19 Februari 1950	Semaki Kulon UH I/ 399 RT 034 RW 010 UH
2.1.8 ANAK TERLANTAR						
1	Rava Okta Syahputra	3306071010120001	L	Purworejo, 10-10-2012		BADRAN JT I/ 973,RT:056,RW:012
2	Imelia Hanifah	3471146612110001	P	Yogyakarta, 26-12-2011		GEDONGKUNING NO.32,RT:005,RW:002
3	Revan Tri Saputra	3471111708100001	L	Yogyakarta, 17-8-2011		PURWOKINANTI PA I/103,RT:028,RW:006
4	Fitri Aulia	3175077108111002	P	Jakarta, 31-08-2011		JATIMULYO TR I /690,RT:024,RW:005
5	Marya Indah Puspa Sari	3471136603040001	P	Yogyakarta, 26-03-2004		TUNGKAK KEBONAN UH 6/800,RT:011,RW:003
6	Herlinawa ti	3471014301060001	P	Wonosari, 03-01-2006		SUDAGARAN TR.III/985,RT:040,RW:011
7	Anisa Chinkaren a	3306074908060002	P	Sleman, 09-08-2006		BADRAN JT I/ 973,RT:056,RW:012
8	Ghaisa Denium Hapsari	6402036606060004	P	Berau, 16 Juni 2006		Danurejan
9	R.Azril Satriya W.	3471090609030002	L	Bantul,6-9-2003		TAMAN KT.I/339 YK,RT:031,RW:008
10	Dena Pariyanti	3471054912030001	P	Surakarta, 09-12-2003		SUTODIRJAN GT.II/915,RT:070,RW:021
11	Adek Imam Saputra	3310071606060003	L	Klaten,16-6-2006		BUMIJO LOR JT. I/1200,RT:026,RW:006
12	Margareth a Yosefin F	3471076707040001	P	Yogyakarta, 27-7-2004		JL.PATANGPULUHAN NO.27,RT:004,RW:001
13	Isti Kharisma Muslimah	3471015606030001	P	Yogyakarta, 16-06-2006		BANGUNREJO TR.I/1558,RT:054,RW:012
14	Tasya Angelita Putri	3171086608041001	P	Yogyakarta, 27-08-2004		JOGOYUDAN JT.3/824,RT:043,RW:011
15	Ananda Dewata Bujana	3471020304030001	L	Yogyakarta, 03-04-2003		JENGGOTAN JT. I/357,RT:018,RW:005
16	Amalia Putri	3471017105040001	P	Wonosari, 31-05-2004		SUDAGARAN TR.III/985,RT:040,RW:011
17	Andhika Poetra Jansy	3471030507100003	L	Batam,25-07-2010		BACIRO JL. MAWAR GK IV/25,RT:039,RW:011
18	Kailla Aura Shafa	3471136910070001	P	Yogyakarta,29-10-2007		JL.SOROSUTAN NO.41,RT:016,RW:005
19	Cristya Arsy	3471046705090001	P	Yogyakarta,27-05-2009		TEGALPANGGUNG DN 2/958,RT:050,RW:012
20	Octa Putri Prasetya	3403155310100001	P	Gunungkidul,13/10/2010		PINGIT JT. I/405,RT:002,RW:001
21	Mohamad Rizky Aditya S	3578011503040001	L	15 Maret 2004		Kricak
22	Zahra Azalia	141104601070044	P	Gunungkidul, 06-01-2007		Penumpang JT III/211, Gowongan, Jetis



NO	NAMA	NIK	JENIS KELA MIN	TTL		ALAMAT
1	2	3	4	5		6
23	Ziyad Fakhri	141100206090004	L	Gunungkidul, 02-06-2009		Penumpang JT III/211, Gowongan, Jetis
24	Rakih Cantika Ummul Aisyah	3471026206090001	P	22/06/2009		PINGIT JT. I / 249,RT:012,RW:013
Dan seterusnya sampai dengan nomor						
743	Raynald Pradana Putra	3471082205110002	L	Yogyakarta	22 Mei 2011	Suryowijayn MJ I/340 RT 18/05 Mantrijeron
744	Eka Ariesta Winanta	347114140409002	L	Yogyakarta	14 April 2009	Jl Kebun raya No 27 RT 18/06 Rejowinangun
745	Nayla Putri Rahmadayanti	3471024105150001	P	Yogyakarta	1 Mei 2015	Badran JT I/485 RT 48/11 Bumijo Jetis
739	Alfian Noor Ridwan	3471141802040001	L	Yogyakarta	18 Februari 2004	Jl Nyi Wijiadisoro no 8 RT 2/01 Prenggan, Kotagede
740	Muhammadd Migi Auditya Ramadhan	3471103110040002	L	Yogyakarta	31 Oktober 2004	Kauman GM I/338 RT 46/12 Ngupasan Gondomanan
748	Septi Eka Wulandari	3403086909040002	P	Yogyakarta	29 September 2004	Jogoyudan JT III /486 RT 29/07 Gowongan Jetis
749	Rahmad Agus Riyanto	3471130508040001	L	Yogyakarta	05 Agustus 2004	Nitikan UH 6/281 RT 57/13 Sorosutan Umbulharjo
750	Rafael Sebastian Yusuf	3471031111070001	L	Yogyakarta	11 November 2007	Baciro Sanggrahan GK IV/132 RT 48/13 Gondokusuman
751	Aluna Salsabilah Jotana	3471056607130001	P	Yogyakarta	26 Juli 2013	Jlagran GT II/263 A RT 09 RW 2 Pringgokusuman
752	Gilang Arga Pamungkas	3471072906080002	L	Yogyakarta	29 Juni 2008	Kleben WB I/644 RT 29/06 pakuncen Wirobrajan
753	Raden Roro Qiella Zahara	3471032208100001	P	Yogyakarta	22 Agustus 2010	Demangan GK I/97 RT 12 RW 4 Gondokusuman
754	Michael Yulistio	3471012506030001	L	Yogyakarta	25 Juni 2003	Saudagaran TR III/974 RT 44/12 Tegalrejo
755	Restu Putra Gemilang	3471010207050001	L	Yogyakarta	2 Juli 2005	Kricak Kidul RT 39/09 TR I/1012
756	Farras Yogya Dwiananta	3471032805080001	L	Yogyakarta	28 Juli 2008	Sagan GK V/1118 RT 46/10 Terban Gondokusuman
9 LANJUT USIA						



NO	NAMA	NIK	JENIS KELA MIN	TTL	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
1	TITIK MARYA TI	3471130101530005	P	SLEMAN, 01 JANUARI 1953	LEDOK MASANAN ON 1/251
2	ENDRO PRATOM O	3471130101420003	L	YOGYAKARTA, 01-01- 1942	JL. LETJEN S. PARMAN NO. 87 P.
3	NINIK SULISTI OWATI	3471134101540004	P	NGAWI, 01-01-1954	JALAN DAGEN 82 A. RT. 025/006
4	FX SUTANT O/SUMA RI	3471130101500003.	L	MAGELANG, 01 JANUARI 1950	GUNUNG KETUR PA II/347
5	JAMILA H	3471134101340001	P	BANTUL, 01-01-1934	KALANGAN UH V/744 RT 17/RW 04
6	SAGIYE M (1940)	3471087112400018	P	BANTUL, 31 DESEMBER 1940	BEHER TR IV/78 YK
7	MARIA GORETT E SUGIAR TI	3471034708510001	P	SOLO, 7 AGUSTUS 1951	DUKUH MJ I/1372 (ORSOS UMMU)
8	SUMIYA TI	3471057112430013	P	SLEMAN, 31 DESEMBER 1943	JL. S. PARMAN 87 P. RT 41 RW 08, PATANGPULUHAN, WIROBRAJAN, YK.
9	AMBYA H KADARI SMAN	3471022011460001	L	YOGYAKARTA, 20-11- 1946	JL. SEMANGU NO. 70 REJOWINANGUN
10	PRANOT O	3471023112400001	L	YOGYAKARTA, 31 DESEMBER 1940	SURONATAN, NGASEM KP II/108 YK, RT 49/14 KADIPATEN KRATON
11	SUPARTI NI	3471137112480055	P	SLEMAN, 31-12-1948	MANGUYUDAN MJ 3/327
12	TUKIRA H	3471 075512480001	P	YOGYAKARTA, 15 DESEMBER 1948	BANGUNTAPAN, KARANGSARI WETAN, RT 14/6
13	VERONI CA SRI ASTUTI	3471136302500001.	P	SURABAYA, 23 FEBRUARI 1950	NGADISURYAN KT I/94
14	WALIMA H	3471084502530001.	P	YOGYAKARTA, 05 FEBRUARI 1953	PRAWIRODIRJAN GM II/927
15	SUKADI RAHARJ O	3471052504550002	L	YOGYAKARTA, 25 APRIL 1955	GEDUNGKINO MJ 1/885 RT48/10
16	PONIRA H	3471146211480001	P	YOGYAKARTA, 22 NOVEMBER 1948	KETANGGUNGAN WB II/543
17	JUWANT O	9111050808550002	L	NGANJUK, 08-08-1955	JLAGRAN GT II/118 RT 01/01
18	HALIMA H	3471135312420003.	P	YOGYAKARTA, 13 DESEMBER 1942	JLAGEN GF 2/ 113
19	MOHAM AD KHAIRU N	3471061506600001.	L	YOGYAKARTA, 15 JUNI 1960	KEPUN GK 3/1114 K
20	NGATUN MARTO SARJON O	1409081010480001	L	YOGYAKARTA, 10-10- 1948	MAGANGAN WETAN RT 33/09 SURYOPUTRAN
21	NINIK SUKARN I	3471055611400001	P	YOGYAKARTA, 16 NOVEMBER 1940	JOGOYUDAN JT 3/552 YK



NO	NAMA	NIK	JENIS KELA MIN	TTL		ALAMAT
1	2	3	4	5		6
22	PETRUS SANTOS O	3471130206420001	L	YOGYAKARTA, 02-06- 1942		PUJOKUSUMAN MG 1/372
Dan seterusnya sampai dengan nomor						
550 0	J I O N O	3471081805590001	L	YOGYAKA RTA	18-May- 59	SURYODININGRATAN MJ 2/728-B
550 1	AGIRAH	3471087112430011	P	YOGYAKA RTA	31-Dec- 43	MINGGIRAN MJ 2/1018
550 2	RUSMAN	3471080809550002	L	YOGYAKA RTA	08-Sep- 55	MINGGIRAN MJ 2/1192
550 3	HERYAT I SUPRIST I	3471085711490001	P	YOGYAKA RTA	17-Nov- 49	SURYODININGRATAN MJ 2/827
550 4	SUPRIHA TIN	3471084111530002	P	YOGYAKA RTA	01-Nov- 53	MINGGIRAN MJ 2/1417
550 5	ANNA SUWART I	3471085508340001	P	YOGYAKA RTA	15-Aug- 34	MNGGIRAN MJ.2/1515
550 6	MASIYE M	3471087112400004	P	YOGYAKA RTA	31-Dec- 40	MINGGIRAN MJ 2/1449
550 7	SUDARY ANTO	3471081401580001	L	KULON PROGO	14-Jan- 58	MINGGIRAN MJ 2/1468
550 8	CAHYO BAROTO	3471082106600001	L	YOGYAKA RTA	21-Jun- 60	KUMENDAMAN MJ.2/389
550 9	THERESI A SUYATI	3471086604530001	P	YOGYAKA RTA	26-Apr- 53	SURYODININGRATAN MJ 2/801 A
551 0	RUGIMA H	3471087112430018	P	YOGYAKA RTA	31-Dec- 43	MINGGIRAN MJ 2/1102
551 1	SUBARD ONO	3471082411610002	L	YOGYAKA RTA	24-Nov- 61	MINGGIRAN BARU MJ 2/958
551 2	DWI NASTITI	3471085409610001	P	BANDUNG	14-Sep- 61	KUMENDAMAN MJ.2/464
551 3	YULIAN A YUNI HARYAN TI	3471084406580001	P	YOGYAKA RTA	04-Jun- 58	KUMENDAMAN MJ 2/359
551 4	ENDRO SUHART ONO	3471081510600001	L	BANDUNG	15-Oct- 60	SURYODININGRATAN MJ.2/663
551 5	WINARN I SRI HARTAT I	3471087003550002	P	YOGYAKA RTA	30-Mar- 55	MINGGIRAN MJ 2/1511
551 6	S U M I Y A H	3471085811490001	P	YOGYAKA RTA	18-Nov- 49	KUMENDAMAN MJ 2/468
551 7	K E M I N E M	3471085502510001	P	KULON PROGO	15-Feb- 51	SURYODININGRATAN MJ 2/814 C
551 8	SETIADI GIDRAH KARNAE N	3471081511580001	L	YOGYAKA RTA	15-Nov- 58	PUGERAN MJ 2/156
2.1.10 GELANDANGAN PENGEMIS						
1	Dwi Miranti		P			Perum Padi Mas Jaban RT.003 RW.025 Sinduharjo Sleman



NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
2	Suyatin		L		Bugisan RT.001 RW.005 Prambanan Klaten
3	Yanto		L		Dirujuk ke Camp Asesment DIY
4	Herwan		L		Dirujuk ke Camp Asesment DIY
5	Mr.X (Felix)		L		Dirujuk ke Camp Asesment DIY
6	Mr.X		L		Dirujuk ke Camp Asesment DIY
7	Rahmat Fahmi		L		Dirujuk ke Camp Asesment DIY
8	Mr.X		L		Dirujuk ke Camp Asesment DIY
9	Alma Maulida		P		Bangirejo K W 1/ 101a
10	Aurel Putri Vianka		P		Bangirejo K W 1/ 101
11	Alltriana Aulia Putri		P		Ngampilan NG I RT 01 RW 01 No.6
12	Xena Urfa Salsabila		P		Bangirejo TR 2/ 523
13	Miftah Nigayo		P		Cokrokusuman JT 2/ 751 RT 42 RW 19
14	Suryaning tyas Prabaning rum		P		Bangirejo K W 1/ 101a
15	Bellvania Rafanda Putri		P		Bangirejo K W 1/ 105
16	Ima Yulianti		P		Bangirejo TR 2/ 296
17	Ardhy Yoga Pamungka s		L		Bangirejo TR 2/ 538
18	Raditya Panji Khatulisti wa		L		Bangirejo TR 2/ 523
19	Muhamma d Rizky		L		Bangirejo TR 2/ 522 RT 46 RW 12
20	Haryanto		L		Bangirejo K W 1/ 101a
21	Erle Elfreda Muflih		L		Bangirejo TR II/ 545 RT 044 RW 012 YK
22	Fendy Wisnu Pratama		L		Bangirejo TR 2/ 523
23	Harris Nurulhuda Robbi Amru		L		Jl. Arjuna No 46 WB
24	Azyumar Rahmadi		L		Bangirejo K W 1/50



NO	NAMA	NIK	JENIS KELAMIN	TTL	ALAMAT
1	2	3	4	5	6
25	Rizik Abdul Mukti		L		Kuncen Wirobrajan I No.430 RT 33 RW 07
26	Raditya Anugrah Putra		L		Bangirejo K W 1/ 101
27	Muhammadd Nazaruddin		L		Pringgokusuman GT II/ 510 RT 024 RW 006 YK
28	Rafi Yusup Fadillah		L		Bangunrejo TR I/ 1755 RT 046 RW 010 YK
29	Rio Anggoro		L	26 September 1998	Jogoyudan JT III/ 794 RT 042 RW 010 Gowongan Jetis
30	Ngadiyo	-	L	-	Dirujuk ke Camp Asesment DIY
31	Neneng	-	P	-	Dirujuk ke Camp Asesment DIY
32	Roifatun	-	P	-	Mertosanan Kulon RT 002, Potorono, Bantul
33	Panji Yusuf Hutama				Dampungan Panti Al Amin
34	Naufal Dzaki Asyrof				Dampungan Panti Al Amin
35	Lyonel Cammilla no N.W				Dampungan Panti Al Amin
36	Muhammadd Nazrey Zulfadhli				Dampungan Panti Al Amin
37	Syahrul An-Nafi				Dampungan Panti Al Amin
38	Faqih Putra Panuntun				Dampungan Panti Al Amin
39	Muhammadd Rifqi Dananjaya				Dampungan Panti Al Amin
40	Ramadhan Arka Sasongko				Dampungan Panti Al Amin
41	Batra Kama Wisesa				Dampungan Panti Al Amin
42	Santi Naura Winda				Dampungan Panti Al Amin
43	Muhammadd Arafa Pramono				Dampungan Panti Al Amin
44	Ikhtiar Akbar Maulana				Dampungan Panti Al Amin
45	Satriya Setya Ramadhan				Dampungan Panti Al Amin



2.2 PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

2.2.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 2. 25 Mutu Minimal Layanan Pendidikan

NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1. Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan	91	352	261
				. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4. Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	1	1	1
				Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5. Penempatan kepala sekolah	Kegiatan	11	11	0
				Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6. Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan	22	11	11
				Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	7. Tersedianya data	Pengawas atau penilik	22,18	11,4	10,78
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1. Tersedianya data	Pendidik dan tenaga kependidikan	1754	1654	100
				Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4. Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan	1	1	1
				Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5. Penempatan kepala sekolah	Kegiatan	89+16	89+16	0



NO	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	KEBUTUHAN	KETERSEDIAAN	SELISIH (+/-)
				Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6. Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan	8+7	8+7	0

2.2.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Dalam melakukan pelayanan Kesehatan bagi penduduk sesuai indikator SPM, diperlukan dukungan logistik Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2. 26 kebutuhan logistik pemenuhan SPM Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Alat deteksi resiko Ibu Hamil, Test Kehamilan, Pemeriksaan HB, Pemeriksaan Golongan Darah, Pemeriksaan Glukoprotein Urin	2542	2542	0	
		Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2542	2542	0	
		Vaksin Tetanus Difteri (Td)	2542	2542	0	
		Tablet tambah darah	272970	272970	0	
		Kartu ibu/rekam medis ibu	2542	2542	0	
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2542	2542	0	
		Formulir Partograf	2542	2542	0	
		Kartu ibu (rekam medis)	2542	2542	0	
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	2442	2442	0	
		Formulir Manajemen Terpadu Bayi Muda (MTBM)	2442	2442	0	
		Vaksin Hepatitis B0	2442	2442	0	
		Salep/tetes mata antibiotik	2442	2442	0	
		Vitamin K1 injeksi	2442	2442	0	
		Formulir bayi baru lahir	2442	2442	0	
4	Pelayanan kesehatan balita	Peralatan Anafilaktik	20	20	0	
		Kuisisioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau instrumen standar lain yang berlaku	6345	6345	0	
		Buku Kartu Ibu dan Anak (KIA)	2542	2542	0	
		Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang Anak (DDTK)	15555	15555	0	
		Vaksin imunisasi lanjutan : DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	4692	4692	0	
		Vaksin imunisasi dasar: HBO, BCG, Polio, IPV, DPT -HB -Hib, Campak, Rubella	2859	2859	0	
		Vitamin A Biru	1372	1372	0	
		Vitamin A Merah	12995	12995	0	
		Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	10000	10000	0	
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Kuesioner skrining kesehatan	6400	6400	0	
		Buku pemantauan kesehatan	6400	6400	0	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah	6400	6400	0	
		Buku raport kesehatanku	11000	11000	0	
		Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah	1	1	0	SIM Mobscreen
6	Pelayanan kesehatan pada	Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	18	18	0	SET PER PUSKESMAS



NO	JENIS LAYANAN DASAR	BARANG	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH	KETERANGAN
	usia produktif	Alat ukur berat badan, Alat ukur tinggi badan, Alat ukur lingkar perut, Tensimeter, Glukometer, Tes Strip Gula Darah, Lancet, Kapas Alkohol, KIT IVA Tes	18	18	0	SET PER PUSKESMAS
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	0	SIM APLIKASI
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Strip uji pemeriksaan gula darah, kolesterol	36545	36545	0	
		Buku kesehatan lansia	5338	5338	0	
		Instrumen Geriatric Depression Scale (GDS), Instrumen Abbreviated Mental Test (AMT) dan Instrumen Activity Daily Living (ADL) dalam Paket Pengkajian Paripurna Pasien Geriatri (P3G)	36545	36545	0	
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Pedoman pengendalian Hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	18	18	0	SET PER PUSKESMAS
		Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	0	SIM PUSKESMAS
		Tensimeter	523	523	0	
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	1	1	0	SIM PUSKESMAS
		Glukometer, Strip Tes Gula Darah, Kapas Alkohol, Lancet	18	18	0	SET PER PUSKESMAS
		Pedoman dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	18	18	0	SET PER PUSKESMAS
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia)	18	18	0	SET PER PUSKESMAS
		Kit berisi 2 Alat Fiksasi	18	18	0	SET PER PUSKESMAS
		Penyediaan formulir pencatatan dan pelaporan	1	1	0	SIM PUSKESMAS
		Media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE)	18	18	0	SET PER PUSKESMAS
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering	30	30	0	PAKET PER FASYANKES
		Catridge tes cepat molekuler	6500	6500	0	
		Formulir pencatatan dan pelaporan	54	54	0	SET PER FASYANKES
		Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	18	18	0	
		Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner)	54	54	0	SET PER FASYANKES
		Reagen Zn TB	500	500	0	
		Masker jenis rumah tangga dan Masker N95	6500	6500	0	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Tes cepat HIV (RDT) pertama	6665	6665	0	
		Media KIE (Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner)	30	30	0	paket
		Alat tulis, Rekam medis yang berisi nomor rekam medis, Nomor fasilitas pelayanan kesehatan pelaksana, Nomor KTP/NIK	300	300	0	paket
		Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum Spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	23	23	0	paket

Sumber daya manusia kesehatan diperlukan untuk selalu siap memberikan pelayanan Kesehatan kepada warga yang menjadi target sasaran SPM Kesehatan. Jenis SDM Kesehatan untuk tiap-tiap indikator SPM disesuaikan dengan kebutuhan dan petunjuk teknis yang telah ada (Permenkes No 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan



Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan).

Tabel 2. 27 Kebutuhan Tenaga Kesehatan

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Dokter/dokter spesialis kebidanan	2230	2230	0
		Bidan	429	429	0
		Perawat	2694	2694	0
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Dokter/dokter spesialis Kebidanan dan Kandungan	2230	2230	0
		Bidan	429	429	0
		Perawat	2694	2694	0
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Dokter/dokter spesialis Anak	2230	2230	0
		Bidan	429	429	0
		Perawat	2694	2694	0
4	Pelayanan kesehatan balita	Dokter	2230	2230	0
		Bidan	429	429	0
		Perawat	2694	2694	0
		Ahli Gizi	107	107	0
		Guru PAUD	1	1	0
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Kader Kesehatan	5569	5569	0
		Dokter/Dokter gigi	2230	2230	0
		Bidan	429	429	0
		Perawat	2694	2694	0
		Ahli Gizi	107	107	0
		Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	0
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Guru	1	1	0
		Kader Kesehatan	5569	5569	0
		Dokter	2230	2230	0
		Bidan	429	429	0
		Perawat	2694	2694	0
		Ahli Gizi	107	107	0
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	0
		Tenaga Non Kesehatan Terlatih	1	1	0
		Dokter	2230	2230	0
		Bidan	429	429	0
		Perawat	2694	2694	0
		Ahli Gizi	107	107	0
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	0
		Perawat	2694	2694	0
		Bidan	429	429	0
		Dokter	2230	2230	0
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	Tenaga Kesehatan Masyarakat	2	2	0
		Ahli Gizi	107	107	0
		Perawat	2694	2694	0
		Bidan	429	429	0
		Dokter	2230	2230	0
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Dokter dan/atau perawat terlatih jiwa dan/atau tenaga kesehatan lainnya	2230	2230	0



NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH KEBUTUHAN	JUMLAH TERSEDIA	SELISIH
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	462	462	0
		Penata Rontgen	137	137	0
		Tenaga non kesehatan terlatih	1	1	0
		Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	0
		Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	2230	2230	0
		Perawat	2694	2694	0
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	2230	2230	0
		Perawat	2694	2694	0
		Bidan	429	429	0
		Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	462	462	0
		Tenaga kesehatan masyarakat	2	2	0
		Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu	1	1	0

2.2.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar air minum masyarakat Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 2. 28 Penghitungan Data Warga Kota Yogyakarta yang terlayani SPAM

NO.	KECAMATAN	TARGET	REALISASI		
		KK	TERLAYANI JP	TERLAYANI BJP	BELUM TERLAYANI
1	2	4	5	6	7
1	Mantrijeron	12.752	1.450	1.450	0
2	Kraton	9.493	1.491	1.491	0
3	Mergangsan	14.836	1.440	1.440	0
4	Umbulharjo	7.389	2.252	2.252	0
5	Kotagede	6.900	824	824	0
6	Gondokusuman	6.073	2.783	2.783	0
7	Danurejan	9.490	1.292	1.292	0
8	Pakualaman	12.353	748	748	0
9	Gondomanan	7.605	891	891	0
10	Ngampilan	5.157	1.695	1.695	0
11	Wirobrajan	3.824	1.462	1.462	0
12	Gedongtengen	10.963	2.128	2.128	0
13	Jetis	23.706	3.584	3.548	0
14	Tegalrejo	11.367	3.539	3.539	0

* Keterangan : JP = Jaringan Perpipaan BJP = Bukan Jaringan Perpipaan



Pengembangan pengelolaan sanitasi dilakukan melalui beberapa tahapan. Pentahapan ini dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Penentuan tahapan pengembangan sanitasi Kota Yogyakarta berdasarkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan- pertimbangan tersebut antara lain yaitu kepadatan penduduk terkait *Central Bussiness District* (CBD), area beresiko sanitasi, zonasi dan topografi. Dari hasil studi EHRA, kelurahan dengan area beresiko tinggi akan mendapatkan prioritas dalam pembangunan sanitasinya. Kelurahan dengan kepadatan penduduk yang besar, terutama di daerah pusat bisnis dan pusat pelayanan atau CBD membutuhkan penanganan yang lebih cepat dibanding kelurahan dengan kepadatan rendah. Pertimbangan berikutnya dalam menentukan pentahapan adalah kondisi fisik lingkungan terkait topografi, yaitu relief (kemiringan lereng) dan kondisi tanah. Sebagai contoh: kondisi tanah dengan relief terjal tidak dimungkinkan untuk dilakukan pembangunan SPALD-Terpusat maupun sanitasi SPALD-Setempat. Pertimbangan terhadap faktor fisik penting untuk dilakukan agar pembangunan sarana sanitasi pemanfaatannya dapat optimal dalam jangka panjang. Pertimbangan terakhir yang tidak kalah penting adalah kesesuaian dengan rencana RTRW Kota dan RPJMD yang telah disusun. Indikator yang digunakan dalam tahapan cakupan pelayanan dalam dokumen strategi sanitasi ini adalah prosentase penduduk terlayani.

Dari hasil studi EHRA pengelolaan air limbah domestik dibagi ke dalam empat 4 tingkat resiko, yaitu resiko 1 adalah Kelurahan dengan tingkat resiko kurang beresiko, resiko 2 adalah kelurahan dengan resiko sanitasi rendah yang, resiko 3 adalah kelurahan dengan resiko sanitasi tinggi, dan resiko 4 adalah kelurahan dengan beresiko sangat tinggi. Pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar air limbah domestik masyarakat Kota Yogyakarta tercantum di dalam Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Yogyakarta tahun 2021-2025 dalam pengembangan kebutuhan sarana/prasaran air limbah domestik sebagai berikut:

Tabel 2. 29 Strategi Sanitasi Kota (SSK) Kota Yogyakarta tahun 2021-2025

	Sarana/Prasarana	Satuan	2020	2021	2022	2023	2024	2025	Jumlah
1	SR IPAL Terpusat/Regional	Unit/tahun	661	663	665	666	666	665	7.439
2	IPAL Komunal	Unit/tahun	1	1	2	1	1	1	8
3	SR IPAL Komunal	Unit/tahun	120	121	122	123	123	124	782
4	Tangki Septik Komunal (5-10 SR)	Unit/tahun	11	11	11	11	11	12	90
5	SR Tangki Septik Komunal (5-10 SR)	Unit/tahun	107	109	111	112	114	115	901
6	IPLT	Unit/tahun	0	0	1	0	0	0	1
7	Pengurusan Tangki Septik Individual	Unit/tahun	2.177	2.211	2.242	2.270	2.296	2.319	18.648
8	Tangki Septik Bersama (<i>Intervensi TS individual Layak</i>)	Unit/tahun	0	92	96	101	105	109	504
9	Tangki Septik Individual tidak layak (<i>Intervensi TS Tidak Layak ke TS Individual Layak</i>)	Unit/tahun	50	288	294	300	305	0	2.840



2.2.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tahap penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat akan dilaksanakan setelah tahapan pengumpulan data selesai dilakukan.

2.2.5 BIDANG TRANTIBUMLINMAS

a. Satpol PP

Dalam upaya pemenuhan pelayanan dasar SPM Bidang Trantibumlinmas terutama Sub Urusan Trantibum dibutuhkan dukungan anggaran dari Pemerintah Daerah. Pemenuhan dan penghitungan anggaran pendukung pelayanan dasar SPM pada Satpol PP memperhatikan prioritas kebutuhan dan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

Tabel 2. 30 Penghitungan Kebutuhan Penerima Layanan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANAN TRANTIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kebutuhan Penyusunan SOP	Tidak adanya pedoman dan dasar pelaksanaan kegiatan berpotensi mengakibatkan malpraktek yang dapat merugikan pemerintah daerah dan masyarakat	0	Penyusunan SOP tidak memerlukan anggaran
2		Kebutuhan Peningkatan Kapasitas SDM (Satpol PP, PPNS dan Satlinmas)	Kurangnya profesionalisme pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsi	Rp400.000.000	Jumlah anggaran adalah perkiraan yang dibutuhkan untuk memenuhi target peningkatan kapasitas SDM
3		Kebutuhan Pemenuhan Sarana & Prasarana Satpol PP	Tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Satlinmas	Rp1.700.000.000	Jumlah anggaran adalah perkiraan yang dibutuhkan untuk memenuhi target peningkatan pemenuhan sarpras Satpol PP dan linmas (kendaraan operasional, seragam dinas, dan sarpras pendukung ketugasan lain)
4		Pelayanan Perbaikan Materil	Kerugian material warga negara akibat penegakan perda dan perkara	Rp75.000.000	Jumlah anggaran adalah perkiraan yang dibutuhkan untuk memenuhi target Pelayanan Perbaikan Materil
5		Pelayanan Pengobatan	Kerugian imaterial warga negara akibat penegakan perda dan perkara	Rp75.000.000	Jumlah anggaran adalah perkiraan yang dibutuhkan untuk memenuhi target Pelayanan Pengobatan



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR TRANTIBUM	DAMPAK KEGIATAN	PERHITUNGAN KEBUTUHAN MUTU MINIMAL LAYANANTRAN TIBUM	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
6		Kebutuhan lainnya	Tidak optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP dan Satlinmas	N/A	menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah

b. Kebencanaan

Dalam melaksanakan pemenuhan indikator SPM Sub Urusan Bencana, diperlukan perhitungan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 31 Perhitungan Pelaksanaan Kegiatan SPM Kebencanaan Tahun 2022

No.	Uraian Kegiatan	Target	
		Volume	Satuan
1	Penyusunan dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)	1	Dokumen
2	Pembentukan KTB (Kampung Tangguh Bencana)	15	Kampung
3	Review Pengurus Kampung Tangguh Bencana	35	Kampung
4	Pembentukan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	8	SPAB
5	Pelatihan Pertama Gawat Darurat (PPGD)	2	Kali
6	Peningkatan Kompetensi TRC (Tim Reaksi Cepat)	5	Kali
7	Alat Telemetry	2	Unit
8	Operasional Pusat Data Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana	8	Jenis
9	Pembuatan Water Level Sungai	32	Unit
10	Pemeliharaan Posko 1	1	Unit
11	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pusdalop PB	7	Jenis
12	Penanganan Rekonstruksi Pasca Kejadian Bencana	2	Talud
13	Pendataan Kerusakan Pasca Kejadian Bencana	50	Kejadia
14	Rehabilitasi Infrastruktur/Rumah Rusak Akibat Kejadian Bencana	12	Lokasi
15	Operasional dekontaminasi PMI	7	Bulan
16	Operasional mobil jenazah	12	Bulan
17	operasional tim reaksi cepat	12	Bulan
18	Logistik Makanan	6250	OH
19	Logistik Non Makanan	3	Jenis
20	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50	Stell
21	Locker Petugas TRC	6	Unit
22	kelengkapan kerja TRC	2	Jenis
23	pemeliharaan peralatan rescue	1	Paket

c. Kebakaran

Dalam pemenuhan perhitungan SPM Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta sebagai berikut :

Tabel 2. 32 Layanan Perhitungan *Response Time* Penanggulangan Kejadian Kebakaran 15 Menit

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Pengadaan Alat Komunikasi	1. Belanja alat komunikasi HT	A. Jumlah komandan lapangan	18	0
			B. Jumlah kendaraan unit pemadam kebakaran	10	
			C. Harga unit per jenis	-	
		2. Kesiapan Sarana	A. Jumlah rig di pusdalops	0	0



NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
		Pusdalops Damkar	B. Jumlah perangkat komputer	0	
			C. Jumlah sound sistem/sirine toa	0	
			D. Harga unit per jenis	-	
2	Penyediaan sistem pelaporan masyarakat/panic button	1. Nomor tunggal dan aplikasi smartphone	A. Jumlah server	0	0
			B. Jumlah Perangkat Komputer	0	
			C. Harga unit per jenis	0	

Tabel 2. 33 Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Penyediaan Mobil Damkar/Kapal Damkar/unit operasional damkar lainnya	1. Penyediaan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah sektor/pos	1	1.985.000.000
			B. Jumlah unit mobil per pos sektor/pos damkar	1	
			C. Harga satu unit	1.985.000.000	
		2. Pemeliharaan Rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	10	495.854.380
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	1	
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	49.585.438	
		3. Pembelian bahan mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	A. Jumlah unit mobil damkar/unit operasional damkar lainnya	10	131.435.915
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil damkar/kapal damkar/unit operasional damkar lainnya	730	
			C. Harga per liter bahan bakar	18.000	
		4. Pendidikan dan pelatihan petugas pemadam kebakaran	A. Jumlah petugas	75	-
			B. Jumlah pelatihan	-	
			C. Biaya per pelatihan	-	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit Peralatan dan perlengkapan pemadaman kebakaran	75	54.100.000
			B. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	721.333	
		2. Penyediaan alat perlindungan diri petugas	A. Jumlah/jenis/set/paket/unit alat Perlindungan diri petugas	30	750.000.000
			B. Harga per Jumlah/jenis/set/paket/unit	25.000.000	
3	Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	1. Penyediaan tandon air/air/foam untuk pemadaman	A. Jumlah/volume tandon Air/air/foam untuk pemadaman	2	-
			B. Harga per jumlah/volume	15	
		2. Pemeliharaan rutin tandon air untuk pemadaman	A. Jumlah unit tandon air	15	233.000.000
			B. Jumlah pemeliharaan rutin tandon air dalam satu tahun	1	
			C. Harga biaya pemeliharaan tandon	15.533.333	



NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
			air per unit		
4	Kesiapan petugas pemadam kebakaran	1. Kesiapsiagaan petugas damkar	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	75	-
			B. honorarium piket jaga	-	
		2. Pelaksanaan pemadaman kebakaran	A. jumlah petugas pemadam kebakaran	75	-
			B. honorarium per kejadian kebakaran	-	

Tabel 2. 34 Layanan Pelaksanaan Penyelamatan dan Evakuasi

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Penyediaan mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah pos sektor/pos damkar	1	-
			B. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1	
			C. Harga satu unit	-	
		2. Pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1	28.872.125
			B. Jumlah pemeliharaan rutin mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1	
			C. Harga biaya pemeliharaan rutin per unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	28.872.125	
		3. Pembelian bahan bakar mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	1	18.432.250
			B. Jumlah kebutuhan bahan bakar setiap unit mobil penyelamatan (<i>rescue</i>)	132	
			C. Harga per liter bahan bakar	14.000	
2	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	Penyediaan peralatan dan perlengkapan penyelamatan	A. Jumlah /jenis/set/paket/unit peralatan dan perlengkapan penyelamatan (<i>rescue</i>)	75	108.295.000
			B. Harga per jumlah/jenis/set/paket/unit	1.443.933	
3	Kesiapan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	1. Kesiapsiagaan petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	75	-
			B. Honorarium piket jaga	-	
		2. Pelaksanaan penyelamatan (<i>rescue</i>)	A. Jumlah petugas penyelamatan (<i>rescue</i>)	75	-
			B. Honorarium per kegiatan penyelamatan	-	
		3. Pendidikan dan pelatihan petugas penyelamatan	A. Jumlah petugas	75	51.000.000
			B. Jumlah pelatihan	4	
			C. Biaya per pelatihan	170.000	



Tabel 2. 35 Layanan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Sosialisasi masyarakat tanggap kebakaran	Sosialisasi Masyarakat	A. Frekuensi kegiatan sosialisasi	20	96.260.000
			B. Biaya penyelenggaraan per sosialisasi	4.813.000	
2	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	Pelatihan/simulasi dan penyuluhan masyarakat relawan kebakaran	A. Frekuensi pelatihan/simulasi sosialisasi dan Penyuluhan	1	18.482.000
			B. Biaya penyelenggaraan per pelatihan/simulasi dan penyuluhan	18.482.000	
3	Pembentukan Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKI)	1. Pembentukan satuan relawan kebakaran	A. Jumlah satlakar	-	-
			B. Biaya paket pelatihan/simulasi	-	
		2. Penyediaan Sarana satlakar	A. Jumlah satlakar	-	-
			B. Jumlah/unit/jenis/paket sarana satlakar	-	
			C. Harga per jumlah/unit/jenis/paket	-	
		3. Pembinaan operasionalisasi satlakar	A. Jumlah satlakar	14	82.194.000
B. Biaya per kegiatan satlakar	5.871.000				

Tabel 2. 36 Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi Pasca Kebakaran

NO.	LANGKAH KEGIATAN	VARIABEL	KOMPONEN	JUMLAH/BIAYA SATUAN	TOTAL JUMLAH BIAYA YANG DIBUTUHKAN
1	Investigasi pasca kebakaran	4. Inventarisasi kejadian kebakaran	A. Jumlah petugas	40	1.089.885.000
			B. Jumlah sarana dan prasarana pendukung	15	
			C. Biaya kegiatan	1,816,475	
		5. Investigasi penyebab kebakaran	A. Jumlah petugas	10	36.820.000
			B. Frekuensi investigasi	18	
			C. Jumlah sarana pendukung	10	
D. Biaya per kegiatan investigasi	20.456				

2.2.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Pada tahap penghitungan pemenuhan pelayanan dasar, Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi menghitung warga negara yang berhak menerima pelayanan dasar yang tidak mampu memperoleh barang dan / atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya.



Tabel 2. 37 Penghitungan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis Di Luar Panti

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti	Penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, serta gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	Terpenuhinya kebutuhan dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis di luar panti		<p>RUMUS: $X = \text{Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di luar Panti yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}$ $Y = \text{Populasi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti.}$ Indikator</p>
		A. Standar biaya pribadi penyandang disabilitas, anak, lanjut usia, dan gelandangan dan pengemis	a. Layanan data dan pengaduan		(a) Honor petugas; (b) Jumlah petugas; (c) Alat pengelolaan data (komputer, printer); (d) Alat tulis kantor; (e) Sewa jaringan internet.	RUMUS = $(a \times b) + c + d + e$
			1. Penyandang Disabilitas		a. Rp.150.000 b. 48 c. 0 d. 0 e. 0	Rp 7.200.000,00
			2. Anak Terlantar			
			3. Lansia Terlantar			
			4. Gelandangan Pengemis			
B. Standar sarana dan prasarana LKS/ rumah singgah	b. Layanan kedaruratan		(a) Transport petugas; (b) Pembelian kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti; (c) Pemeliharaan kendaraan; (d) Honor petugas tim reaksi cepat.	Kategori 1 bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti. RUMUS = $c + d$		
	1. Penyandang Disabilitas		a. Rp. 170.000 b. c. d.	Rp 170.000,00		



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
			2. Anak Terlantar		a. Rp. 6.000.000 b. c. d.	Rp 6.000.000,00
			3. Lansia Terlantar		a. Rp.51.695.280 b. c, d,	Rp 51.695.280,00
			4. Gelandangan Pengemis		a. Rp.10.000.000	Rp 10.000.000,00
		1.Standar SDM				Kategori 2 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan. RUMUS = b + c + d
			1. Penyandang Disabilitas			
			2. Anak Terlantar			
			3. Lansia Terlantar			
			4. Gelandangan Pengemis			
		2.Standar sarana dan prasarana				Kategori 3 bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar di luar panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru. RUMUS = a + d
			1. Penyandang Disabilitas			
			2. Anak Terlantar			
			3. Lansia Terlantar			
			4. Gelandangan Pengemis			
			c. Penyediaan permakanan		(a) Penerima layanan per tahun; (b) Jumlah hari pemberian layanan permakanan dalam 1 (satu) tahun; (c) Indeks permakanan per orang per hari; (d) Transport petugas.	RUMUS = (a x b x c) + d



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
			1. Penyandang Disabilitas		a. bantuan permakanaan dari Kemensos/Pokmas b. 30 c. Rp.21.000,- d.	Rp 630.000,00
			2. Anak Terlantar		a. 24 b. 365 hari c. Rp.30.000,- d.	Rp 62.800.000,00
			3. Lansia Terlantar		a. bantuan permakanaan dari Kemensos/Pokmas : 326 lansia b. 16 hari c. 21000/hari (2x makan) d. 1000 a. UPT RPSLU Budhi Dharma (63 orang hari) b. 365 hari c. Harga satuan (Rp.30.000) d. PKH Komponen Lansia a. 4.647 orang b. 4 kali/tahun c. Rp 300.000/tahap d. 0 ASLUM a. 764 Orang b. 2 bulan/tahun c. Rp 200.000/bulan	PKH Komponen Lansia = Rp 5.576.400.000 ASLUM = Rp 305.600.000
			4. Gelandangan Pengemis		a. 20 Orang b. 90 hari c. Rp.20.000,- x 3 kali = Rp. 60.000,- d.	Rp 108.000.000,00
			d. Penyediaan sandang		(a) Pembelian pakaian; (b) Pembelian perlengkapan mandi; (c) Pembelian kebutuhan khusus untuk: perempuan dewasa, balita, dan yang mengalami bedridden; (d) Pembelian alas kaki; (e) Transport	RUMUS = a + b + c + d + e



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
					petugas.	
			1. Penyandang Disabilitas			
			2. Anak Terlantar		a.UPT RPA Wiloso Projo b c. d. e.	RUMUS = a + b + c + d + e
			3. Lansia Terlantar		.UPT RPSLU BUDHI Dharma a. Rp. 51.163.000 b Rp 22.680.000 c. Rp.29.700.000 d. Rp. 2.520.000 e. PKH Komponen Lansia a. Rp 5.576.400.000 b c. d. e.	Total Budhi Dharma 106.063.000 PKH: Rp.5.576.400.000
			4. Gelandangan Pengemis		a. Rp. 4.000.000,- b c. d. e.	Rp 4.000.000,00
			e. Penyediaan alat bantu		(a) kursi roda; (b) Kaca mata; (c) Jasa pemeriksaan dan pengukuran, serta penyediaan alat bantu; (d) Alat bantu dengar; (e) Kruk; (f) Tripod; (g) Tongkat putih; (h) Reglet (alat tulis untuk tuna netra); (i) Transport petugas; (j) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + e + f + g + h + i + j



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
			1. Penyandang Disabilitas		a. Rp. 45.756.000,-	Rp 45.756.000,00
			2. Anak Terlantar			
			3. Lansia Terlantar		Tidak ada pengadaan sama sekali	
			4. Gelandangan Pengemis			
			f. Penyediaan perbekalan kesehatan		(a) Obat umum; (b) Timbangan; (c) Pengukur tinggi badan; (d) Termometer; (e) Transport petugas; (f) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b + c + d + f
			2. Anak Terlantar		a. Rp.3.532.000 b. Rp.20.000,- c. Rp.2.700.000,-	Rp 6.252.000,00
			3. Lansia Terlantar		(a) Rp. 3.076.200 (b) 0 (c) 0 (d) 0 (e) 0 (f) 0	Rp 3.076.200,00
			4. Gelandangan Pengemis			
			g. Pemberian bimbingan fisik, mental spiritual, dan sosial		(a) Honor pekerja sosial; (b) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Pembelian alat peraga; (d) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c + d
			1. Penyandang Disabilitas		a. Honor TKSK; 1.000.000,- per bulan (selama 4 bulan); Rp.4.000.000,- - d. Transport Pelatihan PD Rp.3.000.000,-	Rp 7.000.000,00
			2. Anak Terlantar		a. Honor TKSK; 1.000.000,- per bulan (selama 4 bulan); Rp.4.000.000,- - UPT RPA Wiloso Projo Honor	Rp 55.500.000,00



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
					Narasumber Rp. 51.500.000,-	
			3. Lansia Terlantar		Komponen PKH Lansia a. Honor Pendamping Aslum Rp 35.500.000, Honor Pendamping PKH Rp 117.500.000 Honorarium Narsum Budhi Dharma Rp. 72.800.000 , Bu Puji a. Honor TKSK; 1.000.000,- per bulan (selama 4 bulan); Rp.4.000.000, -	Rp 229.800.000,00
			4. Gelandangan Pengemis		a. b. - c. - d	
			h. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan i. pengemis dan		(a) Tali asih tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (b) Pembelian alat peraga; (c) Transport petugas.	RUMUS = a + b + c
			1. Penyandang Disabilitas		Transport Pelatihan Keluarga PD Rp.1.500.000, -	Rp 1.500.000,00
			2. Anak Terlantar		-	RUMUS = a + b
			3. Lansia Terlantar		PKH Komponen Lansia : a. b. c. Rp 2.675.000	Rp 2.675.000,00
			4. Gelandangan Pengemis			
			j. Fasilitas pembuatan nomor induk kependudukan, akta kelahiran, surat nikah, dan kartu identitas anak		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			1. Penyandang Disabilitas			



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
			2. Anak Terlantar		Rp.4.380.000,-	Rp 4.380.000,00
			3. Lansia Terlantar			
			4. Gelandangan Pengemis			
			k. Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima layanan.	RUMUS = a + b
			1. Penyandang Disabilitas			
			2. Anak Terlantar		Rp. 99.549.600,00	Rp 99.549.600,00
			3. Lansia Terlantar		Rp. 33.860.000	Rp. 33.860.000
			4. Gelandangan Pengemis			
			1. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga		Biaya perjalanan pekerja sosial profesional.	Sesuai dengan standar biaya
			1. Penyandang Disabilitas			
			2. Anak Terlantar		Rp.3.576.200,-	Rp 3.576.200,00
			3. Lansia Terlantar		Rp. 2.400.000	Rp. 2.400.000
			4. Gelandangan Pengemis			
			m.Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga		(a) Biaya perjalanan atau transport pekerja sosial profesional; (b) Biaya transport penerima layanan; (c) Biaya perjalanan dalam rangka penguatan sebelum dan sesudah reunifikasi keluarga.	Sesuai dengan standar biaya
			1. Penyandang Disabilitas			
			2. Anak Terlantar		Rp.1.556.200,-	Rp1.556.200,00
			3. Lansia Terlantar		Rp 0	
			4. Gelandangan Pengemis			
			n. Layanan rujukan		(a) Transport petugas; (b) Transport penerima manfaat.	RUMUS = a + b
			1. Penyandang Disabilitas		a. Rp.25.500.000	Rp 25.500.000,00
			2. Anak Terlantar		Rp.1.840.000,-	Rp 1.840.000,00
			3. Lansia Terlantar		Rp 0	



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET /PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN
			4. Gelandangan Pengemis			

Tabel 2. 38 Penghitungan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial	Korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota	Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa	Persentase (%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di wilayah kabupaten/kota	Terpenuhinya kebutuhan dasar korban bencana alam dan sosial di wilayah kabupaten/kota		<p>RUMUS: $X = \text{Jumlah Korban Bencana Alam dan Sosial kabupaten/kota yang terpenuhi kebutuhan dasarnya.}$ $Y = \text{Populasi}$ Korban Bencana Alam dan Sosial di daerah kabupaten/kota yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana kabupaten/kota.</p>	Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Gelandangan Pengemis di wilayah kabupaten/kota. Jumlah LKS/ Rumah Singgah untu Disabilitas, Anak, Lanjut Usia, Gelandangan Pengemis Data SDM pengelola layanan sosial di luar panti. Data tenaga penunjang di LKS/ Rumah Singgah (administrasi).
		A. Standar biaya pribadi korban bencana alam dan sosial	a. Penyediaan permakanaan		(a) Paket pembelian bahan permakanaan/ makanan siap saji; (b) Biaya perjalanan/ transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana alam dan sosial per tahun; (e) Perkiraan jumlah hari pemberian layanan permakanaan per kejadian bencana dalam 1 (satu) tahun; (f) Indeks permakanaan per orang per hari.	$RUMUS = a + b + c$ $*a = d \times e \times f$	
					(a) 500 paket (b) Rp50.000,00 (c) Rp0 (d) 500 orang (e) 3 hari (f) 60.000	Rp90.050.000,00	



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
		B. Standar sarana dan prasarana tempat penampungan pengungsi	b. Penyediaan sandang		(a) Pembelian paket sandang dan perlengkapan keluarga serta family kids; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks sandang per orang per kejadian.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
					(a) 184 paket (Rp.9.200.000) (b) Rp50.000,00 (c) Rp0 (d) 500 orang (e) 50.000	Rp25.050.000,00	
		1. Standar SDM	c. Penyediaan tempat penampungan pengungsi		(a) Paket penyediaan tempat penampungan pengungsi; (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana per tahun; (e) Indeks tempat penampungan pengungsi.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	
					(a) 3 tempat (b) Rp50.000,00 (c) Rp0 (d) 500 orang (e) Rp.60.000,00	Rp30.050.000,00	
		2. Standar sarana dan prasarana	d. Penanganan khusus bagi kelompok rentan		(a) Pembelian paket bahan permakanan khusus (lanjut usia, ibu hamil, penyandang disabilitas, dan anak); (b) Biaya perjalanan/transport petugas; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah kelompok rentan; (e) Indeks penanganan khusus.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	



JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	STANDAR LAYANAN	INDIKATOR SPM/ SUB KEGIATAN	TARGET/PEMENUHAN SPM	KOMPONEN BIAYA	PERHITUNGAN	DATA YANG DIBUTUHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8
			e. Pelayanan dukungan psikososial		(a) Pengadaan paket alat bantu dukungan psikososial; (b) Honor pekerja sosial profesional/ tenaga kesejahteraan sosial/ relawan sosial; (c) Biaya pengiriman; (d) Perkiraan jumlah korban bencana; (e) Indeks dukungan psikososial.	RUMUS = a + b + c *a = d x e	

2.3 PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

2.3.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2. 39 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Bidang Pendidikan

NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
1	Program SPM Pendidikan Anak Usia Dini	% penduduk usia 5 - 6 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	1. Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	1. Tersedianya Data	Peserta didik
				2. Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	2. Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan
				3. Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	3. Biaya bantuan pendidikan	Peserta didik
				4. Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	4. Peserta didik terlayani	Peserta didik



NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
				5. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	5. Peserta didik terlayani	Peserta didik
				6. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	6. Peserta didik terlayani	Peserta didik
			Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	1. Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1. Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan
				2. Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	2 Terselenggaranya Kegiatan pelatihan/seminar/ lokakarya	Kegiatan
				3. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	3. Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan
				4. Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	4. Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan
				5. Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	5. Terselenggaranya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan
					1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1. Tersedianya Data
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga Kependidikan	2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2. Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-	3. Ajuan formasi guru	Guru



NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
				undangan		
				4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4. Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan
				5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5. Penempatan kepala sekolah	Kegiatan
				6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6. Penempatan pengawas sekolah	Kegiatan
				7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	7. Tersedianya data	Pengawas atau penilik
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1. Peningkatan kompetensi	Kegiatan
				2. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3. Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan
2	Program SPM Pendidikan Dasar	% penduduk usia 7-15 tahun	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1. Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	1. Tersedianya Data	Peserta didik
				2. Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	2. Bantuan biaya pendidikan	Peserta didik



NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
				3. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	3. Peserta didik terlayani	Peserta didik
				4. Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	4. Peserta didik terlayani	Peserta didik
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1. Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	1. Terselenggaranya komunitas belajar	Unit komunitas
				2. Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	2. Terselenggaranya pelatihan/seminar/lokakarya	Kegiatan
			Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	1. Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	1. Terselenggaranya pendampingan	Kegiatan
				2. Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	2. Terselenggaranya pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana	Kegiatan
				3. Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	3. Terselenggaranya Pemeliharaan dan perbaikan	Kegiatan
				4. Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	4. Terselenggaranya Sosialisasi	Kegiatan
			Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1. Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	1. Tersedianya Data	Pendidik dan tenaga kependidikan



NO.	PROGRAM	OUTCOME	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN
				2. Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	2. Distribusi	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3. Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3. Ajuan formasi guru	Guru
				4. Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	4. Penempatan guru pembimbing khusus	Kegiatan
				5. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	5. Penempatan	Kegiatan
				6. Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	6. Penempatan	Kegiatan
				7. Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	7. Tersedianya data	Pengawas
			Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	1. Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	1 Peningkatan kompetensi	Kegiatan
				2. Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	2. Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
				3. Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	3. Kepala sekolah atau guru mengikuti pelatihan	Kegiatan



2.3.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar SPM Kesehatan dilakukan oleh Dinas Kesehatan dan bertujuan untuk memastikan seluruh kebutuhan SPM Kesehatan dapat terpenuhi. Rencana anggaran ditetapkan dalam dokumen perencanaan Dinas Kesehatan dengan mempertimbangan trend dan target yang ditetapkan.

Tabel 2. 40 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar Bidang Kesehatan.

	PROGRAM	OUTCOME	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
			TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
1	Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar		4,632,195,650	4,476,510,220	4,545,506,990	4,572,666,990	4,602,542,990
	Urusan pemerintahan bidang kesehatan		4,632,195,650	4,476,510,220	4,545,506,990	4,572,666,990	4,602,542,990
	Penyediaan layanan kesehatan untuk UKM dan UKP rujukan tingkat daerah kabupaten/kota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar 2. Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar 3. Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar 4. Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 5. Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar 6. Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar 7. Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar 8. Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 9. Persentase penderita Diabetes melitus usia 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar 10. Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart 11. Persentase Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar 12. Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemsayarakatan) 	4,632,195,650	4,476,510,220	4,545,506,990	4,572,666,990	4,602,542,990
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persentase Ibu Hamil Mendapatkan Pelayanan Antenatal sesuai Standar	844,253,000	904,167,500	904,167,500	904,167,500	904,167,500
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persentase Ibu Bersalin Mendapatkan Pelayanan Persalinan sesuai Standar	208,423,000	203,053,000	203,053,000	203,053,000	203,053,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persentase Bayi Baru Lahir Mendapatkan Pelayanan sesuai Standar	326,295,000	286,860,000	286,860,000	286,860,000	286,860,000



PROGRAM	OUTCOME	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				
		TAHUN 2022	TAHUN 2023	TAHUN 2024	TAHUN 2025	TAHUN 2026
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Persentase balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	864,730,160	776,776,160	776,776,160	776,776,160	776,776,160
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Persentase anak pada usia pendidikan dasar mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	585,437,080	612,735,280	612,735,280	612,735,280	612,735,280
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Persentase penduduk kota usia 15 s/d 59 tahun mendapat skrining kesehatan sesuai standar	486,006,120	418,931,080	437,413,080	457,744,080	480,108,080
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Persentase warga negara Indonesia usia 60 tahun ke atas mendapat skrining kesehatan sesuai standar	704,711,810	660,405,040	704,711,810	704,711,810	704,711,810
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persentase penderita hipertensi usia 15 tahun keatas mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	82,102,000	90,541,800	91,553,800	92,666,800	93,890,800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persentase penderita Diabetes melitus usia 15 tahun mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	115,164,000	86,296,000	87,441,000	88,700,000	90,086,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Persentase orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ) berat mendapat pelayanan kesehatan sesuai standart	198,067,120	214,177,000	218,228,000	222,685,000	227,587,000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Persentase Terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	122,844,800	122,844,800	122,844,800	122,844,800	122,844,800
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Persentase orang berisiko terinfeksi HIV AiDs (Ibu Hamil, Pasien TB, Pasien IMS, waria/transgender, pengguna napza dan warga binaan lembaga pemasarakatan)	94,161,560	99,722,560	99,722,560	99,722,560	99,722,560

2.3.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Rencana penyediaan kebutuhan Air Minum untuk pelanggan di targetkan dapat memenuhi 100% pelayanan ke pelanggan Rumah Tangga di seluruh wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 2. 41 Rencana Penyediaan Kebutuhan Air Minum

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	100 %



JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET
1	2	3	4
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota	100 %

Rencana penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Kota Yogyakarta di tahun 2023 dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Kota dan Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota. Target dalam Rencana pelaksanaan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Kota 269 Rumah Tangga, dan target Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota adalah 100 unit Rumah Tangga.

Tabel 2. 42 Rencana Anggaran di Tahun 2023:

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1		
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)	
1	2	3	4	5	6	7	
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	88	%	Kota Yogyakarta		
		Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	60	%			
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,42	%			
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	88	%	Kota Yogyakarta		
	Air Limbah Domestik dalam Daerah	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	60	%			
	Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,42	%			
	Pembangunan/ Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sisten Pengelolan Air Limbah Domestik Terpusat	269	Rumah Tangga	Pandeyan, Patangpuluha	4.861.643.040	



JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN N+1	
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)
1	2	3	4	5	6	7
	Skala Kota	Skala Kota			n, Warungboto	
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	100	Unit	Kota Yogyakarta	1.804.875.000

Pada Tahun 2023 untuk perencanaan pelaksanaan pelayanan pengolahan air limbah domestik juga menggunakan Dana Keistimewaan (DANAIS) dengan Program Penyelenggaraan Keistimewaan Yogyakarta Urusan Tata Ruang, Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Kasultanan dan Kadipaten, Sub Kegiatan Pemanfaatan Ruang Satuan Ruang Strategis Karaton Alokasi anggaran Rp5.000.000.000,00 yang dilaksanakan di Kelurahan Kadipaten dan Kelurahan Patehan.

2.3.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tahap penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat akan dilaksanakan setelah tahapan penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar selesai dilakukan.

2.3.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

a. Satpol PP

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

1. Pelayanan kerugian materil;
2. Pelayanan Pengobatan

Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan diantaranya meliputi :

1. Standar operasional prosedur Satpol PP;
2. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;
3. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
4. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan



hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Dari 2 jenis indikator jenis layanan SPM tersebut telah terakomodir di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan telah memperlihatkan hubungan dukungan terhadap indikator yang ada di dalam SPM tersebut.

Tabel 2. 43 Rencana Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Trantibumlinmas Sub Urusan Trantibum

NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	8
1	Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> - Pembinaan SDM - Kajian penegakan Peraturan Daerah - Bimbingan teknis petugas tindak internal - Resume dan kodifikasi produk hukum daerah 	45.505.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	<ul style="list-style-type: none"> - Kesamaptaan Pol PP dan Linmas - Pembekalan Linmas - Peraturan perundang-undangan yang dipahami/disosialisasikan - Workshop Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja - Tes kesamaptaan 	212.221.132
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas beserta kelengkapannya - Pengadaan Sepatu Dinas Lapangan Linmas - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung ketugasan (mobil ops, HT, Chainsaw, RPU, peralatan penanganan kebencanaan) 	1.729.742.120
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan perda Kota Yogyakarta	50.000.000
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	<ul style="list-style-type: none"> - Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda - Penanganan pelanggaran perda dan perkada - Operasional Polisi Pamong Praja Pariwisata - Pengendalian Kawasan Khusus - Pengendalian Kawasan Tertib - Pengendalian Kawasan Wisata 	8.437.166.664



NO.	KEBUTUHAN PEMENUHAN LAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN
1	2	3	4	5	6	8
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	- Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi - Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan PPNS	314.125.848
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Coaching clinic PPNS	6.980.000

b. Kebencanaan

Dalam melaksanakan pemenuhan indikator SPM Sub Urusan Bencana, diperlukan perencanaan perhitungan pelaksanaan kegiatan tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 2. 44 Perhitungan SPM Kebencanaan di Tahun 2022

No.	Uraian Kegiatan	Target	
		Volume	Satuan
1	Penyusunan dokumen KRB (Kajian Risiko Bencana)	1	Dokumen
2	Pembentukan KTB (Kampung Tangguh Bencana)	15	Kampung
3	Review Pengurus Kampung Tangguh Bencana	35	Kampung
4	Pembentukan SPAB (Satuan Pendidikan Aman Bencana)	8	SPAB
5	Pelatihan Pertama Gawat Darurat (PPGD)	2	Kali
6	Peningkatan Kompetensi TRC (Tim Reaksi Cepat)	5	Kali
7	Alat Telemetry	2	Unit
8	Operasional Pusat Data Pengendali Operasi Penanggulangan Bencana	8	Jenis
9	Pembuatan Water Level Sungai	32	Unit
10	Pemeliharaan Posko 1	1	Unit
11	Pemeliharaan Sarana Prasarana Pusdalop PB	7	Jenis
12	Penanganan Rekonstruksi Pasca Kejadian Bencana	2	Talud
13	Pendataan Kerusakan Pasca Kejadian Bencana	50	Kejadia
14	Rehabilitasi Infrastruktur/Rumah Rusak Akibat Kejadian Bencana	12	Lokasi
15	Operasional dekontaminasi PMI	7	Bulan
16	Operasional mobil jenazah	12	Bulan
17	operasional tim reaksi cepat	12	Bulan
18	Logistik Makanan	6250	OH
19	Logistik Non Makanan	3	Jenis
20	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	50	Stell
21	Locker Petugas TRC	6	Unit
22	kelengkapan kerja TRC	2	Jenis
23	pemeliharaan peralatan rescue	1	Paket

c. Kebakaran

Rencana pemenuhan pelayanan dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta sebagai berikut :



Tabel 2. 45 Rencana pemenuhan pelayanan dasar Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

NO.	KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN	JUMLAH POS DAMKAR EKSISTING	JUMLAH RELAWAN DAMKAR EKSISTING	RENCANA JUMLAH PENAMBAHAN POS DAMKAR	RENCANA PEMBENTUKAN RELAWAN
1	Kota Yogyakarta	14	2	756	4	0

2.3.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Untuk Perencanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM bidang sosial diampu oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.

2.4 PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR

2.4.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Tabel 2. 46 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Spm Pendidikan

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	
			VOLUME	Rp
1	Jumlah data anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	7219	
2	Jumlah peserta dari keluarga yang tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan agar mendapat layanan (PAUD)	Peserta didik	1528	Rp2,495,900,000.00
3	Jumlah peserta didik terlayani pendidikan anak usia dini (PAUD)	Peserta didik	14334	
4	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	352	
5	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (PAUD)	Guru	189	
6	Jumlah peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan (PAUD)	Kegiatan	0	
7	Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan yang diberi beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pendidik dan tenaga kependidikan	0	
8	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (PAUD)	Kegiatan	10	Sumber Dana APBN
9	Jumlah peserta didik dari keluarga tidak mampu yang diberikan bantuan biaya pendidikan sampai lulus (SD/SMP/Kesetaraan)	Peserta didik	4500	Rp8,600,000.00
10	Jumlah pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	6	
11	Jumlah kegiatan pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana (SD/	Kegiatan	1	Tanpa anggaran



NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET	
			VOLUME	Rp
	SMP/ Kesetaraan)			melalui dapodik
12	jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1	
13	Jumlah sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	1	
14	Jumlah data pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD / SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	189	
15	Jumlah distribusi pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pendidik dan tenaga kependidikan	267	
16	Jumlah ajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Guru	267	
17	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	89+16	
18	Jumlah penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	7+8	
19	Jumlah data pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini pada (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Pengawas atau penilik	22.11	
20	Jumlah kegiatan pelatihan guru penggerak kepala sekolah atau guru (SD/ SMP/ Kesetaraan)	Kegiatan	10	Sumber Dana APBN

2.4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM Kesehatan dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan yang telah disusun. Dinas Kesehatan menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan Kesehatan kepada seluruh warga sasaran SPM.

Dalam pelaksanaannya, sebelas indikator SPM mencapai realisasi anggaran lebih dari 90%, namun untuk indikator pelayanan Kesehatan ibu bersalin persentase realisasi anggaran terendah, sebesar 64%.



Tabel 2. 47 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar SPM Kesehatan

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	CAPAIAN PENERIMA LAYANAN DASAR (TAHUN 2022)				PENDANAAN (TAHUN 2022)		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ALOKASI ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	PERSENTASE REALISASI ANGGARAN (%)	SUMBER DANA
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	2,495	2,495	100.00	842,976,000	758,890,420	90.03	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	2,495	2,495	100.00	208,500,000	133,625,000	64.09	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	2,481	2,481	100.00	253,895,000	240,895,000	94.88	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
4	Pelayanan kesehatan balita	14,597	12,850	88.03	864,730,160	846,432,160	97.88	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	63,897	63,897	100.00	585,437,080	565,274,250	96.56	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	93,868	81,787	87.13	501,248,620	491,624,720	98.08	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	36,014	36,014	100.00	704,711,810	653,354,700	92.71	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	28,420	28,420	100.00	82,102,000	79,512,000	96.85	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus	13,676	13,676	100.00	115,164,000	111,784,000	97.07	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	1,201	1,201	100.00	194,947,120	180,173,800	92.42	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	8971	8,971	100.00	302,687,800	287,883,000	95.11	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	11,145	11,145	100.00	109,385,560	105,802,680	96.72	DAK Non Fisik (BOK Puskesmas)

2.4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Perusahaan Daerah Air Minum terus berusaha untuk memaksimalkan pelayanan pemenuhan air minum kepada seluruh warga, berikut disampaikan data jumlah warga Yogyakarta yang sudah mengakses air bersih sebagai berikut:

Tabel 2. 48 Pelaksanaan pemenuhan pelayanan Air Minum Kota Yogyakarta

JENIS PELAYANAN DASAR	TOTAL RUMAH DI KABUPATEN/KOTA	REALISASI		
		SUDAH TERLAYANI	BELUM TERLAYANI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
1	2	3	4	5
Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari	141.908 KK	141.908 KK	0	100

Rencana penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik Kota Yogyakarta ditahun 2022 dilaksanakan dalam Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Kota dan Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota. Target dalam Rencana pelaksanaan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Kota 2 Dokumen Perencanaan. Dan



target Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota adalah 150 unit Rumah Tangga.

Tabel 2. 49 Anggaran Pelaksanaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	TARGET	SATUAN	RENCANA TAHUN ANGGARAN	
					LOKASI	ALOKASI DANA (RP)
1	2	3	4	5	6	7
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	87.62	%	Kota Yogyakarta	
		Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	50	%		
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15,26	%		
	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem	Persentase cakupan saluran air limbah yang memadai	87.62	%	Kota Yogyakarta	
	Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelayanan SPALD-S akses aman	50	%		
		Persentase pelayanan SPALD-T akses aman	15.26	%		
	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Tersambung dengan Sisten Pengelolan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	2	Dokumen	Baciro dan warung boto	226.814.000
	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota	Jumlah penambahan rumah tangga yang terlayani melalui optimalisasi SPALD-T Skala Kota	150	Unit	Kota Yogyakarta	2.829.974.000

Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Kota didapatkan hasil berupa Dokumen Perencanaan Sambungan Rumah Kelurahan Baciro dan Dokumen Perencanaan Sambungan Rumah Kelurahan Warungboto. Sub Kegiatan Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota Dan dilaksanakan dengan pekerjaan Rehabilitasi Sambungan Rumah Isidentil yang tersebar di Kota Yogyakarta dengan output 181 Sambungan Rumah.



Tabel 2. 50 Pekerjaan yang dilaksanakan sebagai pemenuhan pelayanan dasar

No	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan
1	Sub Kegiatan Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengolahan Air Limbah Terpusat Skala Kota	Penyusunan DED Sambungan Rumah Kelurahan Baciro
		Penyusunan DED Sambungan Rumah Kelurahan Warungboto
2	Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota/ Rehabilitasi SR dan Saluran Pembawa	Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (RW 11 Baciro)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Kel. Sorosutan)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (RW. 17 Kel. Baciro)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (RT.34 dan RT.35 Celeban Kel. Tahunan)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (RW. 01 Kel. Klitren)
		Pengawasan Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil
		Penyusunan DED Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (RT.06 RW.01 Kel. Prenggan)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Jl. Magelang, Cs)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Kawasan Gereja Sawo Kembar, Kemantren Gondokusuman)
		Penyusunan DED Rehabilitasi Saluran Air Limbah Jl. Hayam Wuruk
		Penyusunan DED Rehabilitasi Saluran Air Limbah Jl. Singojayan (RW 01) dan Jl. Lembu Andini (RW 10) Kel. Pakuncen
		Penyusunan DED Rehabilitasi Saluran Air Limbah Jl. Jlagran dan Jl. Pasar Kembang
		Pengawasan Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil II
Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Kawasan Jl. Gondosuli dan Pandeyan)		



No	Sub Kegiatan	Nama Paket Pekerjaan
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Gg. Gambir Sawit Kel. Patangpuluhan)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (SAL Pembawa Jl. Cuwiri Mantrijeron)
		Rehabilitasi Saluran Pembawa dan Sambungan Rumah Insidentil (Kawasan Masjid Nurul Islam Klitren)

2.4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar Bidang Urusan Perumahan Rakyat akan dilaksanakan setelah tahapan penyusunan rencana pemenuhan pelaksanaan dasar selesai dilakukan.

2.4.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

a. Satpol PP

Capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 100% dalam hal ini tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kota Yogyakarta Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM.

Demikian juga pencapaian mutu barang/Jasa/SDM telah tercapai 100% dengan capaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun berjalan. Pada penyusunan anggaran perubahan Tahun 2022, terdapat perubahan penganggaran Pelayanan Ganti Kerugian terhadap warga negara yang terkena dampak kerugian akibat penegakan perda dan perkada. Dari anggaran sebelumnya sejumlah Rp150.000.000,00 menjadi Rp50.000.000,00. Hal ini karena dari hasil evaluasi capaian realisasi kinerja dan anggaran pada TW III tidak ada realisasi pada rekening belanja untuk Pelayanan Ganti Kerugian tersebut sehingga anggaran dilakukan resionalisasi. Meskipun demikian, dengan tidak adanya realisasi belanja ganti kerugian justru menunjukkan kinerja pemenuhan pelayanan dasar SPM Satpol PP mencapai hasil yang baik atau sesuai dengan capaian target 100%.



Tabel 2. 51 Realisasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat

NO	INDIKATOR KINERJA/JENIS LAYANAN SPM		INDIKATOR PENCAPAIAN/OUTPUT			
1	PELAYANAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar					
	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang belum terlayani	Persentase capaian mutu 100%
	A	Persentase Pencapaian Penerima Layanan Dasar	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	Persentase Pencapaian Mutu Minimal Layanan Dasar					
	B	Jumlah Mutu Barang/ Jasa/ SDM	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang tersedia	Jumlah Mutu Barang/ Jasa yang belum tersedia	Total Pencapaian
	1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian material	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian material akibat dari penegakan Perda)
	2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	0	0	0	100% (tidak ada Warga Negara yang mengalami kerugian pelayanan pengobatan akibat dari penegakan Perda)
	3	Standar Operasional Prosedur (SOP) Satpol PP	33	33	0	100%
	4	Standar Sarana Prasarana Satpol PP	3 jenis	3 jenis	0	100%
	5	Standar Peningkatan Kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat	5 jenis	5 jenis	0	100%
	6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	0	0	0	100%



Tabel 2. 52 Realisasi Anggaran Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota	- Pembinaan SDM - Kajian penegakan Peraturan Daerah - Bimbingan teknis petugas tindak internal - Resume dan kodifikasi produk hukum daerah	45.505.000	45.305.000
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	- Kesamaptaaan Pol PP dan Linmas - Pembekalan Linmas - Peraturan perundang-undangan yang dipahamkan/di sosialisasikan - Workshop Jabatan Fungsional Satpol Polisi Pamongpraja - Tes kesamaptaaan	212.221.132	192.599.960
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	- Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan Linmas beserta kelengkapannya - Pengadaan Sepatu Dinas Lapangan Linmas - Pengadaan sarana dan prasarana pendukung	1.729.742.120	1.514.533.625



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)
					ketugasan (mobil ops, HT, Chainsaw, RPU, peralatan penanganan kebencanaan)		
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Kompensasi bagi masyarakat yang terkena dampak penegakan perda Kota Yogyakarta	50.000.000	0
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Operasi Non Yustisi Pelanggaran Perda - Penanganan pelanggaran perda dan perkada - Operasional Polisi Pamong Praja Pariwisata - Pengendalian Kawasan Khusus - Pengendalian Kawasan Tertib - Pengendalian Kawasan Wisata	8.437.166.664	8.175.834.49 2
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	- Laporan pelanggaran perda yang ditindak secara yustisi - Penegakan hukum terhadap tersangka yang tidak memenuhi panggilan	314.125.848	299.578.912



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	KELUARAN	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	Realisasi (Rp)
					PPNS		
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Coaching clinic PPNS	6.980.000	6.980.000

b. Kebencanaan

Tahapan pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar SPM Sub Urusan Bencana dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan yang telah disusun. BPBD Kota Yogyakarta menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan kepada seluruh warga sasaran SPM.

Dalam pelaksanaannya, indikator SPM Sub Urusan Bencana mencapai realisasi anggaran lebih dari 90%, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 53 Pelaksanaan SPM Kebencanaan

URAIAN SPM	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%REALISASI ANGGARAN
Pelayanan Informasi Rawan Bencana			3.442.771.330	3.372.103.264	97,94
1. Penyelesaian dokumen KRB sampai dengan dinyatakan sah/legal	1 dokumen	1 dokumen			
2. Jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informs rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	44393 penduduk	44393 penduduk			
Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			3.503.614.665	3.200.386.059	91,35
1. Penyelesaian dokumen RPB sampai dinyatakan sah/legal	1 dokumen	1 dokumen			
2. Penyelesaian dokumen Renkon sampai dinyatakan sah/legal	2 dokumen	2 dokumen			
3. Jumlah aparaturnya dan warga negara yang ikut pelatihan	5085 penduduk	5085 penduduk			
4. Jumlah warga negara yang ikut pelatihan	4935 penduduk	4935 penduduk			
5. Jumlah warga negara yang mendapat layanan pusdalops penanggulangan bencana dan sarana prasarana penanggulangan bencana	607 penduduk	607 penduduk			



URAIAN SPM	TARGET	REALISASI	ANGGARAN (RP)	REALISASI ANGGARAN (RP)	%REALISASI ANGGARAN
6. Jumlah warga negara yang mendapat peralatan perlindungan	28826 penduduk	28826 penduduk			
Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			2.556.619.232	2.396.280.394	93,73
1. Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status KLB	0	0			
2. Kecepatan respon kurang dari 24 jam untuk setiap status darurat bencana	1 penetapan darurat bencana	1 penetapan darurat bencana			
3. Jumlah petugas yang aktif dalam penanganan darurat bencana	101 petugas	101 petugas			
4. Jumlah korban berhasil dicari, ditolong dan dievakuasi terhadap kejadian bencana	606 korban	606 korban			
JUMLAH			9.503.005.227	8.968.769.717	94,4

c. Kebakaran

Tabel 2. 54 Rekapitulasi pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar (pemadaman dan evakuasi)

NO.	KABUPATEN/KOTA	CAPAIAN SPM OLEH PETUGAS DAMKAR (%)	CAPAIAN SPM OLEH RELAWAN DAMKAR (%)	TOTAL CAPAIAN SPM (%)
1	Kota Yogyakarta	100 %	93,75%	97%

Tabel 2. 55 Pelaksanaan Pemenuhan Pelayanan Dasar (Operasi Non Kebakaran)

NO.	KABUPATEN/ KOTA	OPERASI NON KEBAKARAN				
		KECELAKAAN TRANSPORTASI	WATER RESCUE	ANIMAL RESCUE	PENYELAMATAN PADA KETINGGIAN	LAINNYA
1	Kota Yogyakarta	2	1	386	0	111

2.4.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Tahap pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan dengan:

1. Penyediaan pemakanan
2. Penyediaan sandang
3. Penyediaan alat bantu
4. Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga
5. Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial
6. Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak



- terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat
7. Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak
 8. Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar
 9. Pemberian layanan data dan pengaduan
 10. Pemberian layanan kedaruratan
 11. Pemberian pelayanan penelusuran keluarga
 12. Pemberian layanan rujukan

Tabel 2. 56 Realisasi Pencapaian Pemenuhan Pelayanan Dasar Bagi Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lansia Terlantar, Gepeng Diluar Panti Kabupaten Kota

NO	KELUARAN (OUTPUT)	SATUAN	TARGET		REALISASI		CAPAIAN		SUMBER DANA
			VOLUME	RP	VOLUME	RP	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti		194	219.932.120	194	219.932.120	100,00%	100,00%	APBD Kota dan APBD DIY
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti		756	702.510.920	756	614.136.520	100,00%	87,42%	APBD
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti		5518	13.434.529.349	5518	13.122.585.972	100,00%	97,68%	APBD dan APBN
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti		45	190.882.000	45	190.882.000	100,00%	100,00%	APBD
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota		2070	2.083.380.740	2070	1.177.809.025	100,00%	56,53%	APBD



BAB III PENCAPAIAN SPM

3.1 BIDANG URUSAN PENDIDIKAN

Urusan pendidikan menjadi urusan wajib SPM terkait dengan pelayanan dasar sebagaimana telah ditetapkan oleh Pemerintah.

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2022 pada urusan pendidikan di daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pengelolaan pendidikan sekolah dasar;
- b. Pengelolaan pendidikan sekolah menengah pertama;
- c. Pengelolaan pendidikan anak usia dini (PAUD); dan
- d. Pengelolaan Pendidikan nonformal/kesetaraan.

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Target dalam pelaksanaan SPM pada urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Target Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun			
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya	Setiap tahun			
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun



3. Anggaran

Anggaran adalah alokasi jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan ke dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Pemerintah Daerah, yang bersumber dari alokasi anggaran SPM tahun 2022 pada urusan pendidikan di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Alokasi Anggaran SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA	2,049,712,899,206				
ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	473,957,989,392	23.12%			
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	149,891,847,871		7.31%	31.63%	137.714.033.644 91,87%
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	77,583,598,000				
A. APBN	0				
B. DAK	77,583,598,000				
C. LAINYA	0				

Tabel 3. 3 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Pendidikan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
KOTA YOGYAKARTA					227,475,445,871	213,817,022,651	94.83%
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI				4,707,631,000	4,493,516,000	95.45%
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD			2,225,635,000	2,207,420,000	99.18%
		1	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik	5.224.000	5.224.000	100.00%
		2	Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling	Kegiatan	52.580.000	49.580.000	94.29%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
			sedikit 2 (dua) kali per tahun				
		3	Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik	1.997.000.000	1.982.950.000	99.30%
		4	Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik	170.831.000	169.666.000	99.32%
JUMLAH INDIKATOR					2,225,635,000	2,207,420,000	99.18%
	2	Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan			135,548,000	135,548,000	100.00%
		1	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	25.960.000	25.960.000	100.00%
		2	Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan	90.668.000	90.668.000	100.00%
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	18.920.000	18.920.000	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					135,548,000	135,548,000	100.00%
	3	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			2,212,400,000	2,016,500,000	91.15%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	2.175.600.000	1.979.700.000	91.00%
		2	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	27.000.000	27.000.000	100.00%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
		3	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini		9.800.000	9.800.000	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					2,212,400,000	2,016,500,000	91.15%
	4	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)			134,048,000	134,048,000	100.00%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	91.848.000	91.848.000	100.00%
		2	Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan	15.000.000	15.000.000	100.00%
		3	Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan	27.200.000	27.200.000	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					134,048,000	134,048,000	100.00%
JUMLAH PROGRAM					4,707,631,000	4,493,516,000	95.45%
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR				60,089,623,802	58,850,927,952	97.94%
	1	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			12,931,200,000	12,887,000,000	99.66%
		1	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	12.931.200.000	12.887.000.000	99.66%
JUMLAH INDIKATOR					12,931,200,000	12,887,000,000	99.66%
	2	Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			115,593,550	115,593,550	100.00%
		1	Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	115.593.550	115.593.550	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					115,593,550	115,593,550	100.00%
	3	Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)			1,402,228,366	1,364,653,801	97.32%
		1	Pemberian layanan pendampingan kepada	Kegiatan	53.250.000	47.200.000	88.64%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
			satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan				
		2	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	1.304.928.366	1.273.403.801	97.58%
		3	Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan	44.050.000	44.050.000	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					1,402,228,366	1,364,653,801	97.32%
	4	Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			45,258,576,886	44,192,080,601	97.64%
		1	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan	25.787.138,16	25.221.829,88	97.81%
		2	Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru	16.378.400	15.877.212	96.94%
		3	Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan	3.083.238.720	3.083.238.720	100.00%
		4	Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan		9.800.000	9.800.000	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					45,258,576,886	44,192,080,601	97.64%
	5	Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)			382,025,000	291,600,000	76.33%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga	Kegiatan	382,025,000	291,600,000	76.33%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	REALISASI	%
			kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan				
JUMLAH INDIKATOR					382,025,000	291,600,000	76.33%
JUMLAH PROGRAM					60,089,623,802	58,850,927,952	97.94%
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN				684,810,000	662,922,000	96.80%
	1	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)			170,000,000	148,750,000	87.50%
		1	Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik	170,000,000	148,750,000	87.50%
JUMLAH INDIKATOR					170,000,000	148,750,000	87.50%
	2	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)			9,650,000	9,650,000	100.00%
		1	Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan	9,650,000	9,650,000	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					9,650,000	9,650,000	100.00%
	3	Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)			80,760,000	80,760,000	100.00%
		1	Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan	80,760,000	80,760,000	100.00%
JUMLAH INDIKATOR					80,760,000	80,760,000	100.00%
	4	Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)			424,400,000	423,762,000	99.85%
		1	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan	424,400,000	423,762,000	99.85%
JUMLAH INDIKATOR					424,400,000	423,762,000	99.85%
JUMLAH PROGRAM					684,810,000	662,922,000	96.80%

Tabel 3. 4 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Urusan Pendidikan Tahun 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pengelolaan Dana BOSDA TK, SD, SMP Negeri	39,979,305,211	36,268,011,283	90.72%
2	Pengelolaan Dana BOSDA TK, SD, SMP Swasta	22,753,000,000	22,586,548,080	99.27%
3	Pengelolaan Dana BOSDA SKB	702,200,000	670,789,080	95.53%
4	Kegiatan ASPD dan ANBK SD - SMP-	1,856,112,100	1,848,713,843	99.60%



NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	ANGGARAN	REALISASI	%
	Kesetaraan			
5	Pembinaan kelembagaan dan Manajemen	1,543,101,840	1,530,846,990	99.21%
6	Kegiatan kampung Baca, JBM dan TBM	803,982,730	799,757,725	99.47%
7	Pembinaan minat bakat Siswa	1,653,885,200	1,423,784,600	86.09%
8	Pengelolaan Dana BOS SD dan SMP	62,201,680,000	56,648,942,019	91.07%
9	BOS Kinerja	1,300,000,000	1,122,551,239	86.35%
10	Pengelolaan dana BOP PAUD	8,631,280,000	7,260,296,386	84.12%
11	Pengelolaan Dana BOP Kesetaraan	2,239,900,000	2,104,830,429	93.97%
12	DAK Fisik SD	1,640,433,998	1,524,683,000	92.94%
13	DAK Fisik SMP	1,570,304,000	1,543,544,000	98.30%
14	Jaminan Pendidikan Daerah Jenjang SMA/SMK dan Perguruan Tinggi	12,135,822,240	11,537,637,140	95.07%
15	Pengadaan prasarana Pendidikan di Satuan Pendidikan	2,551,385,000	2,519,762,135	98.76%
16	Kegiatan Pendidikan Inklusi	430,988,750	418,958,750	97.21%

4. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam pelaksanaan SPM tahun 2022 pada urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 3. 5 Personil SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda.I/Gol IV c	1
Kepala Urusan	Pembina Gol. IV/a	4
	Penata Tk1 Gol. III/d	1
Sekretaris	Pembina Tk. I/Gol IV b	1
Kepala Seksi	Penata Tk 1/Gol III/d	7
	Penata/Gol III/c	2
Kepala Subbagian	Penata Tk 1/Gol III/d	1
	Penata Gol. III/c	1
Sub Koordinator	Pembina Gol. IV/a	1
	Penata Tk1 Gol. III/d	1
	Penata Muda Tk I/Gol III/b	3
Ka UPT	Pembina Gol. IV/a	2
Ka TU	Penata Tk 1/Gol III/d	1
	Penata/Gol III/c	1
Staf	Penata Tk 1/Gol III/d	3
	Penata Gol III/c	3
	Penata Muda Tk. I Gol III b	9
	Penata Muda/Gol III a	29
	Pengatur Tk 1/Gol II d	1
	Pengatur/Gol II c	14
	Pengatur Muda/Gol II b	3
	Pengatur Muda/Gol II a	4
Juru/ I c	1	
Pejabat Fungsional	Pembina Utama Muda.I/Gol IV c	2
	Pembina Tk. I/Gol IV b	9
	Pembina /Gol IV a	17
	Penata Tk 1/Gol III/d	1
	Pengatur Tk 1/Gol II d	1
Pengatur	2	
Naban		25
Tenaga Teknis		40
Total		202



5. Hasil Capaian

Tabel 3. 6 Realisasi Pencapaian SPM Urusan Pendidikan Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Realisasi	Indikator	Target	Realisasi
1	Pendidikan Dasar	Jumlah Warga Negara usia 7- 15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya				
2	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Negara Usia 7– 18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan.	100%	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%
		Rata-rata kemampuan literasi dan numerasi siswa berdasarkan hasil asesmen nasional	Meningkat dari hasil dua tahun sebelumnya				
3	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah Warga Negara Usia 5- 6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	100%	91%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	100%

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> Pencapaian target untuk indikator PAUD belum mencapai 100%, jika dihubungkan dengan data yang tersedia anak usia paud masih ada yang berusia kurang dari 5-6 dan lebih dari 6 tahun. Anggaran untuk pemenuhan SPM belum di rinci per sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan. Namun demikian anggaran pemenuhan SPM sudah mengakomodir semua anggaran untuk mendukung 	<ul style="list-style-type: none"> Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah semaksimal mungkin melakukan upaya untuk dapat memenuhi target indikator PAUD, dengan melakukan pendataan, dan mengolah data melalui dapodik untuk anak usia 5-6 tahun, memberikan sosialisasi ke masyarakat melalui HIMPAUDI, menyebarkan leaflet terkait pentingnya pendidikan anak usia dini sebagai dasar persiapan masuk ke jenjang SD, dan penguatan regulasi yang berkaitan dengan syarat wajib 1 tahun pra SD. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah melakukan pemilahan dan pemetaan data untuk anak penduduk kota bersekolah di luar kota dan data untuk anak penduduk luar kota



PERMASALAHAN	SOLUSI
penerapan SPM meski belum bisa menyajikan secara rinci.	<p>yang bersekolah di kota Yogyakarta. Berdasarkan hasil pemilahan data yang bersumber dari Dapodik dan Backbone di dapat untuk jumlah anak penduduk kota yang bersekolah di luar kota sebanyak 2.579 dan untuk jumlah anak penduduk luar kota yang bersekolah di kota yogyakarta sebanyak 1.621</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kedepannya akan di rinci sesuai nomenklatur yang di atur pada kepmendagri 050/5889 dalam rangka untuk pemenuhan SPM

3.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

1. Jenis pelayanan dasar SPM bidang Kesehatan Tahun 2022 di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

- a. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
- b. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu bersalin
- c. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir
- d. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
- e. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar
- f. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
- g. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
- h. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi
- i. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan penderita Diabetes Melitus
- j. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberculosis
- l. Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko terinfeksi Virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (*Human Immunodeficiency Virus*).

2. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 3. 7 Target Dalam Pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
3	Pelayanan kesehatan bayi	Jumlah bayi baru lahir yang	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa	100%	Setiap tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	Baru Lahir	mendapatkan pelayanan kesehatan			dan sumber daya manusia		
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Jumlah Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian					
		Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan					

3. Anggaran

Tabel 3. 8 Alokasi anggaran dan realisasi SPM bidang Kesehatan di tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA	1,794,427,166,854				
ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	121.463.265.634	6,77 %			
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	5.989.658.290		0.33 %	4,93 %	5.622.932.030
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	6,811,880,830				
A. APBN	0				
B. DAK	5.989.658.290				5.622.932.030
C. LAINYA					

Tabel 3. 9 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
KOTA YOGYAKARTA					5.989.658.290	5.622.932.030	93.88 %
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				270,187	256,337	94.87 %



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	1		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		270,187	256,337	94.87 %
		1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Orang	2.495	2.495	100.00 %
		2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Orang	2.495	2.495	100.00 %
		3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Orang	2.481	2.481	100.00 %
		4	Pelayanan kesehatan Balita	Orang	14.597	12.850	88.03 %
		5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Orang	63.897	63.897	100.00 %
		6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Orang	93.868	81.787	87.13 %
		7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Orang	36.014	36.014	100.00 %
		8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Orang	28.420	28.420	100.00 %
		9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	Orang	13.676	13.676	100.00 %
		10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	1.201	1.201	100.00 %
		11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	Orang	8.971	8.971	100.00 %
		12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Orang	11.145	11.145	100.00 %
		13	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dokumen	1	1	100.00 %
		14	Pengelolaan pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana	Dokumen	0	0	0%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			dan/atau berpotensi bencana				
JUMLAH INDIKATOR					270,187	256,337	94.87 %
JUMLAH PROGRAM					270,187	256,337	94.87 %

Tabel 3. 10 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	842,976,000	758,890,420	90.03 %
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	208,500,000	133,625,000	64.09 %
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	253,895,000	240,895,000	94.88 %
4	Pelayanan kesehatan Balita	864,730,160	846,432,160	97.88 %
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	585,437,080	565,274,250	96.56 %
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	501,248,620	491,624,720	98.08 %
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	704,711,810	653,354,700	92.71 %
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	82,102,000	79,512,000	96.85 %
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	115,164,000	111,784,000	97.07 %
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	194,947,120	180,173,800	92.42 %
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	302,687,800	287,883,000	95.11 %
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	109,385,560	105,802,680	96.72 %
13	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	1,223,873,140	1,167,680,300	95.41 %



4. Dukungan Personil

Tabel 3. 11 Personil yang terlibat dalam pemenuhan SPM
Urusan Kesehatan tahun 2022

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Tk 1, Gol IV/b	1
Sekretaris	Pembina, Gol IV/a	1
Kepala Bidang	Pembina, Gol IV/a	3
	Penata Tk 1, Gol III/d	1
Kepala Seksi	Pembina, Gol IV/a	8
Kepala Subbagian	Penata Tk 1, Gol III/d	2
Sub Koordinator	Pembina, Gol IV/a	2
	Penata Tk 1, Gol III/d	1
Ka UPT	Pembina Tk 1, Gol IV/b	1
	Pembina, Gol IV/a	18
	Penata Tk 1, Gol III/d	1
Ka TU	Pembina, Gol IV/a	1
	Penata Tk 1, Gol III/d	12
	Penata, Gol III/c	7
Pejabat Fungsional	Dokter Pertama, Gol III/a III/b	44
	Dokter Muda, Gol III/c III/d	23
	Dokter Madya, Gol IV/a-IV/c	35
	Dokter Gigi Pertama, Gol III/a III/b	5
	Dokter Gigi Madya, Gol IV/a-IV/c	26
	Dokter Gigi Utama, Gol IV/d IV/e	1
	Bidan Terampil, Gol II/b – II/d	48
	Bidan Mahir, Gol III/a III/b	5
	Bidan Penyelia, Gol III/c III/d	40
	Bidan Ahli Muda, Gol III/c III/d	1
	Perawat Terampil, Gol II/b – II/d	37
	Perawat Penyelia, Gol III/c III/d	54
	Perawat Muda, Gol III/c III/d	6
	Perawat Madya, Gol IV/a-IV/c	9
	Perawat Pelaksana/Terampil, Gol II/b – II/d	18
	Nutrisionis Mahir, Gol III/a III/b	4
	Nutrisionis Penyelia, Gol III/c III/d	13
	Nutrisionis Muda, Gol III/c III/d	1
	Nutrisionis Madya, Gol IV/a – IV/c	5
	Nutrisionis Terampil, Gol II/b – II/d	20
Tenaga Teknis	Radiografer Pelaksana	4
	Dokter	15
	Perawat, Bidan, Nutrisionis	176
	Total	649

5. Hasil Capaian

Realisasi SPM bidang Kesehatan tahun 2022 disajikan dalam tabel berikut. Sepuluh dari duabelas indikator telah mencapai target 100%, namun untuk indikator pelayanan Kesehatan balita dan usia produktif hanya mencapai 80% dari target.

Tabel 3. 12 Realisasi SPM Urusan Kesehatan tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
2	Pelayanan	Jumlah ibu	100%	Setiap	100%	Jumlah	100%	Setiap	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
	Kesehatan Ibu Bersalin	bersalin yang mendapatkan pelayanan kesehatan		tahun		barang, jasa dan sumber daya manusia		tahun	
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
4	Pelayanan kesehatan Balita	Jumlah balita yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	88,03%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Jumlah anak pada usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	87,13%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Jumlah Warga Negara usia lanjut yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	Jumlah Warga Negara penderita hipertensi usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus usia 15 tahun ke atas yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
11	Pelayanan kesehatan	Jumlah Warga Negara terduga	100%	Setiap	100%	Jumlah barang,	100%	Setiap	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
	orang terduga TB	tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan		tahun		jasa dan sumber daya manusia		tahun	
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus) yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

SPM bidang Kesehatan terdiri dari 12 indikator, sepuluh diantaranya tercapai 100% target yang ditentukan dan terdapat dua indikator yang belum mencapai target 100% yaitu pelayanan Kesehatan balita (88%) dan pelayanan kesehatan pada usia produktif (87%). Tingginya angka capaian ini tak lepas dari berbagai upaya dan strategi yang disusun untuk mencapai target setinggi-tingginya dan mengatasi kendala yang dihadapi.

Tabel 3. 13 Kendala, Permasalahan, dan Solusi dalam SPM Urusan Kesehatan Tahun 2022

NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk segera mengunjungi fasilitas kesehatan apabila terlambat haid, sehingga perlu upaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pendampingan dan pemantauan ibu hamil dengan gerakan P4K	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan ibu hamil, verifikasi dan validasi data ibu hamil di wilayah kerja. 2. Melakukan promosi sosialisasi pentingnya ANC terpadu pada ibu hamil di wilayah 3. Melakukan koordinasi dengan lintas program dan lintas sektor untuk pelayanan kesehatan ibu hamil. 4. Penyediaan sarana dan prasarana untuk layanan ANC terpadu misalnya buku KIA, USG dll 5. Peningkatan Kapasitas SDM untuk layanan ANC melalui pelatihan dan On Job Training. 6. Meningkatkan sinkronisasi sistem surveilans dan pelaporan kesehatan ibu hamil dengan e-kohort
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persalinan di rumah pada kasus - kasus kehamilan yang tidak diinginkan atau disembunyikan, masih adanya ibu hamil dan keluarga yang kurang aware terhadap tanda persalinan.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi dan edukasi tanda bahaya kehamilan dan persalinan 2. Penyediaan sarana prasarana pertolongan persalinan seperti obat dan bahan habis pakai pertolongan persalinan , partograf, 3. Penguatan layanan di Puskesmas PONED. 4. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) untuk pertolongan persalinan dan penanganan kegawatn maternal neonatal melalui pelatihan tim gawat darurat maternal neonatal. 5. Penguatan jejaring rujukan dengan pembinaan ke FKTP dan FKTL.



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
			6. Rujukan kasus kegawatan maternal neonatal dengan PSC 119.
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir	Akses kunjungan neonatal yang belum sesuai waktu dan belum semua standar kualitas pelayanan bayi baru lahir dapat dipenuhi.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan layanan bayi baru lahir dan skrining hipotiroid kongenital 2. Promosi edukasi tanda bahaya bayi baru lahir 3. Penyediaan sarana prasarana layanan kesehatan bayi baru lahir misalnya Vit K, Salp Mata, Hb 0 dll 4. Rujukan kegawatan neonatal 5. Peningkatan kapasitas SDM dalam layanan neonatal melalui pelatihan dan on job training
4	Pelayanan kesehatan Balita	<ol style="list-style-type: none"> 1. Orang tua balita tidak melaporkan hasil pengukuran antropometri yang dilakukan di luar posyandu 2. Pelaksanaan SDIDTK belum sesuai tatakala 3. Sweeping belum berjalan 100% . Balita tidak ditemui saat sweeping posyandu karena sedang di luar kota, sakit, atau pindah domisili 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan pertumbuhan mandiri dan melaporkan ke posyandu 2. Mengedukasi Ibu balita untuk melakukan SDIDTK mandiri dan melaporkan di posyandu 3. Pendataan ulang sasaran balita yang domisili, melakukan kunjungan ulang untuk balita yang tidak ada di tempat saat sweeping
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak anak tidak masuk sekolah saat skrining 2. Sweeping tidak bisa 100% karena bersamaan dengan jam pelajaran 3. Anak tidak hadir saat sweeping 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan lintas sektor terkait Dindik, Kemenag, pemangku wilayah 2. Puskesmas melakukan koordinasi dengan sekolah 3. Sweeping ke sekolah bersamaan dengan sweeping imunisasi
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya dukungan dan koordinasi lintas sektor di wilayah, karena anggapan bahwa masalah kesehatan adalah kegiatan sektor kesehatan 2. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa sehat sehingga enggan melakukan deteksi dini 3. Belum optimalnya koordinasi lintas program, karena banyaknya kegiatan di bidang kesehatan yang memerlukan sumber daya manusia sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa program terkait. Belum optimalnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah 4. Belum optimalnya kerja sama dengan pengelola tempat- tempat kerja di wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan skrining usia produktif di wilayah yang dilaksanakan oleh Puskesmas 2. Mengembangkan Posbindu di wilayah maupun institusi 3. Melakukan koordinasi lintas Sektor dan lintas Program serta melakukan inovasi untuk mendukung program 4. Melakukan Monev pelaksanaan Perwal No. 90 Tahun 2019 tentang RAD Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Tidak semua lansia hadir saat skrining dilakukan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan kunjungan rumah 2. Skrining Kesehatan di dalam gedung
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa sembuh setelah kunjungan pertama, setelah itu enggan melakukan kontrol rutin 2. Belum optimalnya koordinasi lintas program, karena banyaknya kegiatan di bidang kesehatan yang memerlukan sumber daya manusia sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa program terkait 3. Upaya pelayanan Hipertensi terkendala karena Pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berakhir, sehingga masyarakat jarang melakukan kontrol rutin di fasilitas kesehatan 4. Belum optimalnya kerja sama dengan fasilitas kesehatan di wilayah 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan skrining usia produktif di wilayah yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Mengembangkan Posbindu di wilayah maupun institusi. Melaksanakan sistem rujukan dari wilayah ke Puskesmas dan dari Puskesmas ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjut sesuai prosedur 2. Melakukan koordinasi lintas Sektor dan lintas Program 3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan workshop, update knowledge, orientasi petugas dan pelatihan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu) penyakit tidak menular. Melakukan inovasi untuk mendukung program 4. Melakukan Monev pelaksanaan Perwal No. 90 Tahun 2019 tentang RAD Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelaksanaan Pandu penyakit tidak menular (PTM) di Puskesmas serta belum optimalnya kerja sama dengan pengelola tempat-tempat kerja di wilayah 2. Kurangnya partisipasi masyarakat, karena masyarakat merasa sembuh setelah kunjungan pertama, setelah itu enggan melakukan kontrol rutin 3. Belum optimalnya koordinasi lintas program, karena banyaknya kegiatan di bidang kesehatan yang memerlukan sumber daya manusia sehingga perlu kolaborasi dengan beberapa program terkait 4. Upaya pelayanan Diabetes melitus terkendala karena Pandemi Covid 19 belum sepenuhnya berakhir, sehingga masyarakat jarang melakukan kontrol rutin di fasilitas kesehatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan validasi data program, melaksanakan kegiatan skrining usia produktif di wilayah yang dilaksanakan oleh Puskesmas, mengembangkan Posbindu di wilayah maupun institusi dan melakukan koordinasi lintas Sektor dan lintas Program 2. Melaksanakan sistem rujukan dari wilayah ke Puskesmas dan dari Puskesmas ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjut sesuai prosedur 3. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan workshop, update knowledge, orientasi petugas dan pelatihan untuk mendukung kegiatan Pelayanan Terpadu (Pandu) penyakit tidak menular 4. Melakukan Monev pelaksanaan Perwal No. 90 Tahun 2019 tentang RAD Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat (ODGJ)	Belum optimalnya koordinasi lintas sektor dan Kerjasama dengan fasilitas kesehatan dalam upaya pelayanan kesehatan pada ODGJ berat. Keluarga dan masyarakat disekitar penderita ODGJ belum bisa optimal dalam melakukan pemantauan minum obat.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan kegiatan skrining jiwa masyarakat oleh Puskesmas 2. Mengembangkan Tim Pelaksana Kesehatan Jiwa Masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan Siaga Sehat Jiwa 3. Melaksanakan sistem rujukan dari wilayah ke Puskesmas dan dari Puskesmas ke fasilitas Kesehatan tingkat lanjut sesuai prosedur 4. Melakukan koordinasi lintas Sektor 5. Melaksanakan upaya sekolah sehat jiwa 6. Melakukan peningkatan kapasitas SDM melalui kegiatan workshop, update knowledge, orientasi petugas dan pelatihan untuk mendukung kegiatan Pelayanan kesehatan Jiwa 7. Melakukan inovasi untuk mendukung program 8. Melakukan validasi data program 9. Melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan 10. Melakukan monev terhadap Pelaksanaan Perwal Nomor 68 Tahun 2018 tentang RAD Upaya Kesehatan Jiwa & Napza Kota Yogyakarta Th 2018-2022
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum semua lintas sektor dan lintas program terlibat dalam program penanggulangan TBC 2. Pencatatan dan pelaporan kasus TBC belum berjalan real time 3. Masih banyak tenaga kesehatan (dokter, perawat, bidan, analis laboratorium, farmasi, dll) di Klinik, DPM, Puskesmas dan Rumah Sakit belum terpapar program penanggulangan TBC. Belum semua Klinik, dokter praktik mandiri dan Rumah Sakit terlibat dalam program TB sehingga penemuan dan pengobatan kasus TBC di Klinik, dokter praktik mandiri, Rumah Sakit belum semua dilaporkan ke Dinas Kesehatan melalui Sistem Informasi Tuberkulosis (SITB) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Rencana Aksi Daerah (RAD) Penanggulangan TBC agar dapat menggandeng lintas sektor, lintas program dan masyarakat dalam keterlibatan program penanggulangan TBC 2. Meningkatkan kegiatan promosi dan kampanye penanggulangan TBC secara masif 3. Melakukan supervisi dan bimbingan teknis secara rutin ke Klinik, dokter praktik mandiri, Puskesmas dan Rumah Sakit serta melanjutkan Kegiatan Active Case Finding (ACF) TBC dan investigasi kontak TBC pada tahun 2023.
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDs	Beberapa fasilitas kesehatan belum melaksanakan VCT mobile dan melakukan Notifikasi Pasangan pada ODHIV. Selain itu kendala yang dihadapi adalah pencatatan dan pelaporan data pemeriksaan HIV aids yang terkadang tidak tepat waktu atau tidak real time.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat sistem layanan HIV AIDs dan IMS di wilayah Kota Yogyakarta 2. Mewajibkan bagi masing-masing Puskesmas untuk melakukan VCT mobile di wilayah kerjanya per tahun 2023 3. Melakukan koordinasi dengan LSM/komunitas untuk melakukan penjangkauan kelompok berisiko agar bersedia melakukan pemeriksaan



NO	JENIS PELAYANAN DASAR	PERMASALAHAN	SOLUSI
			HIV AIDs di fasilitas kesehatan dan membuat absensi atau reminder kepada petugas RR HIV agar dapat menyelesaikan pelaporan secara tepat waktu

3.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis Pelayanan Dasar Jenis pelayanan dasar SPM pada urusan pekerjaan umum di daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah.

2. Target

Target dalam pelaksanaan SPM tahun 2022 pada urusan pekerjaan umum di daerah kabupaten/kota sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Target Dalam Pelaksanaan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		2	Kualitas air (keruh, berwarna, berasa, berbusa, berbau)	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		3	Jaringan perpipaan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		4	Jaringan bukan perpipaan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		3	Sub-Sistem pengolahan setempat	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100%	Setiap tahun



No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
						daya manusia		
		4	Sub-sistem pengangkutan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		5	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		6	Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun

Pelaksanaan Pelayanan Air Minum di Kota Yogyakarta pada Tahun 2022 sepenuhnya dilakukan oleh PDAM sehingga indikator Kinerja Pencapaian yang terisi hanya jaringan perpipaan saja.

Pelaksanaan Pelayanan Air Limbah Domestik di tahun 2022 Kota Yogyakarta meliputi Peningkatan Kuantitas akses pengolahan limbah domestik, sub sistem pengangkutan dan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), namun untuk sub sistem pengolahan setempat dan sub sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT) pada tahun 2022 tidak dilaksanakan oleh DPUPKP Kota Yogyakarta. Pelayanan sub sistem pengolahan setempat dilakukan masyarakat sendiri dengan membangun tangki septik bagi masyarakat. Kota Yogyakarta tidak mempunyai IPLT namun dalam pengolahan lumpur tinja bekerjasama dengan IPLT Sewon.

3. Anggaran

Alokasi anggaran SPM Pekerjaan Umum dibagi menjadi 2 (dua) program yaitu program pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang diampu oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirtamarta, dan program pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah (SPAL). Alokasi anggaran tersebut seperti pada tabel berikut:



Tabel 3. 15 Anggaran SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta	1,794,427,166,854				
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah	150,939,841,660	8.41 %			
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	2,721,280,000		0.15 %	1.80 %	2,703,658,000 99.35%
Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0				
A. APBN	0				
B. DAK	0				
C. LAINYA	6.655.650.581				5,522,755,894 82.97%

Tabel 3. 16 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Pekerjaan Umum Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
KOTA YOGYAKARTA					2,721,280,000	2,703,658,000	99.35 %
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				0	0	00.00 %
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			0	0	00.00 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis SPAM	Dokumen	0	0	00.00 %
		2	Supervisi pembangunan/peningkatan/perluasan/perbaikan SPAM	Dokumen	0	0	00.00 %
		3	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	Liter/Detik	0	0	00.00 %
		4	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	0	0	00.00 %
		5	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di	Liter/Detik	0	0	00.00 %



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			kawasan Perkotaan				
		6	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	00.00 %
		7	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan	SR	0	0	00.00 %
		8	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	00.00 %
		9	Pembinaan dan pengawasan terhadap tarif Air Minum		0	0	00.00 %
		10	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Badan Usaha untuk kebutuhan sendiri	Badan Usaha	0	0	00.00 %
		11	Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan SPAM oleh Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat	Kelompok Masyarakat	0	0	00.00 %
		12	Fasilitasi penyiapan kerja sama SPAM	Unit	0	0	00.00 %
		13	Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja sama SPAM	Unit	0	0	00.00 %
		14	Pengembangan SDM dan kelembagaan pengelolaan SPAM		0	0	00.00 %
		15	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perkotaan	Unit	0	0	00.00 %
		16	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	0	0	00.00 %
		17	Pembangunan baru SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Rumah Tangga	0	0	00.00 %
		18	Peningkatan SPAM bukan jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	00.00 %
		19	Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan		0	0	00.00 %
		20	Perbaiki SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perkotaan		0	0	00.00 %
		21	Perbaiki SPAM bukan jaringan		0	0	00.00 %



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			perpipaan di kawasan Perdesaan				
JUMLAH INDIKATOR					0	0	00.00 %
JUMLAH PROGRAM					0	0	00.00 %
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				2,721,280,000	2,703,658,000	99.35 %
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			2,721,280,000	2,703,658,000	99.35 %
		1	Penyusunan rencana, kebijakan, strategi dan teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	196,504,000	195,176,000	99.32 %
		2	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Dokumen	0	0	00.00 %
		3	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	00.00 %
		4	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala Kota	Rumah Tangga	0	0	00.00 %
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman	Rumah Tangga	2,400,000,000	2,384,206,000	99.34 %
		6	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	0	0	00.00 %
		7	Pembinaan teknik Pengelolaan Air Limbah Domestik	Orang	0	0	00.00 %
		8	Sosialisasi dan pemberdayaan masyarakat terkait penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik		0	0	00.00 %
		9	Pengembangan SDM dan kelembagaan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	0	0	00.00 %
		10	Operasi dan pemeliharaan Sistem		0	0	00.00 %



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Pengelolaan Air Limbah Domestik				
		11	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik terpusat skala permukiman		124,776,000	124,276,000	99.60 %
		12	Pembangunan/penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah terpusat skala permukiman		0	0	00.00 %
		13	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	0	0	00.00 %
		14	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Dokumen	0	0	00.00 %
		15	Pembangunan/penyediaan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	00.00 %
		16	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Rumah Tangga	0	0	00.00 %
		17	Supervisi pembangunan/rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	Dokumen	0	0	00.00 %
JUMLAH INDIKATOR					2,721,280,000	2,703,658,000	99.35 %
JUMLAH PROGRAM					2,721,280,000	2,703,658,000	99.35 %

Pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk Sistem Penyediaan Air Minum di Kota Yogyakarta sepenuhnya dilayani oleh PDAM, sedangkan kegiatan PDAM belum mengacu pada setiap indikator yang ada di SPM sehingga capaian serapannya belum dapat terisi.



4. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM tahun 2022 pada urusan pekerjaan umum di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 17 Dukungan Personil SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2022

JABATAN	PANGKAT/ GOLONGAN	JUMLAH
Kepala Dinas PUPKP	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembina, IV/a	1
Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	Pembina, IV/a	1
Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tingkat I/III d	1
Pengelola Rencana Pekerjaan Umum dan Perumahan	Penata Muda Tingkat I /III b	2
Penata Penyehatan Lingkungan Kelompok Substansi Penataan Infrastruktur Permukiman	Penata Muda /III a	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	Penata Muda /III a	1
Total		8

5. Hasil Capaian

Tabel 3. 18 Realisasi Capaian SPM Urusan Pekerjaan Umum tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar					Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
1	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	1	Kuantitas (kebutuhan pokok minimal 60 liter/orang/hari)	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Kualitas air (keruh, berwarna, berbau, berbusa, berbau)	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		3	Jaringan perpipaan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%



No.	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
		4	Jaringan bukan perpipaan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
2	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air limbah Domestik	1	Kuantitas akses pengolahan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Kualitas pelayanan air limbah domestik	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		3	Sub-Sistem pengolahan setempat	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		4	Sub-sistem pengangkutan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		5	Sub-sistem pengolahan lumpur tinja (IPLT)	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		6	Pengolahan lumpur tinja (IPAL)	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%



6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Permasalahan dan solusi dalam pelaksanaan SPM tahun 2022 pada urusan pekerjaan umum di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 19 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Bidang Pekerjaan Umum tahun 2022

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> • Pengumpulan data belum bisa menuju ke <i>by name by address</i>, karena terlalu rigid untuk data yang dibutuhkan sesuai dengan acuan dari Kementerian PUPR • Perbedaan data jumlah rumah tangga yang digunakan dalam menghitung capaian layanan antara pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan layanan pengolahan air limbah • Kebijakan penganggaran SPAM di PDAM masih secara umum belum dikhususkan untuk klasifikasi SPM 	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan pendataan terkait SPAM Komunal dan Melakukan indentifikasi pelanggan yang menyambungkan Saluran Air limbah ke Riol Kota. • Melakukan koordinasi terkait data jumlah rumah tangga yang digunakan untuk target dan capaian SPM. • Melaksanakan koordinasi dengan lintas OPD terkait perencanaan dan penganggaran SPM SPAM

3.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

1. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar SPM tahun 2022 pada urusan perumahan rakyat daerah di kabupaten/kota sebagai berikut:

- Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota; dan
- Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota.

2. Target

Tabel 3. 20 Target SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	1	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya	100 %	Setiap tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian						
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
							manusia		
		3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
		4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	
2	Fasilitasi penyediaan rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	
		2	Subsidi Uang Sewa	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	
		3	Penyediaan Rumah Layak Huni	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	

3. Anggaran

Tabel 3. 21 Anggaran SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI Rp %
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta					
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah					
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	0	0%	0 %	0 %	100%



PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI Rp %
Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)	0				
A. APBN	0				
B. DAK	0				
C. LAINYA	0				

Tabel 3. 22 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2022

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
KOTA YOGYAKARTA					0	0	0
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				0	0	0
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota				0	0
		1	Identifikasi perumahan di lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kab/Kota	Dokumen	0	0	0
		2	Identifikasi Lahan potensia sebagai lokasi relokasi perumahan	Dokumen	0	0	0
		3	Pengumpulan data rumah korban bencana kejadian sebelumnya yang belum tertangani	Dokumen	0	0	0
		4	Pendataan tingkat kerusakan rumah akibat bencana	Dokumen	0	0	0
		5	Pendataan dan verifikasi penerima rumah bagi korban bencana alam atau terkena relokasi program Kab/Kota	Dokumen	0	0	0
		6	Pendataan rumah sewa milik masyarakat, rumah susun dan rumah khusus	Dokumen	0	0	0
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0
JUMLAH PROGRAM					0	0	0



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kab/Kota				
		1	Rehabilitasi Rumah Korban Bencana	0	0	0	0
		2	Penyusunan <i>Site Plan</i> dan/atau <i>Detail Engineering Design (DED)</i> bagi Rumah Korban Bencana	0	0	0	0
		3	Pengadaan Lahan untuk Rumah Korban Bencana	0	0	0	0
		4	Pembangunan Rumah Korban Bencana	0	0	0	0
		5	Pembangunan rumah khusus beserta PSU bagi korban bencana atau relokasi program Kab/Kota	0	0	0	0
		6	Operasional dan pemeliharaan lingkungan perumahan pada relokasi program Kab/Kota	0	0	0	0

4. Dukungan Personil

Personil yang terlibat dalam SPM perumahan rakyat di Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 3. 23 Dukungan Personil SPM Urusan Perumahan Rakyat tahun 2022

JABATAN	PANGKAT/GOLO NGAN	JUMLAH
Kepala Dinas PUPKP	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	Pembina, IV/a	1
Analisis Kebijakan Ahli Muda Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman	Pembina, IV/a	1
Perencana Ahli Muda Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	Penata Tingkat I/IIIId	1
Analisis Bangunan dan Perumahan Kelompok Substansi Penataan Perumahan dan Permukiman	Penata Muda /IIIa	1
Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kelompok Substansi Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	Penata Muda /IIIa	1
Total		6



5. Hasil Capaian

Tabel 3. 24 Capaian SPM Urusan Perumahan Rakyat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian							
			Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1	Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota	1	Bantuan Akses rumah sewa layak huni bagi korban bencana	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	100%
		3	Pembangunan kembali rumah bagi korban bencana	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		4	Pembangunan baru di lokasi baru/relokasi korban bencana	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	100%
2	Fasilitasi penyediaan rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota	1	Fasilitasi penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/atau Bangunan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	100%
		2	Subsidi Uang Sewa	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	100%
		3	Penyediaan Rumah Layak Huni	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun	100%



Sesuai dengan aplikasi SPM terkait dengan jenis pelayanan dasar urusan perumahan rakyat di mana tidak terjadi bencana di kabupaten/kota maka untuk capaian SPMnya tidak diperhitungkan. Mendasarkan hal tersebut, pada tahun 2022 di kota Yogyakarta tidak terjadi bencana yang mengharuskan untuk dilakukan penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kab/kota. Demikian pula dalam tiga tahun terakhir, tidak terdapat kejadian bencana yang ditetapkan dalam Surat Keputusan Penetapan Bencana oleh Walikota/Gubernur, sehingga untuk tahun 2022 capaian SPM nya menjadi 100% pada jenis layanan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kab/Kota. Namun demikian apabila sewaktu-waktu terjadi bencana maka bisa mengakses dana Belanja Tidak Terduga (BTT) berdasarkan ketentuan Peraturan Walikota Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Belanja Tidak Terduga.

Sementara itu pada jenis layanan Fasilitasi penyediaan rumah Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kab/Kota, capaian SPM nya juga tidak diperhitungkan atau bisa dikatakan capaian SPM 100% karena tidak ada relokasi pada tahun 2022 di kota Yogyakarta. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan lahan dan belum adanya kebutuhan yang mendesak untuk pelaksanaan relokasi di Kota Yogyakarta.

Meski demikian, Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Yogyakarta melaksanakan Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan Gerakan M3K (Mundur Munggah Madep Kali) untuk permukiman di bantaran sungai dimana masyarakat memundurkan rumahnya sejauh 3 meter dari sungai untuk digunakan sebagai jalan lingkungan dan sarana prasarana permukiman lainnya, seperti: IPAL komunal, saluran drainase, proteksi kebakaran, penerangan jalan umum, dan ruang terbuka hijau. Pemerintah melakukan perbaikan rumah yg mundur tersebut tanpa relokasi sehingga masyarakat dapat tetap tinggal di lokasi tersebut dengan kualitas lingkungan yang lebih layak.



6. Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 25 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Bidang Perumahan Rakyat tahun 2022

PERMASALAHAN	SOLUSI
1. Bencana yang terjadi biasanya dalam skala kecil sehingga tidak memerlukan relokasi.	1. Masih memungkinkan untuk dilakukan mitigasi struktural atau penggunaan teknologi untuk meminimalisir resiko bencana.
2. Luas lahan di Kota Yogyakarta yang sempit dan terbatas sehingga tidak memungkinkan untuk relokasi.	2. Adanya Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya dengan Gerakan M3K (Mundur Munggah Madep Kali) untuk meningkatkan kualitas lingkungan permukiman di bantaran sungai tanpa relokasi

3.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

1. Trantibum

a. Jenis Pelayanan Dasar

Standar Pelayanan Minimal (SPM) Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Trantibum) adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal pada situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tenteram, tertib, dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.

Jenis SPM Trantibum pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- 1) Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum (TRANTIBUM)
- 2) Pelayanan Informasi Rawan Bencana (KEBENCANAAN)
- 3) Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana (KEBENCANAAN)
- 4) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana (KEBENCANAAN)
- 5) Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran (DAMKAR)

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, di mana sub urusan tersebut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 12 ayat (1) termasuk ke dalam Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar. Dalam pelaksanaan ketugasan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, Satpol PP Kota Yogyakarta berpedoman kepada Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan



Minimal serta Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sesuai tugas pokok dan fungsinya dalam kaitannya dengan pemenuhan layanan dasar SPM, Satpol PP merupakan unsur pendukung jenis Pelayanan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Penerima Pelayanan Dasar yaitu Warga Negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan peraturan kepala Daerah untuk Jenis Pelayanan Dasar pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi maupun di Kab Kota. Pemerintah Daerah menerapkan SPM untuk pemenuhan Jenis Pelayanan Dasar dan Mutu Pelayanan Dasar yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Adapun kriteria dari jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum merupakan warga negara yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda Kabupaten/Kota dan perkada.

Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada meliputi :

1. Pelayanan kerugian materil;

Kerugian materil berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Perda dan Perkada, terdiri atas :

- a) Rusak rusak ringan, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan; dan
- b) Rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Perda dan Perkada yang sedang dilakukan.

2. Pelayanan Pengobatan

Pelayanan Pengobatan berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Perda dan Perkada dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

Selain Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Penegakan Perda sesuai Mutu dan pelayanan ganti rugi, harus dipenuhi juga standar Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum Terhadap Jumlah Penegakan Perda sesuai Mutu. Indikator yang digunakan diantaranya meliputi :

1. Standar operasional prosedur Satpol PP;
2. Standar operasional prosedur Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Standar sarana dan prasarana Satpol PP;



4. Standar sarana dan prasarana Satpol PP merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat;
6. Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat merupakan standar teknis terkait standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada.

Dari 2 jenis indikator Kinerja / Jenis layanan SPM tersebut sebenarnya belum terakomodir secara eksplisit di dalam dokumen perencanaan strategis (Renstra) OPD. Akan tetapi indikator kinerja kegiatan pendukung SPM tersebut telah terakomodir di dalam dokumen Rencana Kerja (Renja) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan telah memperlihatkan hubungan dukungan terhadap indikator yang ada di dalam SPM tersebut.

Tabel 3. 26 Jenis Pelayanan Dasar Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022

NO	JENIS LAYANAN	PENERIMA LAYANAN	INDIKATOR	BATAS WAKTU CAPAIAN
	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Warga negara yang terkena dampak gangguan ketenteraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala Daerah kabupaten/kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada	Setiap tahun

b. Target

Target pencapaian adalah target yang ditetapkan oleh Pemerintahan Daerah dalam mencapai SPM selama kurun waktu tertentu, termasuk perhitungan pembiayaannya.



Tabel 3. 27 Target Capaian SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian meteril	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100 %	Setiap tahun
		3	SOP Satpol PP	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		4	Standar sarana dan prasarana Satpol PP	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		6	Stanadar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun

c. Anggaran

Alokasi anggaran adalah jumlah belanja langsung dan tidak langsung yang ditetapkan dalam APBD dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh pemerintahan daerah, yang bersumber dari APBD Pemerintah Kota Yogyakarta. Pada tahun 2022, alokasi anggaran pendukung SPM Pelayanan Sub Urusan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Satpol PP Kota Yogyakarta dengan Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah sejumlah Rp10.795.740.764,00 melalui kegiatan:



- 1) Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- 2) Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota
- 3) Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota

Realisasi penerapan SPM Satpol PP dalam pemenuhan pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum serta pemenuhan mutu layanan/ Barang/ SDM pada tahun 2022 sejumlah Rp10.234.831.991,00 atau tercapai 94,80% dari target anggaran pendukung pelayanan trantibum Satpol PP Tahun 2022. Dari beberapa kegiatan pendukung SPM, terdapat sub kegiatan yang capaian realisasi keuangan sebesar 0% yakni pada sub kegiatan Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. Capaian realisasi tersebut bukan berarti kinerja pemenuhan pelayanan dasar SPM tidak optimal. Hal tersebut justru menunjukkan bahwa kinerja Satpol PP dalam upaya penegakan perda dan perkada telah sesuai dengan SOP dan ketentuan yang berlaku dengan tidak adanya warga negara yang terdampak kerugian akibat penegakan perda dan perkada.

Tabel 3. 28 Anggaran SPM Urusan Trantibum tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI (Rp %)
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA	1.790.427.166.854,00				
ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	Rp38.099.858.598,00				
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	Rp10.795.740.764,00	2,13%	0,6 %	28,34%	Rp10.234.831.991,00 94,80%
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SU MBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN					



PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI (Rp %)
LAIN-LAIN)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINYA					

Tabel 3. 29 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM
Urusan Trantibum Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	SERAPAN (%)
KOTA YOGYAKARTA							
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM				10.795.749.764	10.234.831.991	94,80%
	1	Penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) daerah Kab/Kota			2.037.468.252	1.752.438.585	86,01%
		1	Koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat tingkat Kabupaten/Kota	Dokumen	45.505.000	45.305.000	99,56%
		2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	212.221.132	192.599.960	90,75%
		3	Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ketentraman dan ketertiban umum	Unit	1.729.742.120	1.514.533.625	87,56%
		4	Penyediaan layanan dalam rangka dampak penegakan Peraturan Daerah dan Perkada	Laporan	50.000.000	0	0%
	2	Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota			8.751.292.512	8.475.413.406	96,85%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN (Rp)	PELAKSANAAN (Rp)	SERAPAN (%)
		1	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	8.437.166.664	8.175.834.493	96,90%
		2	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota	Laporan	314.125.848	299.578.913	95,37%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			6.980.000	6.980.000	100%
		1	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Laporan	6.980.000	6.980.000	100%
JUMLAH INDIKATOR					10.795.749.764	10.234.831.991	94,80%
JUMLAH PROGRAM					10.795.749.764	10.234.831.991	94,80%

d. Dukungan personil

Pegawai di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Yogyakarta tahun 2022 di luar tenaga alih daya (*outsourcing*) sejumlah 220 pegawai yang terdiri dari 129 Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil, 1 Pegawai PPPK, dan 90 Tenaga Teknis.

Tabel 3. 30 Dukungan Personil SPM Urusan Trantibum Tahun 2022

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Tingkat I, IV/b	1
Sekretaris	Pembina, IV/a	1
Kepala Bidang	Pembina, IV/a	3
	Penata Tingkat I, III/d	1
Kepala Seksi	Penata Tingkat I, III/d	7
	Penata, III/c	2
Kepala Subbagian	Penata Tingkat I, III/d	2
	Penata, III/c	1
Staf	Penata Muda Tingkat I, III/b	2
	Penata Muda, III/a	1
	Pengatur Tingkat I, II/d	1
	Pengatur, II/c	2
	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	1
	PPPK VII	1
	Penata Muda Tingkat I, III/b	2
	Penata Muda, III/a	2
	Penata Muda Tingkat I, III/b	1
	Pengatur Tingkat I, II/d	1
	Penata Muda, III/a	1
	Pengatur Tingkat I, II/d	1
	Penata Muda, III/a	1
	Penata Muda Tingkat I, III/b	1
	Penata Muda, III/a	1
	Penata Muda, III/a	1
	Pengatur Tingkat I, II/d	1
Pejabat Fungsional	Pembina, IV/a	1
	Penata Tingkat I, III/d	2
	Penata Muda, III/a	4
	Penata Muda Tingkat I, III/b	2
	Pengatur Tingkat I, II/d	49
	Pengatur, II/c	6



JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
	Pengatur Muda Tingkat I, II/b	4
Pejabat Fungsional (CPNS)	Ahli Pertama, III/a	3
	Pengatur, II/c	20
Tenaga Orang Perseorangan (Pihak Ketiga)		90
Total		220

e. Hasil Capaian

Realisasi adalah target yang dapat dicapai atau direalisasikan oleh Pemerintahan Daerah selama 1 (satu) tahun anggaran dan membandingkannya dengan rencana target yang ditetapkan sebelumnya oleh pemerintahan daerah yang bersangkutan.

Tabel 3. 31 Realisasi SPM Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian							
			Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1	Pelayanan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian meteril	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Warga negara yang memperoleh pelayanan kerugian pelayanan pengobatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		3	SOP Satpol PP	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		4	Standar sarana dan prasarana Satpol PP	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		5	Standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota Perlindungan Masyarakat	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		6	Standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
		terhadap pelanggaran Perda dan Perkada							

Memperhatikan tabel di atas capaian atas indikator sasaran SPM bagi daerah yang menyelenggarakan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dalam hal ini Satpol PP Kota Yogyakarta adalah 100% dalam hal ini tidak ada Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan sasaran dari Satpol PP Kota Yogyakarta Kualitas penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat meningkat dengan indikator Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat tidak menimbulkan dampak yang merugikan bagi warga masyarakat Kota Yogyakarta seperti yang dimaksudkan dalam indikator sasaran SPM. Demikian juga pencapaian mutu barang/ Jasa/ SDM telah tercapai 100% dengan capaian realisasi sesuai dengan yang ditargetkan pada tahun berjalan. Capaian SPM tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor pendorong diantaranya adalah penerapan strategi penegakan perda melalui upaya :

- Pre-emptif (penangkalan) :
 - Pembinaan dan Pengembangan kapasitas SDM aparat Pol PP dan Linmas berupa pengkajian peraturan perundang-undangan termasuk juga SOP, pembekalan pengetahuan bagi petugas operasional baik *soft skill* melalui pemahaman peraturan perundang-undangan dan *hard skill* kegiatan kesamaptaan
 - Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk patuh dan taat terhadap peraturan perundang-undangan dengan bersama-sama kelompok masyarakat menyusun kesepakatan dalam mewujudkan ketenteraman dan ketertiban lingkungan melalui Gerakan Kampung Panca Tertib
 - Menjalin kerjasama dengan stakeholder/komunitas yang peduli dengan Kota Yogyakarta untuk bersama-sama menjaga ketentraman dan ketertiban
- Preventif : Melalui fungsi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai pentingnya mematuhi Perda dan Perkada melalui kegiatan: operasi pembinaan pelajar, monitoring dan pembinaan kamling di wilayah kecamatan, penugasan anggota Satpol PP di kecamatan dalam bentuk Bawah Kendali Operasi (BKO), melakukan fasilitasi terhadap kegiatan perlindungan masyarakat (pembekalan, kesamaptaan, dan pelatihan rescue)
- Represif : Melakukan operasi penegakan perda baik secara yustisi maupun non yustisi dengan berpedoman pada peraturan dan Standar Operasi Prosedur (SOP)



f. Kendala, Permasalahan, dan solusi

Tabel 3. 32 Kendala, Permasalahan, dan Solusi SPM Urusan Trantibum tahun 2022

PERMASALAHAN	SOLUSI
<ul style="list-style-type: none"> Proses pengumpulan data terutama pada Form 5.A.1 dan 5.A.2 terkait dengan pemetaan rekapitulasi jumlah WN (<i>By Name By Address</i>) dan aset WN yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada 	<ul style="list-style-type: none"> Pengumpulan data dengan menggunakan metode sampling data
<ul style="list-style-type: none"> Dokumen administrasi perencanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung pelayanan SPM belum tersinkronisasi secara langsung dan tersurat dalam dokumen RPJMD dan renstra 	<ul style="list-style-type: none"> Memasukkan rencana kegiatan dan anggaran pemenuhan SPM dalam dokumen rencana kinerja (Renja) dan rencana anggaran (DPA) sesuai dengan nomenklatur sub kegiatan yang ada pada Kepmendagri 059/5889
<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan mutu pelayanan dasar SPM terkadang terkendala masalah penganggaran di tingkat Pemerintah Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> pengadaan dan pemenuhan kebutuhan mutu pelayanan dasar dilaksanakan secara bertahap dan melihat prioritas kebutuhan
<ul style="list-style-type: none"> Kurang jelasnya aturan teknis pelaksana terkait dengan indikator yang ada di dalam permendagri yang mengatur tentang SPM khususnya Bidang Trantibumlinmas 	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi secara intensif dengan Ditjen Kemendagri Pengampu SPM khususnya Bidang Trantibumlinmas

Di dalam pelaksanaan ketugasan penyelenggaraan sub urusan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan mutu SPM pelayanan dasar ketenteraman dan ketertiban umum, Satpol PP Kota Yogyakarta tidak mengalami kendala dalam penegakan perda dan perkada bahkan yang mengakibatkan kerugian masyarakat karena dalam pelaksanaan ketugasan selalu berpedoman pada SOP kegiatan dan lebih mengutamakan upaya persuasif. Penegakan perda dan perkada lebih memprioritaskan strategi secara preemtif dan preventif dalam pelaksanaannya. Bahkan berdasarkan Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta dan Perwal 101 Tahun 2016 tentang Perubahan Perwal No 22 Tahun 2015 tentang Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta, Satpol PP telah memunculkan inovasi yang mampu menunjang tugas dan fungsi OPD yakni mewujudkan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta penegakan perda dan perkada melalui Gerakan Kampung Panca Tertib Kota Yogyakarta.

Gerakan Kampung Panca Tertib adalah aktivitas sosial berbasis kampung yang dilakukan secara dinamis dan terus menerus yang dilakukan oleh masyarakat melalui forum kampung panca tertib dan didukung oleh pelopor ketertiban dan duta ketertiban.



Forum panca tertib ini merupakan media pertemuan tokoh masyarakat di lingkungan kampung, seperti pengurus RT, RW, PKK, Karang Taruna, pelopor ketertiban, perlindungan masyarakat, dan unsur lainnya. Gerakan Panca Tertib meliputi Tertib Daerah Milik Jalan, Tertib Bangunan, Tertib Usaha, Tertib Lingkungan, dan Tertib Sosial. Gerakan ini merupakan upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan penertiban. Penertiban oleh masyarakat secara mandiri diperlukan. Dalam perkembangannya, strategi penegakan perda secara pre-emptif dan preventif ini menunjukkan trend positif yang dapat dilihat dari animo masyarakat, terutama di kampung yang semakin antusias dalam keterlibatan Gerakan Kampung Panca Tertib.

Permasalahan justru terdapat pada proses pengumpulan data berdasarkan kegiatan Penegakan Perda sejauh ini ditemukan beberapa kendala, terutama pada Form 5.A.1 dan 5.A.2 terkait dengan pemetaan rekapitulasi jumlah WN dan aset yang berada dalam radius 0-50 meter di lokasi penegakan perda dan perkada. Satpol PP Kota Yogyakarta melaksanakan tugas dan fungsi penegakan peraturan perundang-undangan mencakup seluruh wilayah Kota Yogyakarta dan bukan hanya pada satu atau beberapa titik terjadinya pelanggaran perda dan perkada. Jadi apabila diminta untuk mendata WN dan Aset seperti dimaksud form di atas artinya WN dan aset di Kota Yogyakarta juga harus diidentifikasi seluruhnya. Diharapkan ada kajian secara lebih terinci dari sisi peraturan terkait hal tersebut. Selain itu dari aspek penghitungan kebutuhan, belum terdapat informasi atau peraturan teknis terkait indikator standar minimal yang menjadi dasar penghitungan kebutuhan mutu minimal layanan trantibum, seperti berapa jumlah dan jenis SOP yang harus ada, berapa minimal diklat teknis yang ideal diadakan dan harus diikuti berapa orang dalam satu instansi, sarpras ideal yang harus ada (Permendagri No 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak PNS, Penyediaan Sarana Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional, dan Penghargaan Satpol PP) apakah harus dipenuhi seluruhnya atau menyesuaikan kebutuhan dan lingkungan kerja Satpol PP di wilayah masing-masing.

Dari aspek perencanaan dan penganggaran, dokumen administrasi perencanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung pelayanan SPM belum tersinkronisasi secara langsung dan tersurat dalam dokumen RPJMD dan renstra. Meskipun selama satu dekade terakhir tidak terdapat warga negara yang terdampak kerugian akibat penegakan perda dan perkada, diperlukan perencanaan kegiatan dan anggaran yang mendukung optimalisasi pemenuhan SPM Bidang Trantibumlinmas sesuai dengan amanat peraturan perundang-undangan. Kegiatan dan anggaran pemenuhan SPM ganti kerugian terhadap warga negara yang terkena dampak penegakan perda dan perkada secara tersurat telah terdapat dalam dokumen rencana kinerja (Renja) dan perencanaan anggaran (DPA) tahun 2022 dengan nomenklatur kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada. Selain itu terkait dengan pengadaan sarpras pendukung dan indikator pemenuhan kebutuhan pelayanan yang lain, dilaksanakan



secara bertahap dan melihat prioritas kebutuhan karena juga harus mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.

Kurang jelasnya aturan teknis pelaksana terkait dengan indikator yang ada di dalam permendagri yang mengatur tentang SPM khususnya Bidang Trantibumlinmas juga menimbulkan multitafsir terhadap maksud yang dikehendaki dalam aturan tersebut sehingga kesulitan dalam penugasan laporan. Secara umum permasalahan penerapan SPM khususnya bidang urusan trantibum terdapat pada peraturan dan petunjuk teknis pelaksanaan yang kurang dapat memberikan pedoman secara jelas. Hal tersebut telah disampaikan kepada Kemendagri yang khusus mengampu urusan trantibum baik melalui rapat koordinasi teknis dan penghimpunan/inventarisasi permasalahan. Namun sampai dengan pelaporan SPM ini disusun belum terdapat solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut di atas. Diharapkan proses penajaman peraturan teknis pelaksanaan SPM dapat disempurnakan pada tahapan pelaksanaan SPM Bidang Trantibum pada tahun selanjutnya.

2. Kebencanaan

a. Jenis Pelayanan Dasar

SPM Kebencanaan mempunyai 3 (tiga) Jenis Pelayanan Dasar yaitu:

1. Pelayanan Informasi Rawan Bencana;
2. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana;
3. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana.

b. Target Pencapaian SPM oleh Daerah

Tabel 3. 33 Target SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 dokumen	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	1 dokumen	Setiap tahun
		2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1 dokumen	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	1 dokumen	Setiap tahun
		3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	44.393 orang	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	44.393 orang	Setiap tahun
		4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	432 buah	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	432 buah	Setiap tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		5	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1 dokumen	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	1 dokumen	Setiap tahun
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	236 unit	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	236 unit	Setiap tahun
		2	Peningkatan kapasitas personil/Sumber Daya Manusia (SDM)	285 orang	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	285 orang	Setiap tahun
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 kali	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	1 kali	Setiap tahun
		2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	607 orang	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	607 orang	Setiap tahun
		3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	(tidak ada penetapan KLB)	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	(tidak ada penetapan KLB)	Setiap tahun
		4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	(tidak ada penetapan KLB)	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	(tidak ada penetapan KLB)	Setiap tahun
		5	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	606 orang	Setiap tahun	Jumlah mutu barang, jasa dan sumber daya manusia	606 orang	Setiap tahun

c. Anggaran

Dukungan anggaran untuk pencapaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana adalah sebagai berikut:



Tabel 3. 34 Anggaran SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI (Rp %)
Alokasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta					
Alokasi Anggaran Satker Perangkat Daerah					
Alokasi Anggaran Penerapan SPM Pada Satker PD	9.303.005.227	9.303.005.227	9.303.005.227	9.303.005.227	8.771.864.717 (94,29%)
Alokasi Anggaran Penerapan Spm Sumber Lainnya Yang Sah Dan Tidak Mengikat (Contoh : Dana Desa, Kerjasama, Dana Bagi Hasil Dan Lain-Lain)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINYA					

Tabel 3. 35 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022

NO	PRO-GRAM	KEG	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
KOTA YOGYAKARTA							
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						
	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	Rp. 200.000.000,-	Rp. 196.878.000,-	98,44%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						
	1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota					
		1	Penyusunan kajian risiko bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		2	Sosialisasi,	Orang			



NO	PRO-GRAM	KEG	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)				
	2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana					
		1	Penyusunan rencana penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		2	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Orang	Rp. 378.155.625,-	Rp. 355.013.200,-	93,88%
		3	Pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana kesiapsiagaan terhadap bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 3.031.281.540,-	Rp. 2.752.294.609,-	90,79%
		4	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Unit			
		5	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan	Dokumen			
		6	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	Rp. 3.242.771.330,-	Rp. 3.175.225.264,-	97,91%
		7	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 731.659.440,-	Rp. 689.484.632,-	94,23%



NO	PRO-GRAM	KEG	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			ta				
		8	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	Rp. 94.177.500,-	Rp. 93.078.250,-	98,83%
		9	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen			
		10	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang			
		11	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen			
		12	Pelatihan keluarga tanggap bencana alam				
	3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					
		1	Respon cepat Kejadian Luar Biasa penyakit/wabah Zoonosis prioritas	Laporan			
		2	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 1.527.813.792,-	Rp. 1.435.497.962,-	93,95%
		3	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang			
		4	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	Rp. 297.146.000,-	Rp. 271.297.800,-	91,30%
		5	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	Laporan			



NO	PRO-GRAM	KEG	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
		6	Respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit	Dokumen			
4		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana					
		1	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		2	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			
		4	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen			
		5	Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Laporan			
		6	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	Dokumen			

d. Dukungan Personil

Untuk pencapaian SPM, BPBD Kota Yogyakarta didukung oleh personil tenaga operasional mobil jenazah, tenaga operasional Pusdalops, tenaga pendamping PB wilayah, tenaga Tim Reaksi Cepat serta tenaga operasional PB dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 36 Personil yang Menangani SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda, IV/c	1
Kepala Urusan	Pembina IV/a	1
	Pembina IV/a	1



JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Sekretaris	Pembina Tingkat I IV/b	1
Kepala Seksi	-	0
	-	0
Kepala Subbagian	Pembina IV/a	1
	Penata Tingkat I III/d	1
Sub Koordinator	Penata III/c	1
	Penata Tingkat I III/d	1
	Penata III/c	1
Ka UPT		-
Ka TU		-
Staf	Pengatur Tingkat I II/d	4
	Penata Muda Tingkat I III/b	2
	Penata Tingkat I III/d	1
	Pengatur II/c	5
	Penata Muda III/a	4
	Penata III/c	1
Pejabat Fungsional	Penata III/c	1
	Penata Tingkat I III/d	1
Naban		0
Tenaga Teknis		72
Total		100

No	Nama Jabatan	Jumlah Personil
1	Tenaga Penanganan Bencana Operasional Mobil Jenazah	13
2	Tenaga Penanganan Bencana Pusdalops PB	17
3	Tenaga Penanganan Bencana Tim Reaksi Cepat PB	24
4	Tenaga Penanganan Bencana Pendamping PB	15
5	Tenaga Operasional Penanganan Bencana	32
Jumlah Total		101

e. Hasil Capaian

Pada tahun 2022, hasil capaian SPM Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Sub Urusan Bencana Kota Yogyakarta, adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 37 Capaian SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
1	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian Risiko Bencana	1 dokumen	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	1 dokumen	Setiap tahun	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
		2	Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana	1 dokumen	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	1 dokumen	Setiap tahun	100%
		3	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana	44.393 orang	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	44.393 orang	Setiap tahun	100%
		4	Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	432 buah	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	432 buah	Setiap tahun	100%
		5	Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana	1 dokumen		100%		1 dokumen		100%
2	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1	Sarana prasarana penanggulangan bencana	236 unit		100%		236 unit		100%
		2	Peningkatan kapasitas personal/Sumber Daya Manusia (SDM)	285 orang		100%		285 orang		100%
3	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	1	Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	1 kali		100%		1 kali		100%
		2	Pendataan terhadap warga yang terkena/menjadi korban bencana	607 orang		100%		607 orang		100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
		3	Melakukan respon cepat KLB dan respon cepat darurat bencana	(tidak ada penetapan KLB)		100%		(tidak ada penetapan KLB)		100%
		4	Respon Cepat kejadian luar biasa (KLB) penyakit KLB/wabah zoonosis prioritas	(tidak ada penetapan KLB)		100%		(tidak ada penetapan KLB)		100%
		5	Pelaksanaan pencarian / pertolongan evakuasi korban bencana	606 orang		100%		606 orang		100%

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Secara keseluruhan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan SPM Sub Urusan Bencana di Kota Yogyakarta pada tahun 2022, yaitu:

Tabel 3. 38 Kendala, Permasalahan dan Solusi SPM Trantibum Urusan Kebencanaan tahun 2022

PERMASALAHAN	SOLUSI
<p>a. Mekanisme dan ketentuan alur pengolahan dan penyampaian data dan informasi dengan melibatkan seluruh unsur BPBD dan lintas sektoral;</p> <p>b. Jumlah alat pemantau permukaan sungai secara kuantitas masih kurang;</p> <p>c. Jumlah pemasangan petunjuk jalur evakuasi dan titik kumpul belum mencakup keseluruhan fasilitas-fasilitas umum dan penting di Kota Yogyakarta;</p> <p>d. KRB belum dilegalkan oleh kepala daerah; dan</p> <p>e. Pengumpulan data dasar dalam laporan SPM untuk identitas lengkap penduduk dan sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.</p>	<p>a. Pembuatan SIM Penanggulangan Bencana bekerjasama dengan Kominfo Kota Yogyakarta yang dimulai pada tahun 2022 - 2023;</p> <p>b. Menambah alat telemetri dan EWS (<i>Early Warning System</i>) sungai pada semua sungai yang mengalir di kota secara bertahap dan Pemeliharaan EWS secara berkala;</p> <p>c. Peningkatan koordinasi lintas sektoral terkait pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul dan Penganggaran pemasangan jalur evakuasi dan titik kumpul dilaksanakan secara bertahap;</p> <p>d. Konsultasi ke bagian hukum dan Mendagri, KRB akan dilegalkan bersamaan dengan RPB (Rencana Penanggulangan Bencana) yang disusun tahun 2023; dan</p> <p>e. Melaksanakan Perjanjian Kerjasama</p>



PERMASALAHAN	SOLUSI
	dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta terkait dengan data agregat penduduk dan akan dilakukan komunikasi dan koordinasi lintas pihak terkait arah dan kebijakan Penanggulangan Bencana (PB) di Kota Yogyakarta, termasuk SPAB, melalui review dokumen RPB (Rencana Pembangunan Bencana) yang dianggarkan dalam anggaran tahun 2023.

3. Kebakaran

a. Jenis Pelayanan Dasar

Jenis pelayanan dasar pada urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat yaitu pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran, dengan paling sedikit memuat :

- 1) Layanan respon cepat (*response time*) penanggulangan kejadian kebakaran
- 2) Layanan pelaksanaan pemadaman dan pengendalian kebakaran
- 3) Layanan pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi
- 4) Layanan pemberdayaan masyarakat/relawan kebakaran
- 5) Layanan pendataan, inspeksi dan investigasi pasca kebakaran

b. Target Pencapaian SPM Bidang Kebakaran

Tabel 3. 39 Target pencapaian SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022

No.	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun



c. Anggaran

Pada tahun 2022 alokasi anggaran dalam rangka penerapan dan pencapaian SPM oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta sebesar Rp8.910.295.310,00 (Delapan Milyar Sembilan Ratus Sepuluh Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).

Tabel 3. 40 Alokasi anggaran untuk kegiatan SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA					
ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH					
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	Rp. 8.910.295.310,-		0,50%	1,55%	Rp. 8.143.501.276,00
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SUMBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)					
A. APBN					
B. DAK					
C. LAINYA					

Tabel 3. 41 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
KOTA YOGYAKARTA					Rp. 19,906,036,074	Rp. 18,378,333,267	92,33%
1	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN				Rp. 8.910.295.310,-	Rp. 8.143.501.276,-	91,39%



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
	1	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Rp. 8.006.764.560,-	Rp. 7.353.437.886,-	91,84%
		1	Pencegahan kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 1.492.359.000,-	Rp. 1.312.435.061,-	87,94%
		2	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 6.232.360.560,-	Rp. 5.800.214.050,-	93,07%
		3	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	Rp. 260.500.000,-	Rp. 220.951.775,-	84,82%
		4	Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	Rp. 21.545.000,-	Rp. 19.837.000,-	92,07%
		5	Standarisasi sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Unit			
		6	Pengadaan sarana dan prasarana pencegahan, penanggulangan kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Dokumen			
		7	Pembinaan aparatur pemadam kebakaran	Dokumen			
		8	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Unit			
		9	Penyelenggaraan kerja sama dan koordinasi antar daerah berbatasan, antar lembaga, dan	Orang			



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			kemitraan dalam pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran				
		10	Pelatihan keluarga tanggap bencana rumah tangga	Dokumen			
	2	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			Rp. 276.896.000,-	Rp. 267.359.090,-	96,57%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan	Rp. 276.896.000,-	Rp. 267.359.090,-	96,57%
		2	Penilaian sarana prasarana proteksi kebakaran	Laporan			
	3	Investigasi Kejadian Kebakaran			Rp. 37.700.000,-	Rp. 36.820.000,-	97,67%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	Rp. 37.700.000,-	Rp. 36.820.000,-	97,67%
	4	Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran			Rp. 588.961.750,-	Rp. 485.884.300,-	82,50%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	Rp. 588.961.750,-	Rp. 485.884.300,-	82,50%
		2	Pembentukan dan pembinaan relawan pemadam kebakaran				
		3	Dukungan pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran melalui penyediaan sarana dan	Dokumen			



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			prasarana				
	5	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia					
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, dan/atau mengancam keselamatan manusia	Laporan			
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen			
		3	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit			
		4	Pembinaan aparatur pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan			

d. Dukungan Personil

Tabel 3. 42 Personil Yang Terlibat SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	IV/b	1
Kepala Bidang	IV/b	2
Sekretaris	IV/b	1
Kepala Seksi	IV/a	2
	III/d	1
	III/c	1
Kepala Subbagian	III/d	2
Staf	III/d	1
	III/c	1
	III/b	3
	III/a	1



JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
	II/d	12
	II/c	3
	II/b	3
Pejabat Fungsional	III/b	3
	II/d	6
	II/c	4
	II/b	2
Naban	-	18
Tenaga Teknis	-	36
Relawan Pemadam Kebakaran	-	756
Total		859

e. Hasil Capaian

Tabel 3. 43 Realisasi capaian SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
1	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran	1	Tingkat waktu tanggap (<i>response time</i>) 15 menit sejak diterimanya informasi/laporan sampai tiba lokasi	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Prosedur operasional penanganan kebakaran, penyelamatan, dan evakuasi	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		3	Sarana prasarana pemadam kebakaran, penyelamatan dan evakuasi	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		4	Kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan/ sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%

f. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 44 Kendala, pemmasalahan dan solusi SPM Trantibum Urusan Kebakaran tahun 2022

Permasalahan	Solusi
<ul style="list-style-type: none"> - Kepadatan lalu lintas mempengaruhi pemenuhan <i>response time</i> yang belum ideal. - Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta baru memiliki 1 pos sektor, sedangkan idealnya 4 pos sektor. - Masih kurangnya pemahaman tentang pencegahan kebakaran dan penanganan awal 	<ul style="list-style-type: none"> - Perlunya penyediaan alat <i>priority vericle</i>, berupa alat tambahan yang dipasang di unit mobil pemadam kebakaran maupun mobil ambulance yang secara otomatis mengatur lampu lalu lintas menjadi hijau yang dilalui oleh mobil pemadam kebakaran. Untuk tahun 2022 baru tersedia 1 unit terpasang di mobil



Permasalahan	Solusi
kebakaran pada masyarakat, dunia usaha dan sekolah-sekolah.	<p>pemadam kebakaran, sedangkan alat pembacanya baru ada di perempatan wirobrajan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Perlunya penambahan pos sektor di 3 lokasi - Dilakukan penyuluhan dan edukasi kebakaran pada masyarakat, dunia usaha dan sekolah-sekolah secara berkelanjutan.

3.6 BIDANG URUSAN SOSIAL

Urusan sosial di Kota Yogyakarta yang telah ditetapkan SPM nya meliputi:

1. Jenis pelayanan Dasar

Jenis – jenis pelayanan dasar yang diselenggarakan diantaranya adalah:

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial
- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial
- d. Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial
- e. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana.

2. Target Pencapaian

Target dalam pencapaian SPM tahun 2022 pada urusan sosial di Pemerintah Kota Yogyakarta adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 45 Target Capaian SPM Urusan Sosial tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		3	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	-	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	-	Setiap tahun
		4	Penyediaan permakanan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100%	Setiap tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian						
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
							daya manusia		
		5	Penyediaan sandang	-	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	-	Setiap tahun	
		6	Penyediaan alat bantu	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
		7	Penyediaan perbekalan kesehatan	-	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	-	Setiap tahun	
		8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
		9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	100%			100%		
		10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-			-		
		11	Akses ke layanan pendidikan	-			-		
		12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-			-		
		13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	-			-		
		14	Layanan rujukan	100%			100%		
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-			-		
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	
		2	Penyediaan permakanan	100%			100%		
		3	Penyediaan sandang	100%			100%		



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		4	Penyediaan alat bantu	-			-	
		5	Penyediaan perbekalan kesehatan	100%			100%	
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%			100%	
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-			-	
		8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%			100%	
		9	Akses ke layanan pendidikan	100%			100%	
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%			100%	
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%			100%	
		12	Layanan rujukan	100%			100%	
		13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%			100%	
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	-			-	
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-			-	
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah	100%			100%	



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
			memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti					
		3	Penyediaan permakanan	100%			100%	
		4	Penyediaan sandang	100%			100%	
		5	Penyediaan alat bantu	100%			100%	
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan	100%			100%	
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%			100%	
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-			-	
		9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-			-	
		10	Akses ke layanan pendidikan	-			-	
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%			100%	
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%			100%	
		13	Layanan rujukan	100%			100%	
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-			-	
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	-			-	
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%			100%	
		3	Penyediaan permakanan	100%			100%	
		4	Penyediaan sandang	100%			100%	
		5	Penyediaan alat bantu	-			-	
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan	-			-	
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	-			-	
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	-			-	
		9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	-			-	
		10	Akses ke layanan pendidikan	-			-	
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	-			-	
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%			100%	
		13	Layanan Rujukan	100%			100%	
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	-			-	
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	-			-	
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada	1	Penyediaan permakanan	100%	Setiap tahun	Jumlah barang, jasa dan sumber	100%	Setiap tahun



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian					
			Penerima Pelayanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar		
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian
	Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota					daya manusia		
		2	Penyediaan sandang	100%			100%	
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%			100%	
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%			100%	
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	100%			100%	

3. Alokasi Anggaran

a. Alokasi Anggaran dari pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti Sosial adalah Rp.203.426.120,00 (APBD Kota) dan Rp.20.750.000,00 (APBD DIY) dan terealisasi sebesar Rp. 199.182.120,00 atau tercapai 97,91 % (APBD Kota Yogyakarta) dan Rp.20.750.000,00 atau tercapai 100% (APBD DIY) dengan rincian sebagai berikut :

- Alokasi anggaran dari Penyediaan alat bantu sebesar Rp.51.500.000,00 (APBD Kota Yogyakarta) dan Rp.20.750.000,00 (APBD DIY). Adapun realisasi anggaran penerapan SPM adalah sebesar Rp.47.256.000,00 atau tercapai 91,76% (APBD Kota Yogyakarta) dan Rp.20.750.000,00 atau tercapai 100% (APBD DIY).
- Alokasi anggaran dari Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebesar Rp81.701.120,00 dengan realisasi sebesar Rp. 81.701.120,00 atau tercapai 100%.
- Alokasi anggaran dari Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial sebesar Rp70.225.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 70.225.000,00 atau tercapai 100%.

b. Alokasi Anggaran dari pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Luar Panti Sosial adalah Rp702.510.920,00 dan teralisasi sebesar Rp.614.136.520,00 dengan rincian sebagai berikut:

- Alokasi anggaran dari Penyediaan Permakanan sebesar Rp246.238.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.211.829.000,00 atau tercapai 86,03%. Hal ini disebabkan oleh pembelanjaan makanan sesuai dinamika jumlah anak pada UPT RPA Wiloso Projo.



- Alokasi anggaran dari Penyediaan Sandang sebesar Rp49.232.000,00. Adapun realisasi anggarannya sebesar 42.861.000,00 atau tercapai 87,06%. Anggaran tidak terealisasi secara keseluruhan dikarenakan pembelanjaan sandang sesuai dinamika jumlah anak pada UPT RPA Wiloso Projo.
 - Alokasi anggaran dari Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial sebesar Rp51.500.000,00 dan teralisasi sebesar Rp.47.256.000,00 atau tercapai 91,76%.
 - Alokasi anggaran dari Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas, Anak terlantar, Lanjut Usia terlantar serta Gelandangan dan Pengemis di luar Panti Sosial sebesar Rp202.844.720,00. Adapun realisasinya adalah sebesar Rp.202.844.720 atau tercapai 100%.
 - Alokasi anggaran dari Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak sebesar Rp4.380.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.4.380.000,00 atau tercapai 100%.
 - Alokasi anggaran dari Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar sebesar Rp142.900.000,00 dengan realisasi sebesar Rp.99.549.600,00 atau tercapai 69,66%. Hal ini disebabkan karena pemberian uang sumbangan operasional sekolah sesuai dinamika jumlah anak pada UPT RPA Wiloso Projo.
 - Alokasi anggaran dari Pemberian Layanan Penelusuran Keluarga sebesar Rp3.576.200,00 dan teralisasi sebesar Rp.3.576.200,00 atau tercapai 100%.
 - Alokasi anggaran dari Pemberian Layanan Rujukan sebesar Rp1.840.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.840.000,00.
- c. Alokasi Anggaran dari pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti Sosial adalah Rp.2.281.729.349,00 (APBD Kota Yogyakarta) dan Rp.11.152.800,00 (APBN), Adapun realisasi anggarannya sebesar Rp.1.969.785.972,00 atau tercapai 86,33% (APBD Kota Yogyakarta) dan Rp.11.152.800.000,00 atau tercapai 100% (APBN), dengan rincian sebagai berikut:
- Alokasi anggaran dari Penyediaan Permakanan sebesar Rp855.213.360,00. Adapun realisasinya adalah sebesar Rp.823.173.337,00 atau tercapai 96,25%.
 - Alokasi anggaran dari Penyediaan sandang sebesar Rp106.063.000,00 dan terealisasi sebesar 94.727.000,00 atau 89,31%.
 - Alokasi anggaran dari Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial sebesar Rp540.780.024,00 dengan realisasi sebesar Rp.532.065.895,00 atau tercapai 98,39%.
 - Alokasi anggaran dari Pelayanan Reunifikasi Keluarga sebesar Rp2.400.000,00 dan terealisasi sebesar Rp.2.200.000,00 atau tercapai 91,67%.
 - Alokasi anggaran dari Pemberian Layanan Kedaruratan sebesar Rp36.936.200,00. Adapun realisasinya adalah sebesar Rp. 29.357.500,00 atau tercapai 79,48%.



- Alokasi anggaran dari Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga sebesar Rp740.336.765,00. Dengan realisasi sebesar Rp.488.262.240,00 atau tercapai 65,95%. Hal ini disebabkan oleh adanya perluasan sasaran penerima bantuan sosial yang bersumber dana dari APBN yang diluncurkan secara mendadak dalam tahun berjalan, sehingga bantuan sosial dari APBD tidak diperkenankan diterimakan kepada KPM yang sama.
- d. Alokasi Anggaran dari pelayanan Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti Sosial adalah Rp190.882.000,00 dan terealisasi sebesar 100%, dengan rincian sebagai berikut:
- Alokasi Anggaran dari Penyediaan permakanan sebesar Rp108.000.000,00 terealisasi sebesar 100%.
 - Alokasi Anggaran dari Penyediaan Sandang Rp4.000.000,00 dengan realisasi 100%.
 - Alokasi Anggaran dari Pemberian Bimbingan Fisik, Mental Spiritual & Sosial sebesar Rp78.882.000,00 dan terealisasi sebesar 100%.
- e. Alokasi Anggaran dari pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota adalah Rp2.083.940.740,00. Adapun realisasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp.1.177.809.025 atau tercapai sebesar 56,53% dengan rincian sebagai berikut:
- Alokasi Anggaran dari Penyediaan Permakanan (termasuk makan minum shelter dan permakanan isolasi mandiri) sebesar Rp2.081.940.740,00 dan terealisasi sebesar Rp.1.176.369.025,00 atau tercapai sebesar 56,50%. Hal ini disebabkan oleh menurunnya secara signifikan jumlah penyintas Covid-19 baik yang ditampung dalam shelter maupun yang isolasi mandiri.
 - Alokasi Anggaran dari Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan sebesar Rp720.000,00 dan terealisasi 100%.
 - Alokasi Anggaran dari Pelayanan Dukungan Psikososial sebesar Rp720.000,00 dengan realisasi sebesar 100%

Tabel 3. 46 Anggaran SPM Urusan Sosial tahun 2022

PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
ALOKASI ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH KOTA YOGYAKARTA	Rp.2.129.765.158.206,00	0,01454 %	0,00256 %	0,176 %	



PENDANAAN	PAGU	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN APBD	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM DENGAN ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	REALISASI
ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	Rp.30.985.140.080,00				Rp.27.853.120.844,80 89,89%
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	Rp. 5.461.929.129,00				Rp. 4.151.795.637,00 76%
ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM SU MBER LAINNYA YANG SAH DAN TIDAK MENGIKAT (CONTOH : DANA DESA, KERJASAMA, DANA BAGI HASIL DAN LAIN-LAIN)	Rp.20.750.000,00				Rp.20.750.000,00 100 %
A. APBN	Rp.11.152.800.000,00				Rp.11.152.800.000,00 100%
B. DAK					
C. LAINYA					

Tabel 3. 47 Rincian Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan SPM Urusan Sosial tahun 2022

NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
KOTA YOGYAKARTA					5.457.685.129	4.156.039.637	76.89 %
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				4.717.348.364	3.667.777.397	77.75 %
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			Rp.2.638.211.624,00	Rp.2.485.724.372,00	94 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	Rp.1.209.451.360,00	Rp.1.143.002.337,00	94,51 %
		2	Penyediaan sandang	Orang	Rp.159.295.000,00	Rp.141.588.000,00	88,88 %
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	Rp.51.500.000,00	Rp.47.256.000,00	91,76 %
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	Rp.2.400.000,00	Rp.728.428.895,00	91,67 %
		5	Pemberian	Orang	Rp.741.387.024,00	Rp.728.428.895,00	98,25 %



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
			bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial				
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	Rp.284.545.840,00	Rp.284.545.840,00	100 %
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	Rp.4.380.000,00	Rp.4.380.000,00	100 %
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	Rp.142.900.000,00	Rp.99.549.600,00	69,66%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	-	-	-
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	Rp.36.936.200,00	Rp.29.357.500,00	79,48 %
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	Rp.3.576.200,00	Rp.3.576.200,00	100 %
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	Rp.1.840.000,00	Rp.1.840.000,00	100 %
JUMLAH INDIKATOR					Rp.2.638.211.624,00	Rp.2.485.724.372,00	94 %
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			Rp.2.083.380.740,00	Rp.1.177.809.025,00	56,53 %
		1	Penyediaan permakanaan	Orang	Rp.2.081.940.740,00	Rp.1.176.809.025,00	56,50
		2	Penyediaan sandang	Orang	-	-	-
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	-	-	-
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	Rp.720.000,00	Rp.720.000,00	100 %
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	Rp.720.000,00	Rp.720.000,00	100 %



NO	PROGRAM	KEG.	SUB KEG.	SATUAN	PERENCANAAN	PELAKSANAAN	SERAPAN
JUMLAH INDIKATOR					Rp.2.083.380.740,00	Rp.1.177.809.025,00	56,53 %
JUMLAH PROGRAM					Rp.4.721.592.364,00	Rp.3.663.533.397,00	77,59%

Tabel 3. 48 Kegiatan lainnya SPM Urusan Sosial tahun 2022

NO	PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN LAINYA	ANGGARAN	REALISASI	%
1	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Rp.740.336.765,00	Rp.488.262.240,00	65,95 %

4. Dukungan Personil

Tabel 3. 49 Dukungan Personil SPM Urusan Sosial tahun 2022

JABATAN	PANGKAT	JUMLAH (orang)
Kepala Dinas	Pembina Utama Muda/ IV c	1
Sekretaris	Pembina Tingkat I/ IV b	1
Kepala Bidang	Pembina/ IV	1
	Penata Tingkat I/ III d	1
Kepala Seksi	Penata Tingkat I/ III d	2
	Pembina/ IV a	1
Sub Koordinator	Pembina/ IV a	1
Ka UPT	Pembina/ IV a	1
	Penata Tingkat I/ III d	1
Ka TU	Penata/ III c	1
	Penata Muda Tingkat I/ III b	1
Staf	Penata Muda/ III a	4
	Pengatur Tingkat I/ II d	2
	Pengatur Muda Tingkat I	2
Pejabat Fungsional	Pembina Tingkat I/ IV b	1
	Pembina/ IV a	1
	Penata/ III c	1
	Penata Muda Tingkat I/ III b	1
Naban	Penata Muda/ III a	12
		2
Tenaga Teknis		25
Taruna Siaga Bencana		64
Pendamping ASLUM (Asistensi Sosial Lanjut Usia Miskin)		65
PSM (Pekerja Sosial Masyarakat)		1065
TKS (Tenaga Kesejahteraan Sosial)		22
Pendamping Rehsos anak		4
Pendamping Rehsos Disabilitas		1
KSB (Kampung Siaga Bencana) Kota Yogyakarta		35
Karang Taruna		14
WKSBM (Wahana Kesejahteraan Sosial Berbasis Masyarakat)		28
K3S (Koordinator Kegiatan Kesejahteraan Sosial)		2
Komda Lansia		10
Pendamping PKH		47
	Jumlah	1.420



5. Hasil Capaian

Realisasi yang telah dicapai oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta dalam penerapan SPM di Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 50 Capaian SPM SPM Urusan Sosial tahun 2022

No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian							
			Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%		100%
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%		100%
		3	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%		100%
		4	Penyediaan permakanan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		5	Penyediaan sandang	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		6	Penyediaan alat bantu	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		7	Penyediaan perbekalan kesehatan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian							
			Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
		8	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		9	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas terlantar	100%		100%		100%		100%
		10	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%		100%		100%		100%
		11	Akses ke layanan pendidikan	100%		100%		100%		100%
		12	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%		100%		100%		100%
		13	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%		100%		100%		100%
		14	Layanan rujukan	100%		100%		100%		100%
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	100%		100%		100%		100%
2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Telantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Penyediaan permakanan	100%		100%		100%		100%
		3	Penyediaan sandang	100%		100%		100%		100%
		4	Penyediaan alat bantu	100%		100%		100%		100%
		5	Penyediaan perbekalan	100%		100%		100%		100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian							
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
			kesehatan						
		6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%		100%		100%	100%
		7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100%		100%		100%	100%
		8	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%		100%		100%	100%
		9	Akses ke layanan pendidikan	100%		100%		100%	100%
		10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%		100%		100%	100%
		11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%		100%		100%	100%
		12	Layanan rujukan	100%		100%		100%	100%
		13	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%		100%		100%	100%
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	100%		100%		100%	100%
		15	Penyediaan layanan kedaruratan	100%		100%		100%	100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
			bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan							
3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%		100%		100%		100%
		3	Penyediaan permakanan	100%		100%		100%		100%
		4	Penyediaan sandang	100%		100%		100%		100%
		5	Penyediaan alat bantu	100%		100%		100%		100%
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan	100%		100%		100%		100%
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%		100%		100%		100%
-		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100%		100%		100%		100%
-		9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependuduk, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%		100%		100%		100%
-		10	Akses ke layanan pendidikan	100%		100%		100%		100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%		100%		100%		100%
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%		100%		100%		100%
		13	Layanan rujukan	100%		100%		100%		100%
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	100%		100%		100%		100%
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru	100%		100%		100%		100%
4	Rehabilitasi Sosial Dasar Tuna Sosial Khususnya Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	1	Layanan data dan pengaduan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang sudah memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti	100%		100%		100%		100%
		3	Penyediaan permakanan	100%		100%		100%		100%
		4	Penyediaan sandang	100%		100%		100%		100%



No	Jenis Pelayanan Dasar		Indikator Kinerja Pencapaian							
			Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar			
			Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi
		5	Penyediaan alat bantu	100%		100%		100%		100%
		6	Penyediaan perbekalan kesehatan	100%		100%		100%		100%
		7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual	100%		100%		100%		100%
		8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Anak Terlantar	100%		100%		100%		100%
		9	Fasilitas pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak	100%		100%		100%		100%
		10	Akses ke layanan pendidikan	100%		100%		100%		100%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	100%		100%		100%		100%
		12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	100%		100%		100%		100%
		13	Layanan Rujukan	100%		100%		100%		100%
		14	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar diluar Panti dan mampu melakukan pengadaan kendaraan baru dan pembiayaan pemeliharaan	100%		100%		100%		100%
		15	Penyediaan layanan kedaruratan bagi daerah yang belum memiliki kendaraan khusus layanan rehabilitasi sosial dasar	100%		100%		100%		100%



No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Kinerja Pencapaian								
		Penerima Pelayanan Dasar				Mutu Minimal Layanan Dasar				
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Realisasi	
			diluar Panti dan tidak mampu melakukan pengadaan kendaraan baru							
5	Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat Tanggap dan Paska Bencana Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	1	Penyediaan permakanan	100%	Setiap tahun	100%	Jumlah barang, jasa dan sumber daya manusia	100%	Setiap tahun	100%
		2	Penyediaan sandang	100%		100%		100%		100%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	100%		100%		100%		100%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	100%		100%		100%		100%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	100%		100%		100%		100%

6. Kendala, Permasalahan dan Solusi

Tabel 3. 51 Permasalahan dan Solusi SPM Urusan Sosial tahun 2022

PERMASALAHAN	SOLUSI
<p>a. Kesulitan dalam tahap pengumpulan Data populasi PPKS target sasaran SPM yang sifatnya tidak bisa diprediksikan karena menyesuaikan dengan kejadian dan kebutuhan situasi kondisi/dinamis;</p> <p>b. Pada tahap perhitungan kebutuhan kesulitan karena datanya dinamis dan tidak dapat diprediksikan;</p> <p>c. Implementasi pembagian kewenangan dalam pemenuhan SPM antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota belum sinkron dan optimal, sehingga terjadi permasalahan teknis di lapangan.</p>	<p>a. Data sasaran mengacu pada data yang sudah ada di tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan data DTKS</p> <p>b. Kebijakan Pemerintah Daerah perlu diprioritaskan untuk pemenuhan SPM Bidang Sosial dan dieksplisitkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.</p> <p>c. Telah dilakukan koordinasi di tingkat provinsi.</p>



BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN

4.1 URUSAN PENDIDIKAN

Program, kegiatan dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Kota Yogyakarta sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Pendidikan Tahun 2022

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
1	PROGRAM SPM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM PAUD	Pendataan anak usia dini untuk keperluan identifikasi kebutuhan daya tampung layanan untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun	Peserta didik
			Penyelenggaraan sosialisasi pentingnya pendidikan anak usia dini kepada masyarakat paling sedikit 2 (dua) kali per tahun	Kegiatan
			Pengadaan bantuan biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu agar mendapat layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan anak usia dini di setiap desa	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Kegiatan Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan satuan	Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan anak usia dini paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Fasilitasi pertemuan guru/pendidik dalam wadah berbasis komunitas untuk meningkatkan kualitas layanan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai kualitas layanan pendidikan anak usia dini yang dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sarana dan prasarana satuan pendidikan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			Pemeliharaan dan perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana satuan pendidikan yang rusak	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1	Pendidik dan tenaga kependidikan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			(satu) kali dalam 1 (satu) tahun	
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah atau penilik untuk satuan pendidikan anak usia dini	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (PAUD)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			Beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
2	PROGRAM SPM PENDIDIKAN DASAR	Kegiatan pemenuhan layanan dasar SPM (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan hasil belajar Peserta Didik (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			Pelatihan/seminar/ lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
		Pemenuhan kualitas dan pemerataan layanan (SD/SMP/MI/MTs/Paket A/Paket B)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah dasar paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan jumlah pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Guru
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	
		Pemenuhan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan (SD/SMP/Paket A/Paket B)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan
3	PROGRAM PENDIDIKAN KESETARAAN	Kegiatan Pemenuhan Layanan Dasar SPM (Kesetaraan)	Pendataan warga negara usia 7 (tujuh) sampai dengan 15 (lima belas) tahun yang tidak bersekolah	Peserta didik



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
			Pemberian biaya pendidikan kepada Peserta Didik dari keluarga tidak mampu sampai lulus	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang kekurangan daya tampung	Peserta didik
			Penyediaan layanan pendidikan di wilayah yang ditetapkan sebagai daerah terdepan, terluar, dan tertinggal	Peserta didik
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Hasil Belajar Peserta Didik (Kesetaraan)	Pembentukan komunitas belajar dan memastikan guru, kepala sekolah, dan pengawas sekolah terlibat aktif dalam komunitas tersebut	Unit komunitas
			Pelatihan/seminar/lokakarya penguatan kompetensi kepala sekolah dan guru	Kegiatan
		Pemenuhan Kualitas dan Pemerataan Layanan (Kesetaraan)	Pemberian layanan pendampingan kepada satuan pendidikan untuk mencegah perundungan kekerasan pada anak paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan	Kegiatan
			Pemeriksaan kondisi bangunan sekolah paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Kegiatan
			Perbaikan terhadap kondisi bangunan satuan pendidikan yang rusak sedang dan rusak berat	Kegiatan
			Sosialisasi kepada satuan pendidikan mengenai peningkatan kualitas layanan termasuk pentingnya inklusivitas dan kebinekaan untuk mencegah diskriminasi terhadap ekonomi, gender, fisik, agama, suku, dan budaya kepada satuan pendidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun ajaran	Kegiatan
		Pemenuhan Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Pemetaan dan penataan penempatan untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pendistribusian pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas untuk pemerataan pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Pengajuan formasi guru ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Guru
			Penyediaan guru pembimbing khusus paling sedikit 1 (satu) orang pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah/lulusan guru penggerak sebagai kepala sekolah	Kegiatan
			Penempatan lulusan pendidikan dan pelatihan calon pengawas sekolah/lulusan guru penggerak sebagai pengawas sekolah	Kegiatan
			Pemetaan kecukupan jumlah pengawas sekolah untuk satuan pendidikan	



NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN
		Pemenuhan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Kesetaraan)	Peningkatan kualifikasi dan kompetensi bagi pendidik dan tenaga kependidikan yang belum memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan	Kegiatan
			Pemberian beasiswa atau bantuan biaya pendidikan dalam peningkatan kualifikasi dan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Pendidik dan tenaga kependidikan
			Fasilitasi kepala sekolah atau guru yang belum memiliki sertifikat guru penggerak untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan guru penggerak	Kegiatan

4.2 BIDANG URUSAN KESEHATAN

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM sebagai berikut:

Tabel 4. 2 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Kesehatan Tahun 2022

No	INDIKATOR SPM	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
3	Pelayanan kesehatan bayi Baru Lahir			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
4	Pelayanan kesehatan Balita			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
8	Pelayanan Kesehatan penderita Hipertensi			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Deabetes Melitus			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
10	Pelayanan kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
11	Pelayanan kesehatan orang terduga TB			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV AIDS			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV



4.3 BIDANG URUSAN PEKERJAAN UMUM

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM Tahun 2022 di bidang Pekerjaan Umum sebagai berikut:

Tabel 4. 3 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Pekerjaan Umum Tahun 2022

Jenis Pelayanan Dasar	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rumah tangga yang mendapatkan akses air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap seluruh rumah tangga di wilayah kabupaten/kota
Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Terpusat Skala Kota
			Rehabilitasi/Peningkatan/Perluasan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat Skala Kota

4.4 BIDANG URUSAN PERUMAHAN RAKYAT

Pelayanan dasar bidang urusan perumahan rakyat yang dilaksanakan pada tahun 2022 adalah tahap awal pendataan terkait lokasi rawan bencana di Kota Yogyakarta. Pendataan pada tahun 2022 mengambil data dasar yang termuat dalam Dokumen Kajian Risiko Bencana Kota Yogyakarta tahun 2022, sehingga secara khusus tidak termasuk dalam program/kegiatan manapun pada Pelayanan SPM urusan perumahan rakyat.

Pendataan lebih lanjut akan dilaksanakan pada tahun 2023 pada Program Pengembangan Perumahan, Kegiatan Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota, Sub Kegiatan Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana atau Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota.

4.5 BIDANG URUSAN TRANTIBUMLINMAS

1. Bidang Trantibum

Tabel 4. 4 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Trantibum Tahun 2022

NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
1	Pelayanan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota
				Peningkatan Kapasitas SDM Satpol



NO.	JENIS PELAYANAN DASAR	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN
				Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
				Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum
				Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
			Penegakan Perda Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
				Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Peraturan Bupati/Walikota
			Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Bidang Kebencanaan

Tabel 4. 5 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Kebencanaan Tahun 2022

No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	Penanggulangan Bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
			Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota
			Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
			Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota
			Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRCBencana Kabupaten/Kota
		Pelayanan Penyelamatan dan	Respon Cepat Darurat Bencana



No.	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Evakuasi Korban Bencana	Kabupaten/Kota
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

3. Bidang Kebakaran

Program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Yogyakarta yang mendukung penerapan SPM tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 4. 6 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Pendidikan Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun	Pencegahan Kebakaran dalam Kabupaten/Kota
		Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
		Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran
		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Pendataan Sarana dan Prasarana Proteksi Kebakaran
	Investigasi Kejadian Kebakaran	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran
	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat

4.6 URUSAN SOSIAL

Program dan kegiatan yang terkait dengan penerapan dan pencapaian SPM pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi diantaranya adalah:

Tabel 4. 7 Program Kegiatan, dan Sub Kegiatan SPM Sosial Tahun 2022

Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Perlindungan dan Jaminan Sosial	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga
Rehabilitasi Sosial	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Permakanan - Penyediaan Sandang - Penyediaan Alat Bantu <ul style="list-style-type: none"> - Pemberian Layanan Reunifikasi Keluarga - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial - Pemberian Bimbingan



Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Sosial kepada Keluarga Penyanggah Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat - Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar - Pemberian Pelayanan Penelusuran Keluarga - Pemberian Layanan Rujukan
	Rehabilitasi Sosial Penyanggah Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	- Pemberian Layanan Kedaruratan - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
Program Penanganan Bencana	Kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Sub kegiatan Penyediaan Makanan, Penyediaan Sandang, Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan dan Pelayanan Dukungan Psikososial.



BAB IV PENUTUP

Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang tentang Pemerintahan Daerah, SPM diterapkan pada Urusan Wajib Daerah terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, baik di Provinsi maupun Kabupaten/Kota.

SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dalam penyusunan SPM ditetapkan jenis pelayanan dasar, indikator SPM dan batas waktu pencapaian SPM. Penyusunan SPM oleh masing-masing Menteri/Pimpinan Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dilakukan melalui supervisi yang dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri melalui Sekretariat Bersama (Sekber) di Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah (Ditjen Bangda).

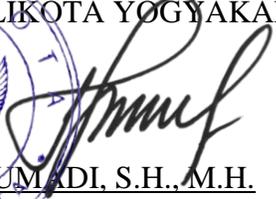
Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta selaku sekretariat Tim Penerapan SPM mengoordinasikan capaian penerapan 6 (enam) Bidang Urusan SPM yang dilaporkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ke dalam aplikasi E-SPM yang dikelola oleh Sekber SPM Ditjen Bangda. Pelaporan capaian SPM melalui aplikasi E-SPM dilaksanakan setiap triwulan (3 bulanan) dan selalu dievaluasi oleh Sekber SPM. Selain itu Bagian Tata Pemerintahan setiap tahunnya melaporkan capaian SPM selama 1 (satu) tahun kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat dan ditembuskan ke Ditjen Bangda. Secara umum capaian SPM 6 (enam) Bidang Urusan Tahun 2022 di Kota Yogyakarta sebagai berikut, untuk Bidang Urusan Pendidikan 98%, Bidang Urusan Kesehatan 98%, Bidang Urusan Pekerjaan Umum 100%, Bidang Urusan Perumahan Rakyat 100%, Bidang Urusan Trantibumlinmas 100%, dan Bidang Sosial 100%. Dapat dijelaskan capaian SPM yang kurang 100% yaitu dalam bidang urusan SPM Pendidikan kendala dan permasalahan yang dihadapi adalah pencapaian target untuk indikator PAUD karena belum mencapai 100%, jika dihubungkan dengan data yang tersedia anak usia paud masih ada yg berusia kurang dari 5-6 dan lebih 6 tahun. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga sudah semaksimal mungkin melakukan upaya untuk dapat memenuhi target indikator PAUD, dengan melakukan pendataan, dan mengolah data melalui dapodik untuk anak usia 5-6 tahun; memberikan sosialisasi ke masyarakat melalui HIMPAUDI, menyebarkan leaflet terkait pentingnya pendidikan anak usia dini, sebagai dasar persiapan masuk ke jenjang SD. Kemudian pada capaian SPM Bidang Kesehatan yang kurang 100% dapat dijelaskan juga terdapat kendala dan permasalahan yang dihadapi



yaitu pada indikator program pemenuhan balita mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar masih belum mencapai target 100% hal ini dikarenakan masih ditemukan orang tua yang tidak membawa balita ke posyandu dikarenakan berbagai alasan. Dinas Kesehatan telah menyusun strategi dengan melakukan sweeping dan pemantauan pertumbuhan mandiri dirumah, namun hal ini masih belum bisa mencapai target 100% karena masih terdapat orang tua yang tidak melaporkan hasil pengukuran balitanya kepada pihak puskesmas/posyadu. Selain itu, usaha yang telah dilakukan untuk mengupayakan terpenuhinya target yaitu dengan melakukan sweeping dan melakukan advokasi ke lintas sektor.

Selain indikator pelayanan kesehatan balita, indikator pelayanan kesehatan usia produktif (15-59 tahun) juga belum memenuhi target 100%. Kendala yang dihadapi di lapangan adalah Belum optimalnya dukungan dan koordinasi lintas sektor di wilayah, karena anggapan bahwa masalah kesehatan adalah kegiatan sektor kesehatan, serta kurangnya partisipasi masyarakat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Hal ini dikarenakan masih banyak masyarakat yang merasa sehat sehingga mereka enggan melakukan deteksi dini kesehatan. Selain itu, karena pandemi covid 19 masih belum sepenuhnya berakhir sehingga perlu melihat zonasi untuk keamanan pelaksanaan kegiatan. Dinas kesehatan telah melakukan upaya untuk mencapai target yang telah ditetapkan dengan melakukan koordinasi lintas sektor dan lintas program, melakukan peningkatan kapasitas SDM kesehatan untuk melakukan pemeriksaan, serta melakukan Monev pelaksanaan Perwal No. 90 Tahun 2019 tentang RAD Upaya Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular Kota Yogyakarta Tahun 2020-2024.

Demikian laporan Penerapan dan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 disampaikan sebagai bahan masukan untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Yogyakarta.

Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA

SUMADI, S.H., M.H.
NIP. 196308261989031007



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA